

# LAPORAN



## STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TANGERANG 2007

Diterbitkan : Desember 2007  
Data : Oktober 2006 – Oktober 2007



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

# KATA PENGANTAR

Di beberapa negara maju laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) merupakan media komunikasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak pengambil keputusan, lembaga-lembaga penelitian, civitas akademika dan masyarakat umum yang memerlukan data-data mengenai lingkungan. Dengan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah tersebut pengguna atau user dapat memperoleh informasi dan data yang diperlukan dengan mudah sesuai dengan arah kebijakan yang diambil.

Penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tangerang tahun 2007 meliputi laporan dokumen utama dan laporan basis data yang representatif. Secara garis besar buku laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ini bertujuan : menyediakan fondasi yang handal berupa data, informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah; menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melaksanakan pengawasan dan penilaian pelaksanaan tata praja lingkungan daerah, sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan; dan menyediakan data-data lingkungan hidup terutama yang terkait dengan penyebaran data kewilayahan di Kabupaten Tangerang.

Dengan adanya laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tangerang tahun 2007 diharapkan adanya alat ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tangerang dan media pengintegrasian kepentingan lingkungan dalam kebijakan diberbagai sektor pembangunan. Lebih jauh lagi dengan adanya Status Lingkungan Hidup Daerah diharapkan dapat mengintegrasikan semua pengambilan keputusan dalam bidang lingkungan dan ekonomi.

Tangerang, November 2007  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tangerang,



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

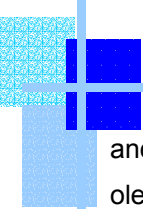
Kondisi sumberdaya alam merupakan modal dasar dan penentu keterlanjutan kemampuan daya dukung lingkungan. Lingkungan pada dasarnya mengandung matra biogeofisik kimia, sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan. Dalam kaitan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam untuk mendukung peri kehidupan, maka hubungan keselarasan dengan jenis-jenis kegiatan manusia harus terus dipelihara kelestarian kemampuan daya dukung lingkungannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas guna mengatasi dan mengendalikan berbagai masalah dari dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan dalam kaitannya dengan kualitas dan kuantitas lingkungan, serta meningkatkan pengertian dan kesadaran berbagai lapisan masyarakat dalam mengatur, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup, maka perlu adanya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tangerang.

Salah satu pertimbangan utama didalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang mengacu pada Status Lingkungan Hidup Nasional, dan Status Lingkungan Hidup Propinsi, digabungkan dengan kebutuhan/kepentingan regional serta mendukung penyusunan Status Lingkungan Hidup kabupaten/kota. Status Lingkungan Hidup Daerah disusun agar dapat menjadi bahan masukan bagi proses pengambilan keputusan pembangunan daerah. Pentingnya Status Lingkungan Hidup Daerah tersebut karena merupakan bagian dari akuntabilitas publik, sarana pendidikan dan pengawasan bagi publik serta sarana keterlibatan publik dalam ikut serta berperan menentukan kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di daerah.

Metodologi yang digunakan untuk menganalisis permasalahan lingkungan di kabupaten Tangerang menggunakan pendekatan P-S-R (*Pressure State Respons*). Analisis PSR dapat menggambarkan seberapa efektif respons suatu intervensi program terhadap persoalan sumberdaya alam dan lingkungan yang ada di suatu lokasi.

Kabupaten Tangerang secara keseluruhan memiliki luas 111.038 Ha. Setiap tahunnya Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan kegiatan industri, pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi dan jumlah penduduk. Sementara



---

ancaman terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan sangat ditentukan oleh laju pertumbuhan penduduk, mobilitas penduduk yang tinggi, dan struktur usia penduduk Kabupaten Tangerang yang kebanyakan berusia muda sehingga terkonsentrasi pada usia kerja, hal ini akan menuntut ketersediaan lapangan kerja, tersedianya lahan, serta sarana dan prasarana yang memadai.

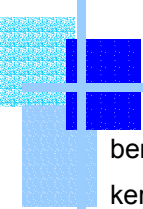
Seiring dengan perkembangan Kabupaten Tangerang sesuai dengan dinamika masyarakatnya tersebut otomatis telah memunculkan permasalahan lingkungan di daerah ini. Tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin besar dan dikhawatirkan akan melewati daya dukungnya. Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pengelolaan lingkungan menjadi salah satu kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Informasi tentang lingkungan hidup di daerah perlu disusun sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sarana pendidikan dan pengawasan bagi publik serta sarana keterlibatan publik untuk ikut serta berperan menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang diperhatikan daya dukungnya.

Dalam pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan di Kabupaten Tangerang terdapat berbagai masalah seperti :

- a. Terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman
- b. Pembangunan yang melanggar sempadan bangunan yang ditetapkan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan lahan yang ditetapkan.
- c. Pemanfaatan lahan di kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Tangerang yang dapat mengganggu fungsi ekologis DAS tersebut sehingga berdampak terhadap kawasan pemukiman di hilirnya.
- d. Batasan kepemilikan lahan yang masih banyak kurang jelas.

Beberapa isu lingkungan hidup utama berkaitan dengan degradasi sumberdaya alam khususnya air dan lahan yang ditandai dengan deplesi sumber air (permukaan dan air bawah tanah, baik kuantitas maupun kualitas), semakin meluasnya tanah kritis dan DAS kritis, penurunan produktivitas lahan, semakin meluasnya kerusakan hutan (terutama karena perambahan) baik hutan pegunungan maupun hutan pantai (mangrove). Selain itu permasalahan pencemaran, baik pencemaran air, udara maupun tanah yang penyebarannya sudah cukup meluas dan terkait dengan industri, rumah tangga dengan segala jenis limbahnya terutama sampah.

Sedangkan untuk penataan ruang, terjadi inkonsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan eksisting penggunaan lahan/pemanfaatan ruang yang tidak



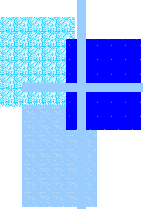
---

berwawasan lingkungan. Permasalahan kawasan pesisir dan pantai, yaitu kerusakan hutan mangrove, abrasi pantai, perubahan tataguna lahan di wilayah pesisir, intrusi air laut dan pencemaran air laut.

Permasalahan sosial kependudukan ditandai dengan tingginya urbanisasi, munculnya permukiman kumuh, tingginya pedagang kaki lima dan kesemrawutan lalu lintas. Tingginya jumlah industri dan kendaraan bermotor, serta berkurangnya lahan terbuka akan meningkatkan pencemaran udara.

Berdasarkan analisis dari pendekatan PSR, maka arah kebijakan lingkungan yang diambil sebaiknya lebih meningkatkan response pada aspek-aspek utama yang menjadi isu penting yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi status lingkungan hidup Kabupaten Tangerang Barat. Arahan tersebut menyangkut aspek-aspek berikut ini :

1. Kualitas dan kuantitas air sangat dipengaruhi oleh aktivitas sekitarnya serta kondisi perubahan tata guna lahan dibagian hulunya. Perubahan tata guna lahan, tingkat kepadatan dan aktivitas yang tinggi secara langsung akan mengakibatkan perubahan pada kualitas air.
2. kondisi udara di Tangerang secara kualitas masih di bawah Nilai Ambang Batas. Akan tetapi ada kekhawatiran apabila tidak dilakukan tindakan pengendalian, akan terjadi pencemaran udara. Kekhawatiran ini timbul karena dampak yang ditimbulkan oleh kualitas udara yang buruk dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk penyakit ISPA.
3. Keberadaan hutan, kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau dibutuhkan untuk mengatasi terjadinya lahan kritis. Lahan kritis perlu dicermati karena dapat menyebabkan terjadinya bencana longsor dan banjir.
4. Keanekaragaman yang sangat rendah pada umumnya di sebabkan karena pengurangan luas lahan dan hutan dengan sendirinya akan mengurangi jumlah populasi flora fauna, terutama bagi jenis yang langka dan dilindungi akibat dari berkurangnya habitat.
5. Masalah yang dihadapi oleh pesisir dan ekosistem laut Kabupaten Tangerang merupakan tekanan yang disebabkan oleh terjadinya abrasi, erosi, sedimentasi dan yang bersifat intervensi manusia seperti pembukaan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan tambak. Pencemaran terhadap ekosistem laut, baik yang bersumber dari kegiatan domestik, industri, perikanan, maupun pariwisata memperlihatkan laju yang semakin tinggi terutama di wilayah perairan pantai Kabupaten Tangerang yang banyak



---

dimanfaatkan untuk kepentingan industri (terutama penambangan migas), perhubungan, tambak dan buangan domestik serta industri.

Pengembangan pembangunan ramah lingkungan diharapkan melalui pendekatan lingkungan. Masalah yang penting untuk diperhatikan adalah efisiensi energi, reduksi dampak lingkungan dari adanya permukiman, penggunaan air, tanah dan kualitas udara.

### **Perlindungan terhadap sumber daya air**

Sumber daya air memiliki peran ganda yaitu sebagai penunjang sistem ekonomi (*resources based economy*) dan sebagai penunjang sistem kehidupan (*life support system*). Pengelolaan sumber daya air terpadu (*Integrated Water Resources Management*) harus ditunjang oleh berbagai faktor seperti:


1. Lingkungan yang menunjang (*enabling environment*) seperti kebijakan dan peraturan perundangan,
2. Kerangka institusi (*institutional framework*), seperti institusi sektoral di semua tingkatan, institusi pelaksana pembangunan, kelompok pengguna dan kelompok pendukung seperti akademisi dan LSM,
3. Instrumen manajemen (*management instrument*), seperti alat perencanaan, sistem monitoring, prasaran air dan sebagainya.

Kegiatan fisik pengelolaan SDA dilakukan dengan cara :

1. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumberdaya dan daerah di sekitarnya
2. Melakukan pencegahan terhadap timbulnya lahan kritis serta memberikan rekomendasi upaya-upaya yang harus ditempuh untuk pemulihannya
3. Melakukan pencegahan terhadap pencemaran air
4. Melindungi dan mengembangkan sumber<sup>2</sup> air melalui upaya peningkatan kapasitas suplai (*recharge*) ke tampungan air (*water storage*)

### **Pengelolaan sampah dengan konsep zero waste**

Sampah atau limbah padat merupakan hasil samping dari kegiatan manusia. Peningkatan jumlah penduduk yang dibarengi dengan peningkatan aktivitas menyebabkan kualitas dan kuantitas sampah terus bertambah. Pembuangan sampah dapat berarti pencemaran lingkungan. Efeknya makin lama juga makin terasa karena sampah kota akan semakin banyak, sementara lahan pembuangan makin sempit. Beberapa cara penanganan sampah yang biasa dilakukan adalah



---

penumpukan (*dumping*), untuk pakan, pengomposan, pembakaran (*incenerator*) dan sanitasi dalam tanah (*sanitary landfill*).

Konsep zero waste adalah penanganan sampah dari sumber yang bertujuan meminimumkan jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah. Dengan memanfaatkan sampah menjadi bahan berguna, kecepatan penumpukan sampah di TPA dapat diperlambat. Konsep zero waste melibatkan masyarakat. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa sasaran penanganan sampah adalah

1. Berkelanjutan lingkungan
2. Hemat secara ekonomi

### **Pengelolaan limbah cair**

Air buangan merupakan unsur potensial yang merupakan ancaman bagi lingkungan, khususnya lingkungan air. Dengan demikian pengolahan air buangan terutama limbah industri merupakan bagian dari upaya manusia untuk mengamankan sumber air yang sangat diperlukan bagi manusia, mengingat makin terbatasnya sumber air yang dapat dipergunakan untuk penyediaan air atau untuk keperluan lainnya. Dalam pengelolaan limbah cair harus diperhatikan aspek lahan, teknologi, biaya, persyaratan pembuangan limbah dan sebagainya.

Pengolahan limbah dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran, peningkatan produksi, izin lokasi, perbaikan produk dan penggunaan air kembali. Untuk tujuan penentuan cara pengolahan dan pemilihan teknologi kontaminan-kontaminan yang terdapat dalam air buangan industri dapat diklasifikasikan menjadi kontaminan biologi dan non biologi.

### **Pengendalian Pencemaran Udara**

- Melakukan Program Langit Biru
- Melakukan pengujian emisi pada saat pengujian kendaraan
- Mensyaratkan penyusunan AMDAL /UKL-UPL pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara
- Melakukan reboisasi
- Melakukan penyuluhan kepada petani agar memberi pupuk sesuai ketentuan/dosis
- Hanya mengizinkan produk-produk dengan label CFC
- Melakukan rehabilitasi lahan bekas pertambangan.



## **Pengendalian Lahan dan Hutan**

Kebijakan maupun program sebagai upaya pengendalian lahan dan hutan, adalah :


- Menyusun perencanaan tata ruang, dimana di dalamnya telah ditetapkan batas-batas kawasan lindung, kawasan yang boleh berubah fungsi, dll
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan dan perkebunan yang berwawasan lingkungan
- Pembinaan dan pengendalian perusahaan hutan
- Penguatan dan penatagunaan hutan
- Rehabilitasi hutan dan lahan
- Perlindungan dan pengamanan hutan lintas kabupaten
- Melakukan reklamasi dan reboisasi pada lahan kritis, termasuk bekas area penambangan

## **Pengelolaan Pantai dan Pesisir**

Pengelolaan daerah pesisir pantai sangat diperlukan untuk melindungi daerah Kabupaten Tangerang dari bahaya alam seperti badai, abrasi, gelombang pasang, pencemaran dan intrusi air laut. Beberapa bagian dari pantai di Kabupaten Tangerang saat ini terlihat sudah mengalami pencemaran, kerusakan dan tidak asri lagi. Oleh karena itu, beberapa kebijakan yang dirasa perlu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan adalah :

1. Menjaga kualitas kawasan pantai/pesisir agar tetap baik, untuk itu perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada program-program pengendalian pembuangan limbah di kawasan pesisir Pantai.
2. Melakukan monitoring terhadap implementasi kepedulian pengelolaan lingkungan oleh kegiatan yang ada di sepanjang pantai dan pulau-pulau kecil.
3. Melakukan pengaturan tata ruang wilayah pesisir dan laut, melindungi wilayah tersebut dari bahan pencemar, sampah dan bangunan liar.
4. Melakukan usaha konservasi serta rehabilitasi/reklamasi habitat yang telah rusak, dengan merehabilitasi ekosistem hutan mangrove yang sudah rusak, sehingga daerah pantai/pesisir tersebut dapat dikembangkan menjadi daerah wisata yang indah, asri, aman dan nyaman.

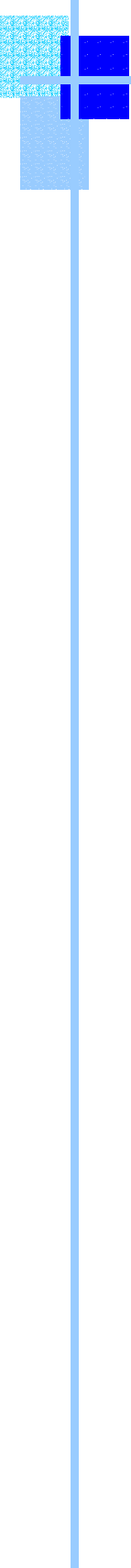


- 
5. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan di wilayah pantai/pesisir seperti penambahan jumlah TPS dan memperlancar aksesibilitas pengangkutan sampah dari daerah pantai ke TPA sampah.
  6. Melakukan penegakkan hukum lingkungan kepada setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran (pencemaran dan kerusakan) lingkungan di kawasan pantai pesisir Kabupaten Tangerang.
  7. Memberikan sanksi/tindakan tegas pada siapapun yang tidak memiliki izin pembangunan di sepanjang pantai serta keharusan pembuatan Dokumen UKL/UPL atau AMDAL pada kegiatan usaha yang memiliki dampak lingkungan.
  8. Melaksanakan peningkatan himbuan atau sosialisasi, serta program pemerintah yang dapat memberikan pendidikan lingkungan atau menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat tentang arti penting kebersihan lingkungan pantai/pesisir berserta dengan perairannya.

#### **Pemulihan Lahan Kritis dan Keanekaragaman hayati**

Upaya pemulihan dan perbaikan lahan kritis tidak saja dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga mengedepankan peran dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah Kabupaten Tangerang terutama dalam mengamankan kebijakan dan pelaksanaan program rehabilitasi lahan kritis diantaranya adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap upaya perubahan fungsi lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.
2. Penggunaan metode yang tepat dalam melakukan rehabilitasi dan pemanfaatan lahan kritis untuk dapat dipergunakan sebagai areal pertanian dan perkebunan yang produktif.
3. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak terkait dalam pemanfaatan lahan yang telah ditetapkan peruntukannya terutama lahan untuk konservasi.
4. Perlu alternatif dalam pembangunan pemukiman penduduk, agar tidak memanfaatkan lahan produktif maupun lahan hutan.
5. Menetapkan kebijaksanaan Pemerintah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian Tanah dan Larangan Pemanfaatan Lahan Produktif untuk keperluan lain.
6. Melakukan revegetasi dan reboisasi areal atau kawasan yang memiliki penutupan tajuk vegetasi jarang.
7. Perlindungan dan penataan kawasan lindung, terutama penataan tapal batas kawasan lindung.

- 
8. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya upaya pelestarian sumberdaya lahan dan hutan.
  9. Pemantapan ruang lahan untuk budidaya pertanian dan perkebunan pada *catchment area* terutama menyangkut luas berdasarkan faktor daya dukung lingkungan setempat.
  10. Melakukan rehabilitasi lahan yang telah rusak melalui program reboisasi dan penghijauan.

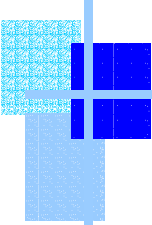
Melibatkan peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi lahan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan

# DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| Kata Pengantar  | i    |
| Ringkasan Eksekutif   | ii   |
| Daftar Isi  | iii  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |      |
| 1.1 Latar Belakang  | I-1  |
| 1.2 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Kegiatan  | I-2  |
| 1.3 Kebijakan Pembangunan Nasional/Makro  | I-3  |
| 1.4 Visi dan Misi Kabupaten Tangerang   | I-6  |
| 1.5 Gambaran Umum   | I-6  |
| 1.5.1 Posisi Geografis  | I-6  |
| 1.5.2 Kependudukan  | I-7  |
| 1.5.3 Kepadatan Penduduk  | I-8  |
| 1.5.4 Sosial Budaya   | I-8  |
| 1.5.5 Kawasan Rawan Bencana   | I-9  |
| 1.5.6 Tata Guna Lahan   | I-10 |
| 1.5.7 Perekonomian  | I-10 |
| 1.5.8 Sarana dan Prasarana Lingkungan   | I-13 |
| 1.5.9 Kebijakan Pendanaan Lingkungan, Sosial, Ekonomi dan Budaya di Daerah dalam Rangka Melaksanakan Pembangunan Yang Berkelanjutan | I-13 |
| <b>BAB II ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA</b>  |      |
| 2.1 Gambaran Umum   | II-1 |
| 2.2 Air   | II-5 |
| 2.3 Udara dan Atmosfer  | II-6 |
| 2.4 Lahan dan Hutan   | II-7 |
| 2.5 Keanekaragaman Hayati   | II-7 |
| 2.6 Pesisir dan Laut  | II-8 |
| 2.7 Metodologi Pengumpulan Data SLHD  | II-9 |

|  |        |
|--|--------|
| 2.8 Metodologi Penyusunan Laporan SLHD   | II-10  |
| 2.9 Pemahaman Pendekatan Pressure State Response (PSR)<br>Dalam Penyusunan SOE | II-11  |
| 2.10 Analisis Pressure State Response (PSR)                                    | II-13  |
| <br>BAB III AIR  |        |
| 3.1 Hidrologi dan Geohidrologi   | III-1  |
| 3.1.1 Kondisi Sumberdaya Air   | III-1  |
| 3.1.2 Potensi Sumberdaya Air   | III-2  |
| 3.2 Gambaran Kualitas Air Sungai dan Air Tanah                                 | III-5  |
| 3.3 Sumber Air Baku dan Pemanfaatannya   | III-14 |
| 3.4 Pengelolaan Sumber Daya Air  | III-14 |
| 3.5 Analisis Pressure State Response   | III-17 |
| 3.5.1 PSR Primer   | III-17 |
| 3.5.2 PSR Sekunder   | III-18 |
| <br>BAB IV UDARA   |        |
| 4.1 Klimatologi  | IV-1   |
| 4.2 Kualitas Udara   | IV-3   |
| 4.2.1 Pencemaran dan Kualitas Udara  | IV-3   |
| 4.2.2 Sumber Pencemaran Udara  | IV-4   |
| 4.3 Kondisi Udara Eksisting  | IV-5   |
| 4.4 Permasalahan yang Timbul   | IV-8   |
| 4.5 Upaya Mengatasi Pencemaran Udara   | IV-11  |
| 4.6 Analisis Pressure State Response   | IV-13  |
| 4.6.1 PSR Primer   | IV-13  |
| 4.6.2 PSR Sekunder   | IV-14  |
| <br>BAB V LAHAN DAN HUTAN  |        |
| 5.1 Kondisi Penggunaan Lahan   | V-1    |
| 5.1.1 Penggunaan Perumahan   | V-2    |
| 5.1.2 Penggunaan Perkampungan  | V-3    |
| 5.1.3 Zona Industri dan Kawasan Industri                                       | V-3    |
| 5.1.4 Kegiatan Perdagangan/Perusahaan dan Jasa                                 | V-4    |

|   |        |
|---|--------|
| 5.1.5 Penggunaan Pertanian                        | V-5    |
| 5.2 Pola Penggunaan Lahan                         | V-5    |
| 5.3 Intensitas Pemanfaatan Ruang                  | V-7    |
| 5.4 Sarana dan Prasarana Lingkungan               | V-7    |
| 5.5 Kondisi Eksisting Lahan dan Hutan             | V-7    |
| 5.6 Analisis Pressure State Response              | V-10   |
| 5.6.1 PSR Primer                                  | V-10   |
| 5.6.2 PSR Sekunder                                | V-11   |
| <br>  |        |
| <b>BAB VI KEANEKARAGAMAN HAYATI</b>               |        |
| 6.1 Pengertian dan Nilai Keanekaragaman Hayati    | VI-1   |
| 6.2 Flora dan Fauna                               | VI-3   |
| 6.3 Sumberdaya Alam – Hutan                       | VI-6   |
| 6.4 Rehabilitasi Lahan                            | VI-7   |
| 6.5 Analisis Pressure State Response              | VI-9   |
| 6.5.1 PSR Primer                                  | VI-9   |
| 6.5.2 PSR Sekunder                                | VI-10  |
| <br>  |        |
| <b>BAB VII PESISIR DAN LAUTAN</b>                 |        |
| 7.1 Kondisi Lingkungan Perairan                   | VII-2  |
| 7.2 Abrasi Pantai                                 | VII-5  |
| 7.3 Reboisasi Hutan Pantai                        | VII-8  |
| 7.4 Produksi Perikanan                            | VII-9  |
| 7.5 Pengelolaan Pesisir                           | VII-10 |
| 7.6 Analisis Pressure State Response              | VII-12 |
| 7.6.1 PSR Primer                                  | VII-12 |
| 7.6.2 PSR Sekunder                                | VII-13 |
| <br>  |        |
| <b>BAB VIII REKOMENDASI/ TINDAK LANJUT</b>        |        |
| 8.1 Strategi Pengelolaan Lingkungan               | VIII-4 |
| 8.2 Konsep Pembangunan Ramah Lingkungan           | VIII-5 |
| 8.2.1 Perlindungan Terhadap Sumberdaya Air        | VIII-5 |
| 8.2.2 Pengelolaan Sampah dengan Konsep Zero Waste | VIII-6 |
| 8.2.3 Pengelolaan Limbah Cair                     | VIII-7 |



---

|  |        |
|--|--------|
| 8.2.4 Pengendalian Pencemaran Udara                    | VIII-7 |
| 8.2.5 Pengendalian Lahan dan Hutan                     | VIII-8 |
| 8.2.6 Pengelolaan Pantai dan Pesisir                   | VIII-8 |
| 8.2.7 Pemulihan Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati | VIII-9 |

Daftar Pustaka

Lampiran Foto-foto

## DAFTAR TABEL

|  |        |
|--|--------|
| Tabel 3.1 Sebaran SITU di Kabupaten Tangerang                            | III-5  |
| Tabel 3.2 Kondisi Kualitas Air Beberapa Sungai di Wilayah Kab. Tangerang | III-6  |
| Tabel 3.3 Pemanfaatan Air Baku di Kabupaten Tangerang                    | III-14 |
| Tabel 4.1a Suhu Udara rata-rata di Kabupaten Tangerang                   | IV-1   |
| Tabel 4.1b Kelembaban Udara dan Intensitas Matahari                      | IV-2   |
| Tabel 4.1c Temperatur Udara Maksimum dan Minimum                         | IV-2   |
| Tabel 4.1d Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan                          | IV-3   |
| Tabel 4.2 Daerah dengan Kasus Kejadian Penyakit ISPA di Kab. Tangerang   | IV-8   |
| Tabel 4.3 Rute Angkutan dan Persebaran Terminal di Kab Tangerang         | IV-10  |
| Tabel 5.1 Rencana dan Realisasi Reboisasi di Kab. Tangerang              | V-6    |
| Tabel 5.2 Total Luas Hutan di Kab. Tangerang                             | V-8    |
| Tabel 5.3 Kondisi Lahan Kritis di Ka. Tangerang                          | V-8    |
| Tabel 5.4 Penggunaan Pupuk   | V-9    |
| Tabel 6.1 Flora yang Dilindungi/Langka                                   | VI-5   |
| Tabel 6.2 Fauna yang Dilindungi/Langka                                   | VI-5   |
| Tabel 6.3 Luas Hutan Menurut Fungsinya                                   | VI-6   |
| Tabel 6.4 Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi                       | VI-8   |
| Tabel 7.1 Lokasi Abrasi Pantai di Kab. Tangerang                         | VII-6  |
| Tabel 7.2 Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi Hutan Pantai Th 2007  | VII-8  |
| Tabel 7.3 Perkembangan Data Produksi Ikan                                | VII-9  |

## DAFTAR GAMBAR

|   |        |
|---|--------|
| Gambar 2.1 Diagram Model PSR (Tekanan-dampak-respons)   | II-12  |
| Gambar 2.2 Dinamika Sistem Pressure State Impact Response                                     | II-13  |
| Gambar 2.3 Hubungan Fungsional Antar Komponen   | II-15  |
| Gambar 3.1 Situ di Kabupaten Tangerang  | III-5  |
| Gambar 3.2 Sungai Cisadane  | III-6  |
| Gambar 3.3 Parameter yang Melebihi Baku Mutu di Sungai Cisadane                               | III-8  |
| Gambar 3.4 Parameter Kualitas Air Sungai Cirarab yang melebihi baku mutu                      | III-9  |
| Gambar 3.5 Parameter Kualitas Air Sungai Cimanceuri yang melebihi baku mutu                   | III-10 |
| Gambar 3.6 Aktivitas Penduduk di Sungai Cisadane dan Pencemaran Deterjen di<br>Sungai Cirarab | III-13 |
| Gambar 4.1 Transportasi di Kabupaten Tangerang  | IV-7   |
| Gambar 4.2 TPA Sampah di Jatiwaringin   | IV-8   |
| Gambar 4.3 Hutan Kota di Kabupaten Tangerang  | IV-12  |
| Gambar 5.1 Kawasan Perumahan  | V-3    |
| Gambar 5.2 Lahan Perkampungan   | V-3    |
| Gambar 5.3 Kawasan Perdagangan  | V-4    |
| Gambar 5.4 Lahan Pertanian  | V-5    |
| Gambar 6.1 Lahan Bekas Galian C dan Penambangan Pasir yg masih aktif                          | VI-5   |
| Gambar 6.2 Hutan Kota   | VI-7   |
| Gambar 7.1 Pantai dan Laut Tanjung Pasir  | VII-3  |
| Gambar 7.2 Grafik Kualitas Air Laut yang Melebihi NAB   | VII-4  |
| Gambar 7.3 Grafik Logam Berat Pada Perairan Laut yang Melebihi NAB                            | VII-5  |
| Gambar 7.4 Abrasi Pantai  | VII-7  |
| Gambar 7.5 Perkembangan Produksi Perikanan  | VII-10 |
| Gambar 8.1 Strategi Pengelolaan Lingkungan  | VIII-5 |



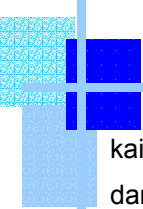
**1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa memasukkan unsur konservasi lingkungan pada kerangka proses pembangunan, sedang ekspresi secara global sangat penting meningkatkan pemahaman terhadap keterkaitan antara ekosistem lingkungan dan manusia serta segi sebab akibatnya. Oleh karena itu pemahaman tentang berbagai fenomena perlu disikapi sebagai peristiwa yang memiliki nilai penting terhadap berbagai tatanan baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan global.

Perubahan kualitas lingkungan dapat terlihat pada perubahan kualitas udara, air dan tanah. Namun apabila jumlahnya melampaui ambang batas, akan menurunkan daya dukung lingkungan dan terjadi, kerusakan lingkungan. Kabupaten Tangerang termasuk wilayah yang cepat perkembangannya karena kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan. Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk dengan tingginya pembangunan yang terjadi jika tidak dibarengi dengan penerapan peraturan yang ketat tentang lingkungan hidup akan terjadi korelasi yang positif antara peningkatan jumlah penduduk dengan pencemaran .

Kondisi sumberdaya alam merupakan modal dasar dan penentu keterlanjutan kemampuan daya dukung lingkungan. Lingkungan pada dasarnya mengandung matra biogeofisik kimia, sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan. Dalam kaitan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam untuk mendukung peri kehidupan, maka hubungan keselarasan dengan jenis-jenis kegiatan manusia harus terus dipelihara kelestarian kemampuan daya dukung lingkungannya. Penilaian kemampuan tersebut biasanya lebih banyak bersifat dari sisi kepentingan manusia (antroposentris), cara ini seyogyanya dapat dikaji lebih cermat untuk kepentingan alami dan binaan. Upaya pendayagunaan potensi sumberdaya alam yang efisien dan efektif membutuhkan perangkat perencanaan dan kemampuan iptek yang cermat. Oleh karena cara pandang, bahwa teknologi dapat menyelesaikan masalah keserasian interaksi sumberdaya

Berdasarkan hal tersebut diatas guna mengatasi dan mengendalikan berbagai masalah dari dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan dalam



---

kaitannya dengan kualitas dan kuantitas lingkungan, serta meningkatkan pengertian dan kesadaran berbagai lapisan masyarakat dalam mengatur, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup, maka perlu adanya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tangerang.

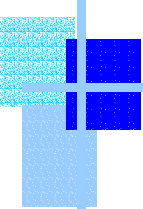
Salah satu pertimbangan utama didalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang mengacu pada Status Lingkungan Hidup Nasional, dan Status Lingkungan Hidup Propinsi, digabungkan dengan kebutuhan/kepentingan regional serta mendukung penyusunan Status Lingkungan Hidup kabupaten/kota. Status Lingkungan Hidup Daerah disusun agar dapat menjadi bahan masukan bagi proses pengambilan keputusan pembangunan daerah. Pentingnya Status Lingkungan Hidup Daerah tersebut karena merupakan bagian dari akuntabilitas publik, sarana pendidikan dan pengawasan bagi publik serta sarana keterlibatan publik dalam ikut serta berperan menentukan kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di daerah.

## **1.2. TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT KEGIATAN**

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang dimaksudkan untuk menyusun status lingkungan hidup kabupaten. Tangerang yang didasarkan pada pemanfaatan data dalam rangka mengembangkan skenario kebijakan yang berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta pemantauan kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Tujuan yang hendak dicapai dengan pelaksanaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLDH) ini adalah:

1. Menyediakan data, informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah;
2. Menyediakan sumber informasi utama Repetada, Propeda dan kepentingan Investor;
3. Sebagai salah satu sumber informasi dalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI);
4. Sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk akuntabilitas publik yaitu sebagai laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada para stakeholder;

- 
5. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;
  6. Menyediakan sumber informasi utama bagi rencana dan program pembangunan tahunan daerah serta untuk kepentingan penanaman modal (investor), peningkatan peran publik dalam pembangunan berkelanjutan.
  7. Memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan hidup terkini (rona lingkungan)
  8. Memberikan petunjuk kepada pihak penyusun suatu program/perencanaan dalam mengimplementasikan wawasan pemikirannya dalam pengembangan pembangunan Kabupaten Tangerang yang berwawasan lingkungan.

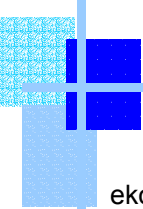
Adapun sasaran utama yang hendak dicapai dalam penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang tahun 2007 ada 3 (tiga), yaitu :

1. Terusunnya basis data status lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang akan dijadikan acuan dan evaluasi dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam.
2. Terjadinya diseminasi informasi serta kesamaan persepsi dalam hal validasi data lingkungan antara masyarakat, pemerintah dan stakeholders lainnya.
3. Tersusunnya laporan status lingkungan hidup yang menggambarkan berbagai fakta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, serta usulan berbagai skenario kebijakan, program serta kegiatan untuk mendorong terjadinya partisipasi aktif dari stakeholders dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

Selanjutnya, manfaat dari hasil kegiatan penyusunan *State of the Environment Report* (SoER) Kabupaten Tangerang tahun 2007 diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah berkala atau tahunan, tentang perubahan dan kecenderungan yang terjadi pada lingkungan hidup secara transparan, sehingga dapat menjadi referensi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan serta pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup pada saat ini maupun mendatang.

### **1.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL / MAKRO**

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (*The United Nations Conference on Environment and Development - UNCED* ) di Rio De Janeiro tahun 1992, menghasilkan beberapa strategi yang dituangkan dalam agenda 21.



---

Agenda 21 Indonesia difokuskan pada terintegrasinya pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan kedalam suatu paket kebijakan yang dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Pengelolaan Limbah

Sasaran agenda pengelolaan limbah adalah untuk memperbaiki kondisi dan kualitas lingkungan hidup manusia serta mencegah degradasi lingkungan hidup secara keseluruhan. Terdiri dari sub-agenda : Perlindungan Atmosfir, Pengelolaan Bahan Kimia Beracun, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3), Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Pengelolaan Limbah Padat dan Cair.

2. Pelayanan Masyarakat

Fokus pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada dimensi lain. Agenda pelayanan masyarakat meliputi sub-agenda: pengentasan kemiskinan, perubahan pola konsumsi, dinamika kependudukan, pengelolaan dan peningkatan kesehatan, pengembangan perumahan dan permukiman, dan sistem perdagangan global, instrumen ekonomi serta neraca ekonomi dan lingkungan terpadu.

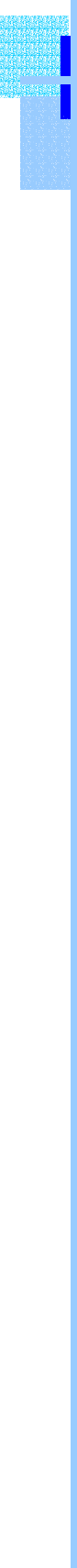
3. Pengelolaan Sumber Daya Tanah

Didasari oleh pertimbangan bahwa proses-proses pembangunan yang akan terjadi akan bertumpu pada potensi sumberdaya tanah dari sub-agenda : perencanaan sumberdaya lahan, pengelolaan kehutanan, pertanian yang berkelanjutan, pengembangan pedesaan dan pengelolaan sumber daya air.

4. Pengelolaan Sumberdaya Alam

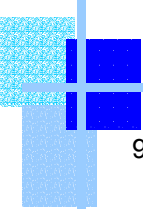
Mencakup : konservasi keanekaragaman hayati; pengembangan bioteknologi, dan pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan. Penanganan ketiga aspek tersebut diarahkan pada upaya-upaya pelestarian dan perlindungan keanekaragaman biologi pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem serta menjamin kekayaan alam, binatang dan tumbuhan.

Pelaksanaan agenda 21 dalam kenyataannya masih belum memuaskan dan masih banyak yang harus dilakukan. Banyak kendala dalam melaksanakan Agenda 21 di Indonesia, mulai dari kurangnya kesadaran publik dan pemerintah sampai kurangnya dana dan kemauan, politis, meskipun kebijakan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 9 ayat (2) dan ayat(4) pada Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

- 
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan lingkungan hidup.
  2. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagai mana dimaksudkan pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.

Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2002 menyatakan bahwa kebijakan dan koordinasi dibidang pengelolan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Dalam rangka untuk membangun dan menegakkan kembali komitmen pemerintah dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan, telah diadakan forum Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 21 Januari 2004. Kesepakatan nasional yang tercapai adalah sebagai berikut:

1. Penegasan komitmen bagi pelaksanaan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan dan sejalan dengan komitmen global;
2. Perlunya keseimbangan yang proporsional dari tiga pilar pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) serta saling ketergantungan dan saling memperkuat;
3. Penanggulangan kemiskinan, perubahan pola produksi dan konsumsi, serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
4. Peningkatan kemandirian nasional;
5. Penegasan bahwa keanekaragaman sumberdaya alam dan budaya sebagai modal pembangunan dan perekat bangsa;
6. Perlunya melanjutkan proses reformasi sebagai prakondisi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan;
7. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, pengelolaan sumberdaya alam; pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pengembangan kelembagaan merupakan dimensi utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
8. Perwujudan komitmen dalam pencapaian rencana pelaksanaan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok perempuan, anak-anak dan kaum rentan;

- 
9. Perwujudan sumber daya manusia terdidik untuk dapat memahami dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
  10. Pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam strategi dan program pembangunan nasional.

#### **1.4. VISI DAN MISI KABUPATEN TANGERANG**

Kabupaten Tangerang, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten dengan pusat pemerintahan terletak di kecamatan Tigaraksa. Adapun visi dan misi Kabupaten Tangerang adalah :

**Visi** : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Beriman, Maju dan Mandiri, Berorientasi Industri dan Berwawasan Lingkungan.

**Misi** :

1. Memfasilitasi peningkatan SDM yang beriman, cerdas, produktif, partisipatif dan kompetitif;
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
3. Mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan Good Governance;
5. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

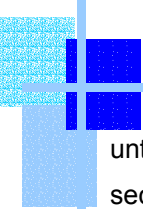
#### **1.5. GAMBARAN UMUM**

##### **1.5.1 Posisi Geografis**

Kabupaten Tangerang terletak di bagian timur Propinsi Banten pada koordinat 106°20' – 106°43' Bujur Timur dan 6°00'– 6°20' Lintang Selatan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang mejadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Batas-batas administratif Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut seperti terlihat pada Lampiran 1 :

- Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa (dengan garis pantai ± 50 km<sup>2</sup>),
- Sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kota Tangerang,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.

Jarak antara kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km. Kedudukan geografis yang berbatasan dengan Propinsi DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang



untuk berkembang menjadi daerah penyangga ibukota Jakarta. Selain itu juga secara geografis menjadi pintu gerbang untuk hubungan Propinsi Banten dengan Propinsi DKI Jakarta.

Luas wilayah kabupaten Tangerang sebesar 111.038 Ha atau 1.110,38 km<sup>2</sup>. Kabupaten Tangerang terbagi ke dalam 37 kecamatan, 77 kelurahan dan 246 desa dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa. Sebagian besar wilayah Tangerang merupakan dataran rendah. Sungai Cisadane, merupakan sungai terpanjang di Tangerang, mengalir dari selatan dan bermuara di Laut Jawa.

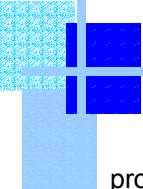
Tangerang merupakan wilayah perkembangan Jakarta. Secara umum, Kabupaten Tangerang dapat dikelompokkan menjadi tiga wilayah pertumbuhan, yakni:

- Pusat Pertumbuhan Wilayah Serpong, berada di bagian timur (berbatasan dengan Jakarta), difokuskan sebagai wilayah permukiman dan komersial.
- Pusat Pertumbuhan Balaraja dan Tigaraksa, berada di bagian barat, difokuskan sebagai daerah sentra industri, permukiman, dan pusat pemerintahan.
- Pusat Pertumbuhan Teluk Naga, berada di wilayah pesisir, mengedepankan industri pariwisata alam dan bahari, industri maritim, perikanan, pertambakan, dan pelabuhan.

### **1.5.2 Kependudukan**

Sebagian besar penduduk Tangerang bekerja di Jakarta. Beberapa perumahan memiliki fasilitas yang lengkap, sehingga menjadi "kota mandiri"; diantara yang ternama adalah: Bumi Serpong Damai, Lippo Karawaci, dan CitraRaya. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada akhir tahun 2000 sebanyak 2.782.896 jiwa sedangkan pada tahun 2005 jumlah penduduk menjadi 3.317.331 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 3,62 %. Kepadatan 2.994/km<sup>2</sup>. Peningkatan kepadatan penduduk karena di Kabupaten Tangerang terdapat banyak industri dan sebagai daerah penyangga ibu kota. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Lampiran 2

Kabupaten Tangerang terbagi ke dalam 37 kecamatan dan 246 desa, mempunyai jumlah penduduk dengan perkembangan yang cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun.



---

Struktur umur penduduk di suatu daerah akan dapat menentukan tingkat produktifitas penduduk pada daerah tersebut. Hal ini dikarenakan analisis struktur umur penduduk akan berkaitan dengan banyaknya penduduk di usia produktif di suatu daerah.

Penduduk usia produktif artinya penduduk yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaannya dan tidak tergantung kepada orang lain. Penduduk usia produktif berkisar antara usia 15 - 64 tahun. Analisis struktur usia penduduk juga akan terkait dengan penyediaan angkatan kerja pada suatu daerah.

Proyeksi penduduk mengikuti kecenderungan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun dari suatu daerah. Jika dilihat dari ketimpangan jumlah dan kepadatan penduduk yang ada akan tidak baik apabila kecenderungan ini terus berlangsung tanpa adanya usaha pencegahan urbanisasi ke daerah-daerah pusat aktivitas, seperti Kabupaten dan Kota Tangerang.

Jika dibandingkan dengan persentase persebaran jumlah penduduk tahun 1996 – 2005 dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2002 – 2017 terlihat ada kecenderungan bahwa Kabupaten tangerang memiliki persentase yang cenderung meningkat. (Lampiran 2)

### **1.5.3 Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk mencerminkan jumlah penduduk per luas tertentu (dalam satuan  $KM^2$ ). Kepadatan penduduk per satuan luas tertentu dapat mencerminkan pula interaksi antar individunya. Kepadatan penduduk berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang pada tahun 2005 sebesar 2.998 jiwa/Ha.

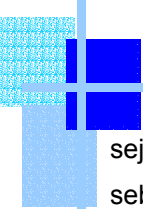
Kecamatan Ciputat merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 9,200 jiwa/Ha, yang mempunyai luas wilayah sebesar 34,96 Ha. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kronjo (1,256 Jiwa/Ha). Untuk lebih jelasnya mengenai kepadatan penduduk di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Lampiran 2

### **1.5.4 Sosial Budaya**

#### **A. Kehidupan Sosial Masyarakat**

Pada tahun 2004, dari 723.057 KK yang berada di Kabupaten Tangerang, mereka yang dikategorikan sebagai penduduk pra sejahtera sebanyak 105.535 KK,





sejahtera I sebanyak 163.691 KK, sejahtera II sebanyak 249.971 KK, sejahtera III sebanyak 138.977 KK dan sejahtera III plus sebanyak 64.883 KK.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat saat ini menunjukkan kondisi yang semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah murid dari tahun sebelumnya, mulai dari SD, SLTP, SMU dan SMK. Dari adanya peningkatan tersebut mencerminkan bahwa pendidikan di Kabupaten Tangerang masih terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan banyaknya penduduk usia sekolah.

## **B. Kultur Budaya**

Penduduk Kabupaten Tangerang merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang yang tinggal secara turun temurun di wilayah ini. Para pendatang yang dimaksud pada umumnya berasal dari berbagai daerah melalui proses urbanisasi. Hal tersebut dikarenakan daya tarik Kabupaten Tangerang yang cukup tinggi terutama dalam sektor tenaga kerja, melihat banyaknya jumlah industri yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang.

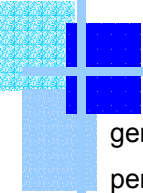
Masyarakat Kabupaten Tangerang memiliki kultur budaya campuran Betawi dan Priangan. Masyarakat Kabupaten Tangerang berbahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah. Ada juga bahasa Jawa yang merupakan bahasa pendatang dari luar Kabupaten Tangerang yang umumnya para pekerja di kawasan industri Kabupaten Tangerang.

### **1.5.5 Kawasan Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang tidak cocok untuk pengembangan wilayah, sehingga untuk pengembangan kegiatan fisik binaan sebaiknya dikembangkan di daerah yang tidak rawan bencana. Untuk mengetahui dalam penentuan zona kerentanan gerakan tanah yang ditentukan berdasarkan pada kejadian gerakan tanah setempat maupun tingkat kerentanan untuk terkena gerakan tanah adalah dengan parameter penentunya yaitu : geologi, bentuk (kelerengan), curah hujan, vegetasi penutup serta intensitas kegempaan.

#### **A. Kerentanan Tanah**

Berdasarkan pada laporan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang dalam dokumen analisisnya menyatakan bahwa kerentanan terhadap



---

gerakan tanah di Kabupaten Tangerang relatif tidak memiliki kendala pengembangan wilayah yang cukup serius.

## **B. Rawan Banjir**

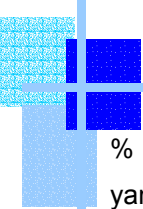
Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang berada pada dataran rendah sehingga Kabupaten Tangerang tidak bisa terhindar dari masalah banjir apalagi pada saat curah hujan atau hari hujan sedang tinggi maka ada beberapa lokasi langganan banjir di beberapa wilayah atau kecamatan di Kabupaten Tangerang.

### **1.5.6 Tata Guna Lahan**

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, daunau/situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan, perkampungan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, perkebunan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan dan lain-lain. Penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya terbagi menjadi 2 yaitu penggunaan untuk kegiatan terbangun dan penggunaan untuk kegiatan tidak terbangun. Penggunaan lahan terbangun di Kabupaten Tangerang meliputi penggunaan untuk perumahan, perkampungan, zona industri, kawasan industri, perusahaan dan perdagangan serta jasa. Luas lahan terbangun di Kabupaten Tangerang sebesar 26.299,19 Ha (23,68 %), lahan non terbangun sebesar 80.589,29 Ha (72,58 %), umumnya berupa lahan pertanian dan tanah kosong (padang golf), sisanya sebesar 4.149,52 Ha (3,73 %) untuk lain-lain seperti jalan, sungai, lapangan olah raga, kuburan dan ruang terbuka hijau (RTH).

### **1.5.7 Perekonomian**

Pendanaan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan berdasar pada penerimaan daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang dimana bersumber dari 5 sumber, yaitu sisa perhitungan tahun lalu, pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, BUMN dan lainnya), dana perimbangan (bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan dana alokasi umum), penerimaan lain-lain serta urusan kas. Sebagian besar sumber penerimaan dalam APBD Kabupaten Tangerang sekitar 60



---

% lebih berasal dari bagian dana perimbangan. Sedangkan sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah hanya memberikan kontribusi kurang dari 20 % setiap tahunnya. Sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebagian besar berasal dari pajak daerah dan retribusi. Sedangkan sumber penerimaan yang berasal dari bagian dana perimbangan lebih banyak berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil bukan pajak.

Potensi ekonomi daerah Kabupaten Tangerang terdiri dari :

#### **A. Sektor Industri**

Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus berupaya meningkatkan hasil dibidang industri di Kabupaten Tangerang. Keberhasilan sektor perindustrian telah memberikan kontribusi cukup besar dalam perekonomian daerah. Untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tangerang, pada tahun 2004 sektor industri menyumbangkan 53.02 %, setelah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Pada tahun 2003 terdapat sebanyak 726 unit usaha industri (208.807 tenaga kerja). Jumlah tersebut relatif menurun dibandingkan pada tahun 2002 yang berjumlah 726 unit usaha industri (220.774 tenaga kerja).

#### **B. Sektor Perdagangan**

Kegairahan dunia usaha sektor perdagangan tahun 2004 di Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari jumlah Tanda Daftar perusahaan (TOP) yang diterbitkan. Tercatat jumlah TOP yang diterbitkan tahun 2004 sebanyak 1.753 buah atau mengalami peningkatan sebesar 2,82 % dibanding tahun 2003 (1.705 buah). Jumlah TDP yang diterbitkan usaha bentuk PT. mengalami peningkatan 105 perusahaan dibanding tahun sebelumnya dan penurunan terbesar terjadi pada usaha berbentuk CV. Yaitu dari 740 buah tahun 2003 menjadi 649 tahun 2004 atau mengalami penurunan sebesar 12,30 %. Sementara itu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) juga sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2003 yaitu dari 1.207 buah di tahun 2003 menjadi 1.146 buah tahun 2004. Dilihat menurut kualifikasi usaha penurunan jumlah SIUP terjadi pada usaha kecil.

Secara khusus perkembangan SIUP sektor jasa memperlihatkan lonjakan cukup besar selama periode 2002 - 2004 yaitu sebanyak 423 SIUP tahun 2002 naik menjadi 608 SIUP dan kembali naik menjadi 750 SIUP tahun 2004.



### **C. Sektor Pertanian**

Sub sektor tanaman bahan makanan mencakup komoditi : padi, palawija (jagung dan kacang tanah) dan sayuran (terung, kacang panjang dan mentimun). Menurut data dari Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang tahun 2004 jenis komoditi yang dihasilkan Kabupaten Tangerang dengan produktivitas tinggi adalah sayuran (komoditi mentimun, terung dan kacang panjang). Komoditi mentimun tingkat produktivitasnya mencapai 180,31 kwintal/ha dengan luas tanam 721 ha dan jumlah produksi yang dihasilkan mencapai 13.000 ton, komoditi terung tingkat produktivitasnya mencapai 175,04 kwintal/ha dengan luas tanam 222 ha dan jumlah produksi yang dihasilkan 3.886 ton, sedangkan komoditi kacang panjang produktivitasnya sebesar 160,76 kwintal/ha dengan luas tanam 615 ha dan jumlah produksi yang dihasilkan mencapai 9.887 ton.

Untuk komoditi padi tingkat produktivitasnya mencapai 112,32 kwintal/ha dengan luas tanam 72.009 ha dan jumlah produksi yang dihasilkan 480.694 ton, sedangkan untuk komoditi palawija yaitu jagung dan kacang tanah adalah masing-masing: tingkat produktivitas jagung sebesar 28,25 kwintal/ha dengan luas tanam 589 ha dan produksinya mencapai 1.664 ton, sedangkan untuk produktivitas kacang tanah sebesar 16,84 kwintal/ha dengan luas tanam 767 ha dan produksinya mencapai 1.292 ton.

### **D. Sektor Peternakan**

Populasi ternak besar yang cukup dominan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2004 adalah Domba (67.525 ekor), Kambing (66.436 ekor), Kerbau (28.786 ekor), Babi (7.698 ekor), Sapi potong (6.250 ekor) dan Kuda (54 ekor). Sedangkan untuk unggas terdiri dari Ayam Petelur (3.380.558 ekor), Ayam Pedaging (3.043.487 ekor), Ayam Buras (1.808.645 ekor) dan Itik (146.106 ekor).

Sedangkan produksi ternak yang cukup dominan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2004 adalah Ayam Ras Pedaging (14.663,52 ton), Ayam Buras 1.909,93 ton, Ayam Ras Petelur 1.085,84 ton, Kerbau 406 ton, Domba 361 ton, Kambing 331 ton, Babi 167,07 ton dan Sapi Potong 138,27 ton. Sedangkan untuk produksi telur yaitu Ayam Ras Petelur 26.867,72 ton, Ayam Buras 2.169,30 ton dan Itik 926,01 ton.

## **E. Perikanan**

Kegiatan sektor perikanan di Kabupaten Tangerang meliputi kegiatan perikanan laut, perikanan perairan umum (rawa, situ, ex galian pasir, sungai), tambak, kolam dan mina padi. Pada tahun 2002 produksi perikanan laut mencapai 17.726,20 ton, produksi perikanan perairan umum mencapai 123 ton, produksi budi daya air payau mencapai 6.401,30 ton, produksi budi daya ikan mencapai 2.192,90.

## **F. Pariwisata**

Kegiatan pariwisata di Kabupaten Tangerang terdapat di 7 (tujuh) kecamatan. Di Kecamatan Kresek terdapat 3 situ yaitu Garukgak, Lotrasana, Cilongek, Kecamatan Pamulang terdapat 2 situ yaitu Situ Pamulang dan Situ Ciledug, Kecamatan Kronjo terdapat obyek wisata Pulau cangkir (makam pangeran Jaga Laut), Kecamatan Mauk terdapat obyek wisata Tanjung Kait (kelenteng Tua dan penyeberangan ke Pulau laki / Kepulauan Seribu), Kecamatan Teluk Naga terdapat obyek wisata Pantai tanjung Pasir dan Pantai Muara, Kecamatan Kosambi terdapat wisata pantai Dadap, serta Kecamatan Cisoka terdapat makam kramat dan komunitas monyet.

### **1.5.8 Sarana dan Prasarana Lingkungan**

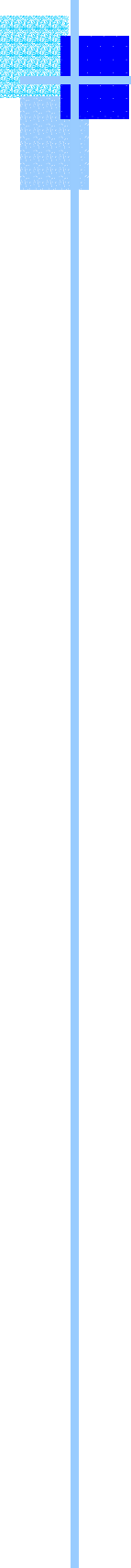
Kabupaten Tangerang telah dilengkapi infrastruktur pendukung seluruh kegiatan di dalamnya. Infrastruktur tersebut adalah jaringan jalan, jaringan listrik, telepon, sistem penyediaan air bersih, sistem pengolahan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan Lampiran 1

### **1.5.9 Kebijakan pendanaan lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya di daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan**

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan yang melandasi dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan penyusunan status lingkungan hidup daerah adalah sebagai berikut :

- A. Undang - Undang
  1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
  2. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dengan Ekosistemnya

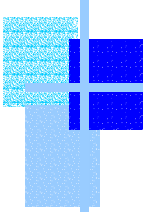
- 
3. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
  4. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  5. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  6. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  7. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
  8. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  9. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  10. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  11. Undang-undang No. 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang

B. Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden

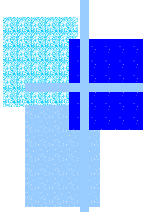
1. Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
2. Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

C. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air
2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
5. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
6. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
8. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam



9. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup
  10. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan kota
  11. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- D. Keputusan dan Peraturan Menteri
1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 718/MENKES/PER/XI/1987 tentang Kebisingan
  2. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-02/MENKLH/I/1988 Tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
  3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Kualitas Air dan Debu
  4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal
  5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-8/MENLH/2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-11/MENLH/2006 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL
- E. Keputusan Kepala Bapedal
1. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting;
  2. Keputusan Kepala Bapedal No. KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun
  3. Keputusan Kepala Bapedal No. KEP-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Berbahaya dan Beracun
  4. Keputusan Kepala Bapedal No. KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  5. Keputusan Kepala Bapedal No. KEP-04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Bahan Berbahaya dan Beracun



6. Keputusan Kepala Bapedal No. KEP-299/BAPEDAL/09/1996 tentang Kajian Aspek Sosial
  7. Keputusan Kepala Bapedal No. KEP-124/BAPEDAL/09/1997 tentang Kesehatan Masyarakat
- F. Keputusan Bupati Tangerang
1. Keputusan Bupati Tangerang No. 545/SK/3a-Perek/1993 tentang Peruntukan Baku Mutu Air
  2. Keputusan Bupati Tangerang No. 514/Kep. 20-Huk/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Persediaan Kasus Pencemaran dan atau Pembakaran Lingkungan
  3. Keputusan Bupati Tangerang No. 070/Kep.34-Huk/2007 tentang Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kab. Tangerang
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tangerang
  5. Peraturan Daerah kabupaten Tangerang No. 6 Tahun 2002 tentang Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Permukaan
  6. Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2006 tentang Pengawasan Pengendalian kegiatan/usaha Pertambangan Bahan Galian C

Adapun kebijakan yang terkait dengan pembangunan daerah berkelanjutan adalah :

- A. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup
- B. Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
- C. Kebijakan Penanganan Limbah
- D. Kebijakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
- E. Kebijakan Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam
- F. Kebijakan Energi Nasional
- G. Kebijakan Penanggulangan Bencana
- H. Kebijakan Tata Ruang
- I. Kebijakan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
- J. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas





---

## **Pendanaan**

Pendanaan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan berdasar pada penerimaan daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang dimana bersumber dari 5 sumber, yaitu sisa perhitungan tahun lalu, pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, BUMND dan lainnya), dana perimbangan (bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan dana alokasi umum), penerimaan lain-lain serta urusan kas. Sebagian besar sumber penerimaan dalam APBD Kabupaten Tangerang sekitar 60 % lebih berasal dari bagian dana perimbangan. Sedangkan sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah hanya memberikan kontribusi kurang dari 20 % setiap tahunnya. Sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebagian besar berasal dari pajak daerah dan retribusi. Sedangkan sumber penerimaan yang berasal dari bagian dana perimbangan lebih banyak berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil bukan pajak.

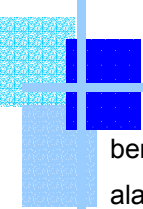
Anggaran pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang meningkat dari tahun ketahun. Anggaran lingkungan dari APBD pada tahun 2005 sebesar Rp. 9.078.272.000,-, tahun 2006 sebesar Rp. 11.147.709.290,- dan tahun 2007 sebesar Rp. 14.147.709.290,-. Anggaran tersebut dikelola oleh Bapedalda atau Instansi Pengelola Lingkungan dalam bentuk DAU dan atau DAK.

**2.1. GAMBARAN UMUM**

Dasar dari kebijakan pembangunan nasional yang telah diterapkan selama ini adalah pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pola pembangunan tersebut mengandung makna mengusahakan hasil yang sebaik-baiknya dari sumber alam yang tersedia seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, dengan cara memelihara keberlanjutan kualitas dan potensi sumberdaya alam itu sepanjang masa. Oleh sebab itu ancaman degradasi lingkungan harus diwaspadai, tidak hanya oleh Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi setiap kita –sebagai *stake holder*- juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Pembangunan segala aspek di era globalisasi dan otonomi daerah berkembang sangat pesat dan cepat, namun hal itu tidak saja memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan penduduk, tapi juga dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari aspek pelestarian lingkungan hidup. Keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan hidup perlu diakomodasikan ke dalam suatu kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan baik dalam skala lokal, nasional, regional maupun global. Dalam hal ini daerah pun tidak dapat terlepas orientasi kebijakan tersebut., karena pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan secara nasional tidak dapat berlangsung secara baik , bila tidak ada kebijakan yang jelas dan terarah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Secara umum kebijakan pembangunan yang dilaksanakan terutama di daerah belum sepenuhnya mengakomodasi aspek pelestarian lingkungan. Pendekatan yang dilakukan masih bersifat sektoral, sehingga tidak ada korelasi dan keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan pembangunan yang lain sehingga menimbulkan dampak terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Dampak dari kegiatan pembangunan tersebut dapat meluas menjadi isu lingkungan yang



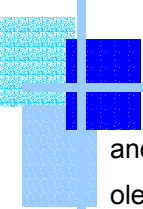
---

bersifat kompleks dan global. Setiap kebijakan dalam pemanfaatan sumberdaya alam tidak semata hanya dilihat dari pertimbangan nilai ekonomi yang bisa dihasilkan, tetapi juga harus mengedepankan pertimbangan nilai sosial budaya yang ditopang oleh kondisi lingkungan yang sehat, ketiga aspek tersebut merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Berkembangnya budaya modern cenderung menyebabkan timbulnya berbagai kesalahan cara pandang dalam hubungan antara manusia dengan alamnya. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang membahayakan keberlanjutannya serta rendahnya kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu kearifan lokal sebagai sumber inspirasi bagi pengelolaan dan pelestarian alam dan lingkungan hidup semakin terpinggirkan, disamping masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan tersebut. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan di masa lalu cenderung lebih mengutamakan upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan kaidah, norma dan etika pengelolaan sumberdaya alam berkeadilan dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan eksploitasi sumberdaya alam itu dilakukan tidak efisien dan efektif serta berorientasi kepada kepentingan jangka pendek, sehingga terjadinya pengurasan sumberdaya alam melebihi daya dukungnya.

Lemahnya kontrol masyarakat dan penegakan supremasi hukum di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan masalah krusial yang menyebabkan hak-hak masyarakat untuk menikmatinya menjadi sangat terbatas dan justru menimbulkan konflik, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam belum memiliki perspektif lingkungan hidup. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan di suatu daerah dari waktu ke waktu cenderung makin bertambah dan beragam. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa penanganan masalah lingkungan hidup masih belum dilihat sepenuh hati oleh pengambil keputusan dalam bentuk program pembangunan. Hal ini semakin terlihat dari alokasi anggaran yang dialokasikan untuk pemulihan lingkungan masih jauh lebih sedikit dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sektor lain.

Kabupaten Tangerang secara keseluruhan memiliki luas 111.038 Ha. Setiap tahunnya Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan kegiatan industri, pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi dan jumlah penduduk. Sementara



---

ancaman terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan sangat ditentukan oleh laju pertumbuhan penduduk, mobilitas penduduk yang tinggi, dan struktur usia penduduk Kabupaten Tangerang yang kebanyakan berusia muda sehingga terkonsentrasi pada usia kerja, hal ini akan menuntut ketersediaan lapangan kerja, tersedianya lahan, serta sarana dan prasarana yang memadai.

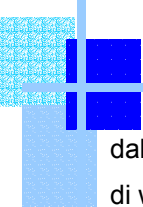
Seiring dengan perkembangan Kabupaten Tangerang sesuai dengan dinamika masyarakatnya tersebut otomatis telah memunculkan permasalahan lingkungan di daerah ini. Tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin besar dan dikhawatirkan akan melewati daya dukungnya. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, maka pengelolaan lingkungan menjadi salah satu kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Informasi tentang lingkungan hidup di daerah perlu disusun sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sarana pendidikan dan pengawasan bagi publik serta sarana keterlibatan publik untuk ikut serta berperan menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang diperhatikan daya dukungnya.

Hal ini dilakukan tidak hanya oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, akan tetapi setiap warga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan sumber daya alam dan lingkungan. Adanya peningkatan sumberdaya manusia, pemahaman terhadap keterkaitan antara ekosistem lingkungan dan manusia serta sebab akibatnya merupakan hal yang penting dalam memelihara keutuhan fungsi sumberdaya alam dan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan di Kabupaten Tangerang terdapat berbagai masalah seperti :

- a. Terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman
- b. Pembangunan yang melanggar sempadan bangunan yang ditetapkan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan lahan yang ditetapkan.
- c. Pemanfaatan lahan di kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Tangerang yang dapat mengganggu fungsi ekologis DAS tersebut sehingga berdampak terhadap kawasan pemukiman di hilirnya.
- d. Batasan kepemilikan lahan yang masih banyak kurang jelas.

Penduduk Kabupaten Tangerang merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang yang tinggal secara turun temurun di wilayah ini. Para pendatang berasal dari berbagai daerah melalui proses urbanisasi. Hal tersebut karena daya tarik Kabupaten Tangerang yang cukup tinggi terutama



---

dalam sektor tenaga kerja dengan melihat banyaknya jumlah industri yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang.


Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat terutama akibat adanya urbanisasi penduduk dari desa ke kota, akan menimbulkan berbagai masalah seperti perubahan pemanfaatan lahan, penambahan kebutuhan akan sumberdaya pangan, meningkatnya pencemaran dan ketidak seimbangan fungsi kota. Perlu diberdayakan keberadaannya dengan cara meningkatkan roda perekonomian, kesehatan dan pendidikan warganya. Oleh karena itu harus dicari terobosan yang dapat menghasilkan sinergi yang baik antara masyarakat kota sehingga keseimbangan kota dapat dipertahankan.

Pengelolaan lingkungan merupakan rangkaian dari upaya untuk mencegah kerusakan yang bersifat permanen maupun tidak permanen dan menjaga keberlangsungan kehidupan. Bagian yang harus dijaga tersebut meliputi keseluruhan aspek kehidupan seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, energi dan semua material yang kita perlukan dan kesemuanya akan menghasilkan limbah. Lingkungan harus dijaga agar tetap survive dimana harus ada perencanaan yang baik untuk mencegah kerusakan dan menjaga lingkungan alami dari aktivitas manusia. Prinsip dasar dalam pengelolaan kualitas lingkungan adalah menjaga keseimbangan bahan dan melestarikan aliran/siklus. Dalam pengelolaan lingkungan, harus ada keseimbangan ekonomi dan ekologi dimana upaya pembangunan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dilakukan tanpa merusak lingkungan.

Permasalahan di Kabupaten Tangerang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan kemasyarakatan yaitu :

1. Masih terdapatnya keluarga miskin di Kabupaten Tangerang baik di perdesaan maupun diperkotaan;
2. Masih terdapatnya pengangguran;
3. Masih rendahnya derajat kesehatan dan derajat pendidikan masyarakat;
4. Masih belum optimalnya kinerja pelayanan umum Pemerintah Daerah;
5. Masih terdapatnya kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Beberapa isu lingkungan hidup utama berkaitan dengan degradasi sumberdaya alam khususnya air dan lahan yang ditandai dengan deplesi sumber air (permukaan dan air bawah tanah, baik kuantitas maupun kualitas), semakin meluasnya tanah kritis dan DAS kritis, penurunan produktivitas lahan, semakin meluasnya kerusakan hutan (terutama karena perambahan) baik hutan pegunungan maupun hutan pantai (mangrove). Selain itu permasalahan pencemaran, baik pencemaran air, udara maupun tanah yang penyebarannya sudah cukup meluas



---

dan terkait dengan industri, rumah tangga dengan segala jenis limbahnya terutama sampah.

Sedangkan untuk penataan ruang, terjadi inkonsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan eksisting penggunaan lahan/pemanfaatan ruang yang tidak berwawasan lingkungan. Permasalahan kawasan pesisir dan pantai, yaitu kerusakan hutan mangrove, abrasi dan karesi pantai, perubahan tataguna lahan di wilayah pesisir, intrusi air laut dan pencemaran air laut.

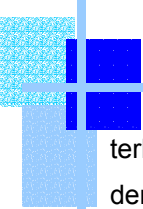
Permasalahan sosial kependudukan ditandai dengan tingginya urbanisasi, munculnya permukiman kumuh, tingginya pedagang kaki lima dan kesemrawutan lalu lintas. Tingginya jumlah industri dan kendaraan bermotor, serta berkurangnya lahan terbuka akan meningkatkan pencemaran udara.

## **2.2. AIR**

Penyebaran sumberdaya air di Kabupaten Tangerang secara alamiah tidak merata, ada daerah yang memiliki potensi sumber air cukup tinggi tetapi ada juga daerah yang minim sumber air. Potensi sumberdaya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Kebutuhan ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan air bersih yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap air bersih terutama di wilayah utara Kabupaten Tangerang, tingkat pelayanan masih jauh dibawah target pelayanan nasional (80 % penduduk terlayani air bersih), belum meratanya daerah pelayanan dimana saat ini belum semua kecamatan di wilayah kabupaten Tangerang dapat memperoleh pelayanan air bersih melalui sistem perpipaan serta sumber air baku yang ada secara kualitas dan kuantitas sudah berkurang.

Mengantisipasi kebutuhan air yang terus meningkat, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh sumberdaya air yang ada, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi di bidang pemurnian air (daur ulang, desalinasi air laut). Perkembangan kegiatan industri meningkatkan tekanan



terhadap sumberdaya air dalam hal penurunan kualitas air (terjadi pencemaran air), demikian juga buangan limbah domestik (rumah tangga) ikut memberi andil terhadap penurunan kualitas air.

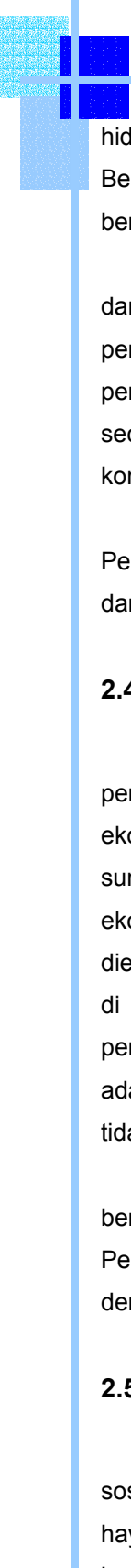
Pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Tangerang belum optimal. Air hujan dan air buangan cenderung dialirkan ke saluran irigasi. Sedangkan sampah terlihat menumpuk di beberapa saluran irigasi tersebut. Dengan tidak memadainya saluran drainase yang ada serta bentuk topografi yang relatif datar mengakibatkan air hujan tidak cepat mengalir. Akibatnya akan terjadi potensi genangan. Badan air penerima seperti sungai masih sesuai dengan aslinya dan tebing sungai belum mengalami perkerasan. Sungai mempunyai daya tampung cukup besar sehingga merupakan alternatif utama untuk mengatasi banjir. Namun pembangunan yang cenderung memanfaatkan ruang terbuka hijau menjadikan daerah resapan cenderung berkurang.

Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan semakin besarnya jumlah industri yang ada dan juga penambahan penduduk yang cukup tinggi, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kualitas air. Kabupaten Tangerang dilewati oleh beberapa sungai besar seperti Sungai Cisadane, Sungai Pesangrahan dan sungai Cimanceuri. Sungai-sungai tersebut banyak dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat sehari-hari. Beberapa permasalahan pada sumberdaya air di Kabupaten Tangerang karena masih kurangnya kesadaran pada sebagian masyarakat dalam melengkapi sarana sanitasi terutama masyarakat di bagian utara Kabupaten Tangerang. Banyak industri besar (termasuk industri penghasil B3) di Kabupaten Tangerang yang membuang limbahnya ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu, mengakibatkan pencemaran sungai. Masih dirasa mahalnya biaya pembuatan instalasi pengolahan limbah bagi industri kecil mengakibatkan industri kecil membuang langsung limbahnya tanpa melalui pengolahan.

Indikator terjadinya pencemaran air mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

### **2.3. UDARA DAN ATMOSFER**

Pencemaran udara dapat terjadi yang disebabkan oleh adanya kontaminan (pencemar) di udara yang mengakibatkan kandungan senyawaan gas menjadi berubah. Perubahan ini dapat memberikan dampak negatif bagi kelangsungan



hidup makhluk hidup karena menimbulkan reaksi kimia secara spontan di udara. Berdasarkan bentuk fisiknya, pencemar udara dibedakan menjadi dua yaitu yang berbentuk partikulat dan berbentuk gas.

Pencemaran udara di Kabupaten Tangerang terutama di daerah perkotaan dari waktu ke waktu diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor seperti sektor industri, perhubungan/transportasi dan pariwisata. Hal ini perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu penanganan atau pengendalian secara baik dan komprehensif antara instansi terkait.

Indikator terjadinya pencemaran udara mengacu pada 2 peraturan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan SK Menaker No. 51/Menaker/1999 tentang nilai ambang batas (NAB).

## **2.4. LAHAN DAN HUTAN**

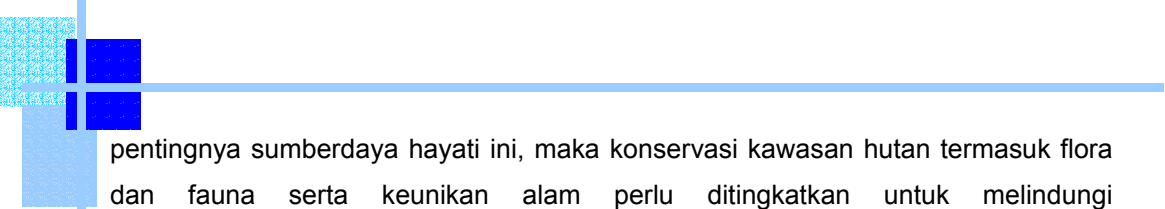
Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang berdampak pada peningkatan kebutuhan ekonomi. Masyarakat pedesaan yang terbatas sumberdaya ekonominya mencari alternatif sumberdaya ekonomi dengan mengeksploitasi sumberdaya alam yang terdekat dan termudah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut. Komponen lingkungan atau sumberdaya alam yang paling mudah dieksploitasi oleh masyarakat desa ialah lahan pekarangan miliknya atau yang ada di sekitar mereka. Yang sering dijumpai ialah kegiatan penambangan liar berupa penggalian pasir baik di bukit maupun di sungai. Selain penambangan pasir juga ada penambangan emas dan batubara serta penebangan hutan secara liar yang tidak mengindahkan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Indikator terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan lahan dan hutan mengacu pada PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

## **2.5. KEANEKARAGAMAN HAYATI**

Keanekaragaman hayati merupakan sumberdaya penting bagi kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Bagi kabupaten, keanekaragaman hayati dapat menjadi sumberdaya yang mempunyai arti ekonomi penting. Banyak jenis tumbuhan yang terdapat di hutan seperti rotan, bambu, tumbuhan-tumbuhan obat, dan lain-lain yang dapat dijadikan pemasukan bagi provinsi. Mengingat





pentingnya sumberdaya hayati ini, maka konservasi kawasan hutan termasuk flora dan fauna serta keunikan alam perlu ditingkatkan untuk melindungi keanekaragaman plasma nutfah, jenis spesies, dan ekosistem. Degradasi luas hutan memacu hilangnya atau punahnya sumberdaya hayati tersebut.

Konservasi keanekaragaman hayati yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk beberapa bentuk kawasan konservasi diantaranya taman nasional, suaka alam, suaka alam laut, suaka margasatwa, cagar alam, dan hutan lindung.

Indikator terjadinya kerusakan keanekaragaman hayati yang menyebabkan penurunan keanekaragamannya mengacu pada Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Keanekaragaman Hayati.

## **2.6. PESISIR DAN LAUT**

Jika dilihat dari asal kejadiannya, jenis kerusakan lingkungan di pesisir, pantai dan laut bisa berasal dari luar sistem wilayah pesisir, pantai dan laut maupun yang berlangsung di dalam wilayah pesisir, pantai dan laut itu sendiri. Pencemaran yang terjadi di wilayah daratan akan terbawa oleh aliran sungai masuk ke muara dan akhirnya tersebar ke seluruh pantai dan pesisir di sekitarnya. Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang terdapat di dalam wilayah pesisir; dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu. Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di perairan pesisir sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat penebangan hutan dan praktek pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir. Kegiatan pengolahan pertanian dan kehutanan (*up land*) yang buruk tidak saja merusak ekosistem sungai (melalui banjir dan erosi), tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif pada perairan pesisir dan pantai. Sementara itu, kerusakan lingkungan yang berasal dari wilayah pesisir, pantai dan laut bisa berupa degradasi fisik habitat pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun); abrasi pantai; hilangnya daerah konservasi/kawasan lindung; eksploitasi sumberdaya alam yang berlebih (*over exploitation*); dan bencana alam.

Indikator terjadinya pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut mengacu pada PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut.



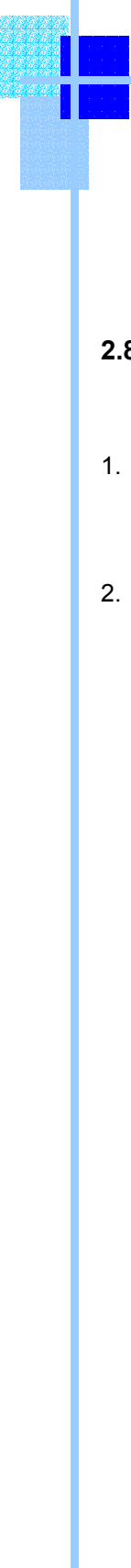
## 2.7. METODOLOGI PENGUMPULAN DATA SLHD

Pengumpulan Data SLHD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengadaan Data : dengan cara mengumpulkan data primer dan atau mengumpulkan data sekunder di lapangan ataupun mengumpulkan dari berbagai stakeholder.
2. Pemilahan data : data yang diperoleh dipilah sesuai dengan media lingkungan.
3. Verifikasi data : terhadap data yang telah dipilah dan ditetapkan perlu dilakukan verifikasi kembali sebelum dimasukkan ke dalam format yang telah ditentukan.
4. Pengkodean : data yang akan dimasukkan dalam tabel diberi kode sesuai dengan format yang ditentukan.

Data-data yang akan dikumpulkan terdiri atas data Sumberdaya Alam (SDA), Sumberdaya Buatan (SDB) dan Sumberdaya Manusia (SDM). Data-data tersebut diperoleh dari dinas/instansi terkait yang dikumpulkan secara terkoordinasi, dengan klasifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi parameter basis data : sumberdaya lahan; sumberdaya hutan; sumberdaya air; pesisir dan lautan; iklim, atmosfer, udara; keanekaragaman hayati; energi dan sumberdaya mineral; bencana; pertanian; pariwisata; transportasi; perindustrian; perekonomian dan investasi; perikanan; peternakan; habitat; limbah padat dan cair; bahan B3 dan limbah B3; kependudukan; pendidikan; kemiskinan; kesehatan; ketenagakerjaan serta kelembagaan. Dinas-dinas terkait sebagai sumber data, yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang
2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang
3. BAPPEDA Kabupaten Tangerang
4. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tangerang
5. Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Tangerang
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
7. Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang
8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tangerang
9. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang
10. Dinas INDAGKOPAR Kabupaten Tangerang
11. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang
12. Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang

- 
13. Kecamatan se Kab. Tangerang
  14. PDAM Tirta Kerta Raharja
  15. BPS kabupaten Tangerang
  16. Bapedal Puspitek Serpong

## **2.8. METODOLOGI PENYUSUNAN LAPORAN SLHD**

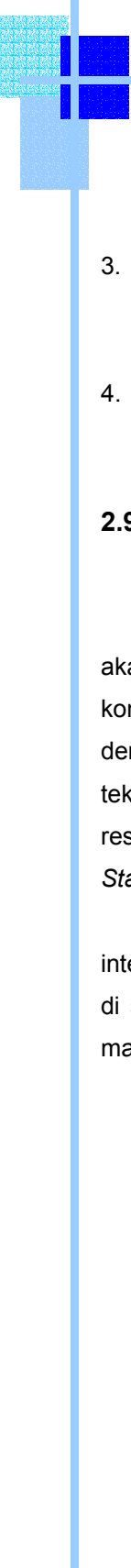
Laporan SLHD disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan Isu Lingkungan Hidup Utama dalam satu tahun berjalan berdasarkan kriteria dan identifikasi permasalahan sehingga diperoleh prioritas Isu LH untuk Pelaporan SLHD.
2. Isu terpilih dianalisis dengan menggunakan metode SPR.

Menyampaikan kondisi media lingkungan (air, udara, lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, pesisir dan laut) berdasarkan pengumpulan data SLHD dan dianalisis dengan menggunakan metode SPR (*State, Pressure and Response*). Dalam kerangka *Pressure-State-Respon (SPR)* didasarkan kepada konsep hubungan sebab akibat dimana kegiatan manusia memberikan tekanan kepada lingkungan (*pressure*) dan menyebabkan perubahan pada sumberdaya alam dan lingkungan baik secara kualitas maupun kuantitas (*state*). Selanjutnya masyarakat/*stakeholder* melakukan reaksi terhadap perubahan ini baik melakukan adaptasi maupun mitigasi melalui berbagai kebijakan, program, maupun kegiatan (*societal respons*). Hal yang terakhir merupakan umpan balik terhadap tekanan melalui kegiatan manusia.

Dalam kerangka SPR ada 3 faktor utama yang akan dianalisis yaitu

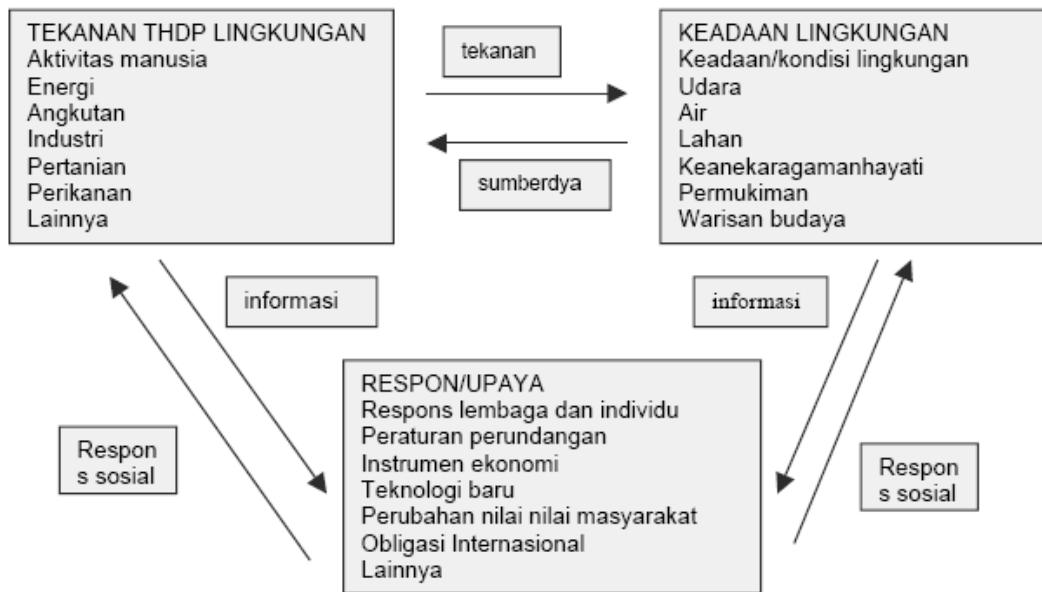
- Indikator kondisi lingkungan (*state*). Indikator ini menggambarkan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan yang dibuat untuk menggambarkan situasi, kondisi dan pengembangannya di masa depan.
- Indikator tekanan terhadap lingkungan (*pressure*). Indikator ini menggambarkan tekanan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan termasuk kualitas dan kuantitas sumberdaya alam. Dalam indikator ini akan terlihat tekanan langsung yang mempengaruhi lingkungan seperti emisi atau konsumsi sumber alam dan tekanan tidak langsung yaitu tekanan yang merefleksikan kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan melalui suatu media tertentu (darat, air, udara).

- 
- Indikator respons (*response*). Indikator ini menunjukkan tingkat kepedulian stakeholder terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik dari kalangan pemerintah, industri, LSM, lembaga penelitian maupun masyarakat umum.
3. Menyampaikan rekomendasi sesuai dengan permasalahan dan upaya penyelesaian yang sedang dilakukan dan atau yang direncanakan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kondisi lingkungan di daerahnya.
  4. Melakukan evaluasi terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam SLHD tahun sebelumnya

## **2.9. PEMAHAMAN PENDEKATAN PRESSURE-STATE-RESPONSE (PSR) DALAM PENYUSUNAN SOE**

Hampir seluruh aktivitas manusia yang memanfaatkan sumberdaya alam akan menimbulkan tekanan pada lingkungan dan merubah keadaannya, atau kondisinya. Manusia kemudian memberikan respons terhadap perubahan tersebut dengan membangun dan mengimplementasikan kebijakan. Analisis terhadap tekanan yang muncul, kondisi eksisting yang terjadi berikut dampaknya serta respons yang dilakukan kemudian dikenal sebagai pendekatan P-S-R (*Pressure State Respons*) seperti terlihat dalam diagram alir pada Gambar 2.1.

Analisis PSR dapat menggambarkan seberapa efektif respons suatu intervensi program terhadap persoalan sumberdaya alam dan lingkungan yang ada di suatu lokasi. Pengembangan berbagai metodologi ini disesuaikan oleh masing-masing negara sesuai dengan kondisi masing-masing.



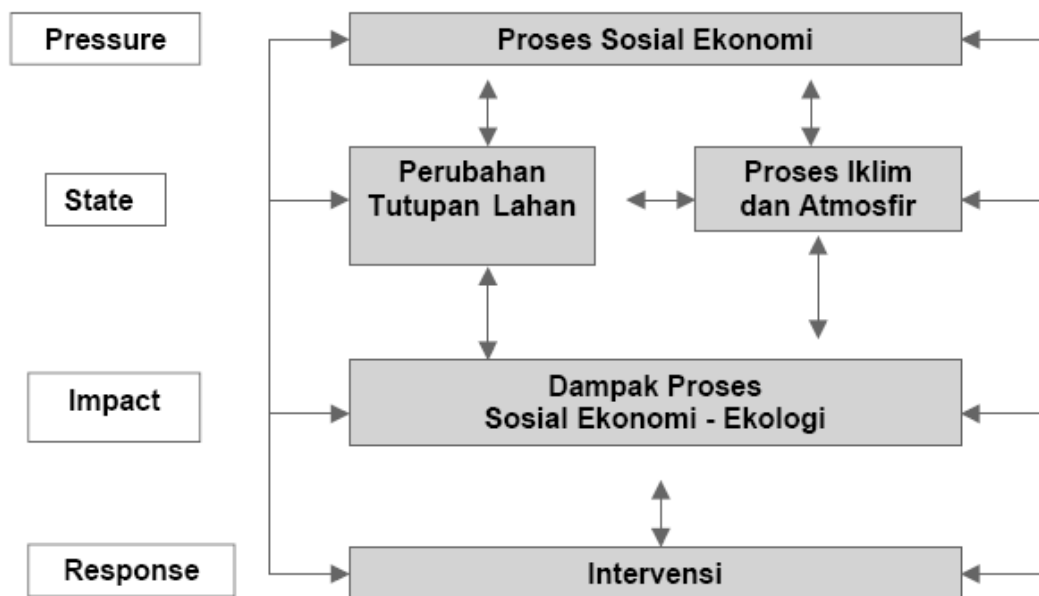
**Gambar 2. 1 Diagram Model PSR (Tekanan- Dampak- Respons)**

**Tekanan** mencakup aktivitas dan dampak seperti konsumsi energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan urbanisasi. Ia juga mencakup interaksi interaksi berikut:

- Lingkungan berlaku sebagai sumber darimana aktivitas ekonomi manusia memperoleh bahan baku untuk memenuhi kehidupannya, seperti mineral, makanan, serat, dan energi dan dalam prosesnya, berpotensi mengurangi (depleting) sumberdaya-sumberdaya tersebut atau sistem biologis (seperti tanah, hutan dan perikanan) tempat dimana mereka bergantung, sebagai menunjang sistem kehidupan mereka;
- Aktivitas manusia menciptakan aliran polutan, sampah/limbah, dan energi yang masuk kembali ke dalam lingkungan, dan mengancamnya dalam bentuk kemerosotan dan degradasi lingkungan.
- Aktivitas manusia baik secara langsung maupun tak-langsung mengubah bentuk, mengganggu dan mendegradasi ekosistem, sehingga menurunkan kemampuan lingkungan untuk menyediakan faktor faktor penunjang bagi sistem kehidupan secara memadai
- Kondisi lingkungan seperti udara yang tercemar, air yang tercemar, dan makanan yang tercemar mempunyai dampak langsung terhadap kesehatan manusia dan kesejahteraan.

Tekanan ini akan membawa kita menuju perubahan kondisi/keadaan lingkungan, yang pada gilirannya kembali mempengaruhi kesejahteraan manusia itu sendiri. SoE mencakup kualitas air dan udara, stok sumberdaya alam, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya rakyat.

**Respon** masyarakat terhadap perubahan ini pada level yang berbeda dalam bentuk aturan/legislasi baru, teknologi baru, perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat, obligasi/kewajiban internasional, dan reformasi ekonomi. Respon sosial ini mempengaruhi baik keadaan lingkungan maupun aktivitas manusia (tekanan). Kemampuan untuk merespons tergantung pada kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia mengenai keadaan dan tekanan pada lingkungan.

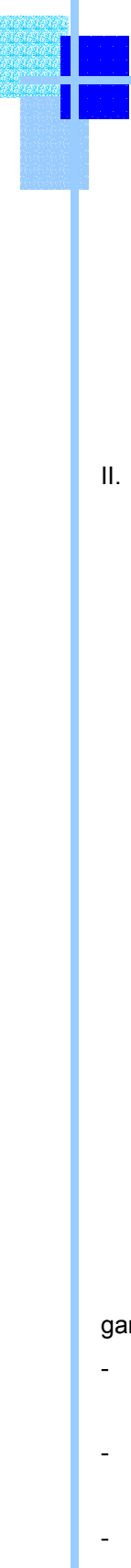


**Gambar 2.2** Dinamika Sistem *Pressure-State-Impact- Response*

## 2.10. ANALISIS PRESURE STATE RESPONSE (PSR)

Analisis PSR dipakai untuk mengetahui hubungan antar komponen lingkungan sehingga bisa diketahui kaitan pengaruh satu sama lain. Untuk mempermudah analisis, maka komponen lingkungan dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu :

- I. Kelompok kondisi alam dan makhluk hidup. Kelompok ini terdiri atas:

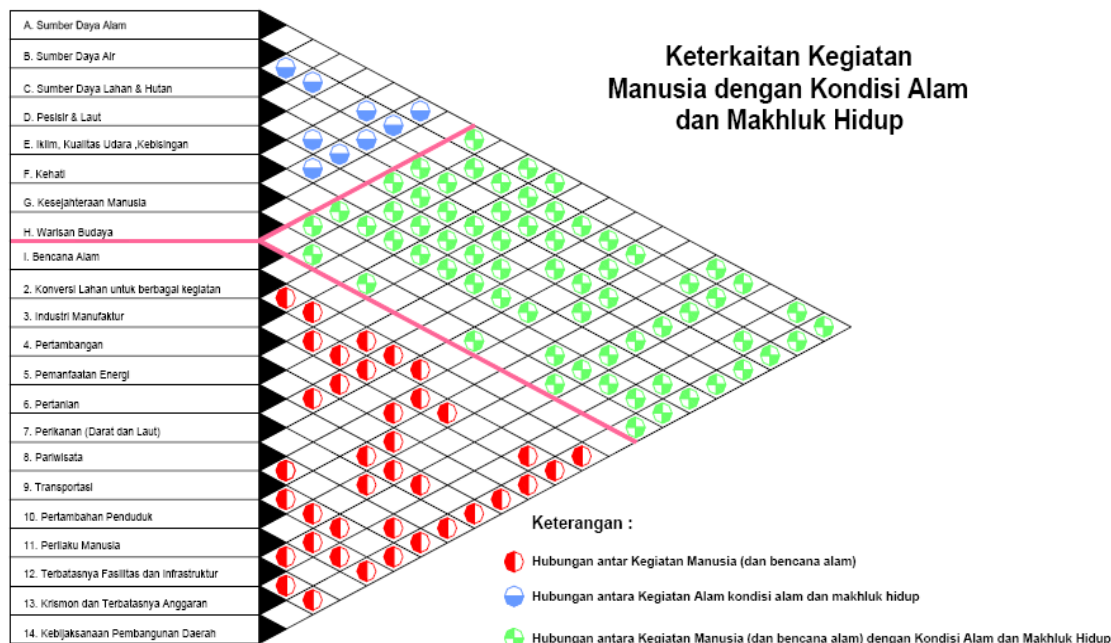
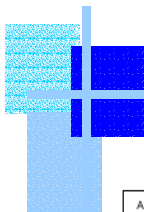
- 
- Sumberdaya alam
  - Sumberdaya air
  - Sumberdaya lahan dan hutan
  - Pesisir dan laut
  - Iklim, kualitas udara, bising
  - Keanekaragaman hayati
  - Kesejahteraan manusia
  - Warisan budaya

II. Kelompok aktivitas manusia dan bencana alam. Kelompok ini terdiri atas berbagai aktivitas alam dan manusia di muka bumi yang dianggap sebagai penyebab terjadinya perubahan terhadap alam berikut isinya. Kelompok ini terdiri atas:

- Bencana alam
- Konversi lahan untuk berbagai kegiatan
- Industri pengolahan
- Pertambangan
- Pemanfaatan energi
- Pertanian dan peternakan
- Perikanan
- Pariwisata
- Transportasi
- Kependudukan
- Perilaku manusia
- Terbatasnya fasilitas dan infrastruktur
- Krisis moneter dan terbatasnya anggaran
- Kebijakan pembangunan daerah

Hubungan kedua komponen tersebut digambarkan pada Gambar 2.3. Dari gambar tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 hubungan pengaruh, yaitu:

- Hubungan antara kelompok II (aktivitas manusia dan bencana alam) terhadap kelompok I (kondisi alam dan makhluk hidup).
- Hubungan antar komponen di dalam kelompok I sendiri, dimana kondisi alam mempengaruhi kondisi alam lainnya dan manusia.
- Hubungan antar komponen di dalam kelompok II sendiri, dimana aktivitas manusia mempengaruhi aktivitas lainnya.



**Gambar 2.3 Hubungan Fungsional Antar Komponen**

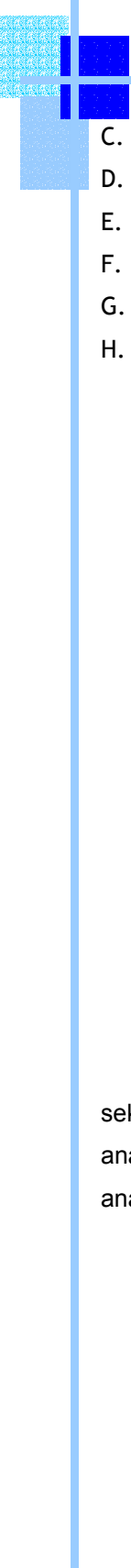
Analisis SPR terhadap komponen-komponen tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- a. **Analisis PSR Primer.** Analisis ini meninjau semua pengaruh komponen lingkungan (baik kelompok I maupun kelompok II) terhadap masing-masing kondisi alam dan manusia. Analisis ini bertujuan untuk melihat jauh mana kondisi suatu komponen lingkungan alam atau manusia telah berubah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.
- b. **Analisis PSR Sekunder.** Analisis ini meninjau semua pengaruh komponen lingkungan terhadap masing-masing sektor aktivitas alam dan manusia. Analisis ini diperlukan oleh masing-masing sektor kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi pengaruh aktivitasnya terhadap kerusakan lingkungan alam dan manusia.

Berikut ini adalah PSR untuk masing-masing komponen lingkungan, terdiri atas:

- A. PSR Primer: Sumberdaya alam
- B. PSR Primer: Sumberdaya air



- 
- C. PSR Primer: Sumberdaya lahan dan hutan
  - D. PSR Primer: Pesisir dan laut
  - E. PSR Primer: Iklim, kualitas udara, bising
  - F. PSR Primer: Keanekaragaman hayati
  - G. PSR Primer: Kesejahteraan manusia
  - H. PSR Primer: Warisan budaya
    - 1. PSR Sekunder: Bencana alam
    - 2. PSR Sekunder: Konversi lahan untuk berbagai kegiatan
    - 3. PSR Sekunder: Industri pengolahan
    - 4. PSR Sekunder: Pertambangan
    - 5. PSR Sekunder: Pemanfaatan energi
    - 6. PSR Sekunder: Pertanian dan peternakan
    - 7. PSR Sekunder: Perikanan
    - 8. PSR Sekunder: Pariwisata
    - 9. PSR Sekunder: Transportasi
    - 10. PSR Sekunder: Kependudukan
      - a. PSR Sekunder: Kesehatan dan kebersihan
      - b. PSR Sekunder: Pendidikan
      - c. SPR Sekunder: Infrastruktur jalan
      - d. PSR Sekunder: Infrastruktur irigasi
    - 11. PSR Sekunder: Perekonomian

Aspek perilaku manusia tidak dibuat analisis SPR karena bukan merupakan sektor kegiatan, sedangkan kebijaksanaan pembangunan daerah tidak dibuat analisis SPR karena bersifat makro sehingga telah tercakup secara implisit di dalam analisis SPR sektor-sektor lain.

### 3.1. HIDROLOGI DAN GEOHIDROLOGI

#### 3.1.1. Kondisi Sumberdaya Air

Potensi sumberdaya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Kebutuhan air ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah.


Mengantisipasi kebutuhan air yang terus meningkat, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh sumberdaya air yang ada, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi di bidang pemurnian air (daur ulang, desalinasi air laut).

Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi, meskipun di beberapa Kecamatan (Kecamatan Mauk, Sukadari, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi) terindikasi intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dengan Puskom dan IT FMIPA UI (2003) diketahui bahwa di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang (meliputi 6 kecamatan yaitu: Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Cikupa, Curug dan Legok) terdapat 3 lapisan akifer yaitu:

1. akifer dangkal dengan kedalaman < 20 m yang didominasi oleh lapisan pasir
2. akifer menengah dengan kedalaman 20 - 70 m yang merupakan lapisan lempung formasi Bantam Atas
3. akifer dalam dengan kedalaman > 70 m yang merupakan bagian dari formasi Genteng dan formasi Bojongmanik.

Recharge akifer dangkal dan menengah berasal dari air hujan dan sungai/danau, sedang recharge akifer dalam melalui batuan formasi Bojongmanik di



sebelah selatan yang tersingkap (outcropped) dengan elevasi yang lebih tinggi dibanding lokasi penelitian.

Selain itu terdeteksi adanya intrusi air laut sejauh  $\pm 7$  km dari pantai ke darat di Kecamatan Mauk dengan kedalaman intrusi maksimal 70 m. Adapun kualitas air tanah di daerah utara (Mauk) didominasi oleh air tanah payau-asin sedang ke arah selatan kualitas air tanah relatif lebih baik.

### **3.1.2. Potensi Sumberdaya Air**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. : 39/PRT/1989, tentang pembagian wilayah sungai, pasal (1) disebutkan: Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai (DPS). Sedang pada pasal 1 (3), disebutkan : Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dimana air meresap dan / atau melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan.

Dengan demikian Satuan Wilayah Sungai (SWS) bisa diartikan sebagai pengaturan wewenang wilayah kerja pengelolaan sungai, sedang daerah pengaliran sungai adalah tempat mengalirnya sungai yang terbentuk secara alamiah dari satu sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi dengan daerah aliran sungai lainnya oleh batas-batas alamiah. Di Kabupaten Tangerang terdapat 35 buah sungai besar dan sekitar 137 sungai kecil. Tiga sungai besar di Kab. Tangerang adalah Sungai Cisadane, Sungai Cimanceri dan Sungai Cirarab.

#### **1. Sungai Cisadane**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Panjang              | $\pm 60$ km     |
| Lebar                | $\pm 80$ m      |
| Batas selatan (hulu) | Kabupaten Bogor |
| Batas utara (hilir)  | Laut Jawa       |
| Penghijauan          | $\pm 5$ km      |

#### **2. Sungai Cimanceri**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Panjang     | $\pm 90$ km     |
| Lebar       | $\pm 70$ m      |
| Batas hulu  | Kabupaten Bogor |
| Batas hilir | Laut Jawa       |
| Penghijauan | $\pm 7$ km      |

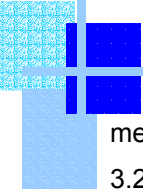
### 3. Sungai Cirarab

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Panjang     | ± 70 km             |
| Lebar       | ± 15 m              |
| Batas hulu  | Kabupaten Tangerang |
| Batas hilir | Laut Jawa           |

Dari laporan Studi Potensi dan Pengembangan Sumberdaya Air Tersebar di Kabupaten Tangerang, Dinas PU Kabupaten Tangerang, Nop. 2002, diketahui bahwa potensi air sungai dan situ/rawa yang merupakan potensi air permukaan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS) menunjukkan potensi sebagai berikut:

- Debit terkecil rata-rata bulanan SWS Cisadane-Ciliwung, sebesar 2,551 m<sup>3</sup>/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cidurian, stasiun Parigi dalam tahun 1995, sedang debit terbesar rata-rata bulanan sebesar 115,315 m<sup>3</sup>/dt, diukur di Sungai Cisadane, stasiun Batu Beulah dalam periode 1991 sampai 1998.
- Di SWS Cisadea-Cikuningan, belum ada data pengukuran jangka panjang, pengukuran dilakukan sesaat menggunakan current meter dan didapat debit aliran terkecil sebesar 0,078 m<sup>3</sup>/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cikoncang, stasiun Cikeusik pada tanggal 5 September 2002, sedang debit terbesar adalah 2,454 m<sup>3</sup>/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cimadur, stasiun Sukajaya pada tanggal 6 September 2002.
- Mata Air jumlahnya ada 3 yang semuanya berlokasi di Kecamatan Ciputata dengan total debit sebesar 210 liter/detik
- Air hujan yang setelah dianalisis dengan perhitungan neraca air menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang mengalami defisit air pada bulan Maret sampai bulan November (8 bulan) sementara surplus air hanya terjadi pada bulan Desember, Januari dan februari (3 bulan)
- Air tanah, debit air tanah di Kabupaten Tangerang berkisar antara 3-10 liter/detik/Km<sup>2</sup>. Di bagian Utara Kabupaten air tanah umumnya tidak dapat digunakan karena asin/payau.

Potensi sumberdaya air tanah dalam (seperti dinyatakan dalam Perda Kabupaten Tangerang No 9 tahun lampiran I Perda Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air Kabupaten Tangerang, Agustus 2003) tersimpan air dalam cekungan bawah tanah (CABT). Terdapat 5 buah CABT di Tangerang Kabupaten potensi air dengan tanah total cukup secara besar. Potensi tersebut dapat dibagi



---

menjadi dua kelompok yaitu: potensi sebagai imbuhan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m<sup>3</sup>/tahun dan potensi sebagai aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m<sup>3</sup>/tahun.

Selain sungai dan air tanah di Kabupaten Tangerang juga banyak dijumpai badan air permukaan berupa danau atau situ (Situ adalah bahasa lokal yang berarti danau). Danau atau situ tersebut tersebar hampir di sebagian Kecamatan di Kabupaten Tangerang. Sebaran situ beserta luasannya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Sebaran Situ di Kabupaten Tangerang

| NO | KECAMATAN   | NAMA SITU        | LUAS SITU<br>(Ha) | LOKASI (DESA) |
|----|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1  | Cikupa      | St. Pasir Gadung | 7.32              |               |
| 2  | Jatiwangi   | St. Cangkring    | 5.23              | Pasar Kemis   |
| 3  | Kronjo      | St. Rawa Liat    | 6.8               | Priuk         |
| 4  | Kresek      | St. Genggong     | 8.37              | Kemuning      |
| 5  | Kresek      | St. Rawa Gabus   | 8.72              | Tamiang       |
| 6  | Mauk        | St. Setingin     | 26.41             | Cibetok       |
| 7  | Pondok Aren | St. Parigi       | 5.24              |               |
| 8  | Rajeg       | St. Jambu        | 2.00              |               |
| 9  | Sepatan     | St. Koja         | 7.00              |               |
| 10 | Sepatan     | St. Sulang       | 8.00              |               |
| 11 | Serpong     | St. Look Some    | -                 |               |
| 12 | -           | St. gede         | 2.80              | PakuJaya      |



Gambar 3.1. Situ di Kab. Tangerang

### 3.5. GAMBARAN KUALITAS AIR SUNGAI DAN AIR TANAH

Perkembangan kegiatan industri meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya air dalam hal penurunan kualitas air (terjadi pencemaran air), demikian juga buangan limbah domestik (rumah tangga) ikut memberi andil terhadap penurunan kualitas air. Gambaran kondisi kualitas air beberapa sungai besar di wilayah Kabupaten Tangerang disajikan pada Tabel 3.2 di bawah ini. Pencemaran cukup bervariasi yang ditunjukkan oleh beberapa parameter dan lokasi pengambilan contoh yang berbeda-beda.

Tabel 3.2 Kondisi Kualitas Air Beberapa Sungai di Wilayah Kab. Tangerang

| Sungai     | Kuantitas  | Parameter Pencemar yang melebihi baku mutu (kelas III) PP 82/2001 |  |   |
|------------|--|---|--|---|
|            |  | Hulu  | Tengah                                       | Hilir   |
| Cidurian   | Panjang ± 81,5 km; luas ± 865 km <sup>2</sup> , Debit rata-rata bulanan = 2,551m <sup>3</sup> /dt (st. Parigi)         | Kekeruhan, Total koliform, Total fosfat                           | Kekeruhan, COD, Total koliform, Total fosfat | Salinitas, kekeruhan, COD, Total koliform, Total fosfat |
| Cisadane   | Panjang ± 140 km; luas ± 1411 km <sup>2</sup> , Debit rata-rata bulanan = 115,315 m <sup>3</sup> /dt (st. Batu Beulah) | Kekeruhan, COD, Total koliform                                    | COD, Oksigen terlarut                        | COD, Total koliform                                     |
| Cimanceuri | Panjang ± 60 km; luas ± 570 km <sup>2</sup> , debit = 0,601 m <sup>3</sup> /dt (st. Balaraja)                          | Tiga raksa  | Cibadak                                      | Balaraja  |
|            |  | Kekeruhan, Permanganat  | Kekeruhan, Permanganat                       | Kekeruhan, Permanganat, Nitrit                          |
|            |  | Kekeruhan, COD, total koliform                                    | COD Total koliform                           |   |

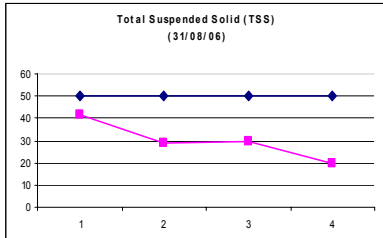


Gambar 3.2. Sungai Cisadane

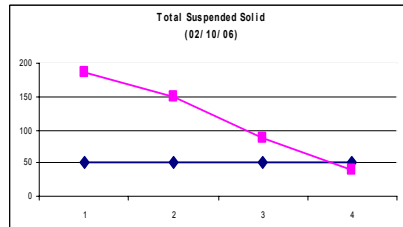
Perencanaan tata ruang kawasan yang berdasarkan aspek fungsional, seperti perencanaan tata ruang Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan metropolitan, kawasan perkotaan, kawasan cepat tumbuh, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, dan kawasan perdesaan di DAS Cisadane, hingga saat ini masih belum jelas kedudukan dan keterkaitannya dengan perencanaan tata ruang wilayah berdasarkan aspek administratif. Perubahan tata guna lahan yang tidak memperhatikan RTRW menyebabkan perubahan fungsi lahan yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas limbah yang masuk. Oleh karena itu perubahan tata guna lahan dan pertumbuhan pemanfaatan di Sungai Cisadane, Cirarab dan Cimanceuri baik oleh pengguna instansional maupun masyarakat perlu dikaji secara menyeluruh untuk melihat tindakan nyata yang perlu dilakukan pada masa yang akan datang.

Gambar – gambar di bawah ini memperlihatkan beberapa parameter yang melebihi baku mutu di Sungai Cisadane, Cirarab dan Cimanceuri.

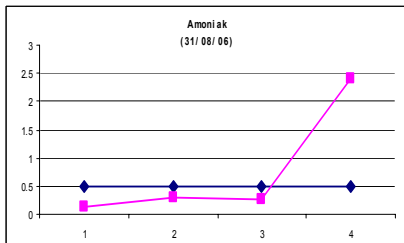
**Grafik TSS tgl 31/08/06**



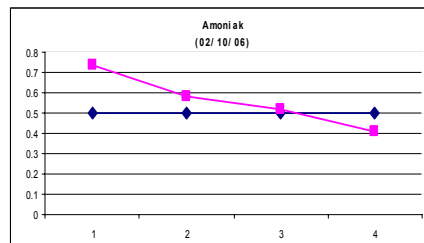
**Grafik TSS tgl 02/10/06**



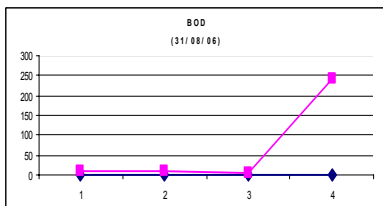
**Grafik Amoniak tgl 31/08/06**



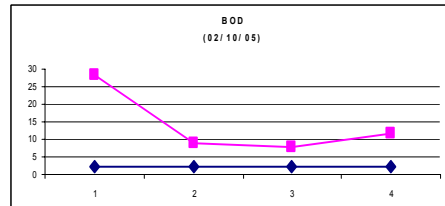
**Grafik Amoniak tgl 02/10/06**



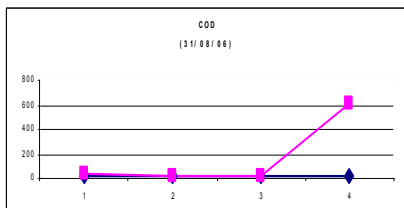
**Grafik BOD tgl 31/08/06**



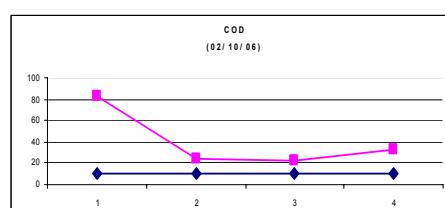
**Grafik BOD tgl 02/10/06**



**Grafik COD tgl 31/08/06**



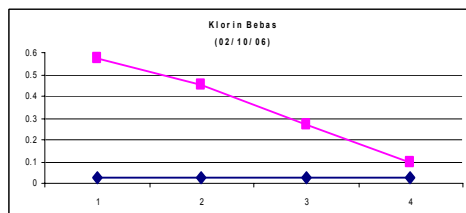
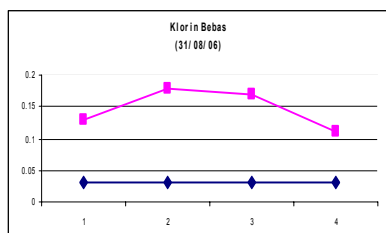
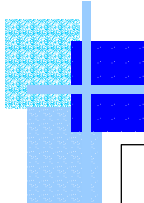
**Grafik COD tgl 02/10/06**



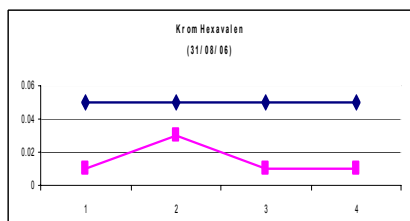
**Klorin Bebas tgl 31/08/10**

**Klorin Bebas tgl (02/10/06)**

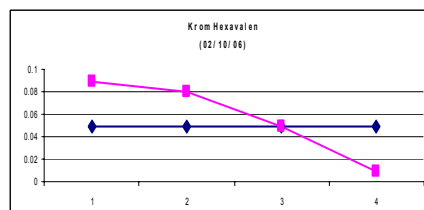




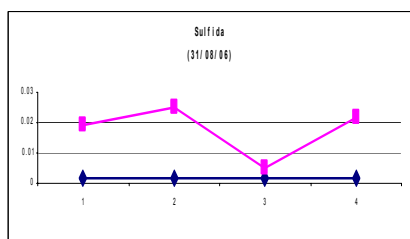
**Krom Hexavalen (31/08/06)**



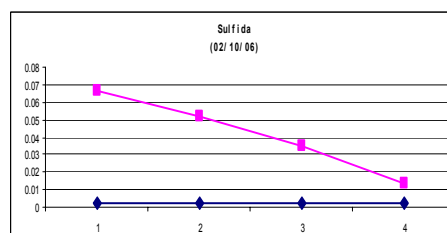
**Krom Hexavalen (02/10/06)**



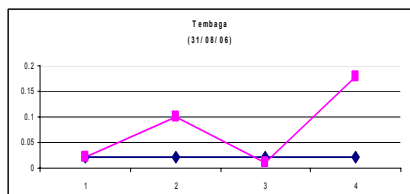
**Sulfida (31/08/06)**



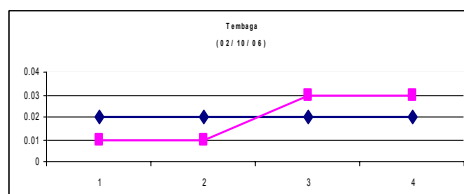
**Sulfida (02/10/06)**



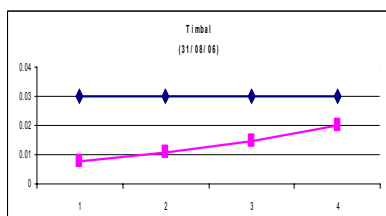
**Tembaga (31/08/06)**



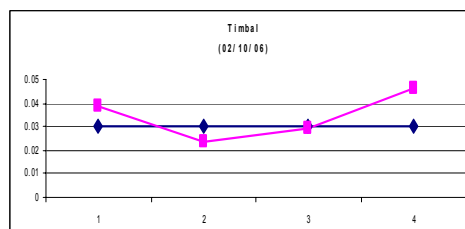
**Tembaga (02/10/06)**



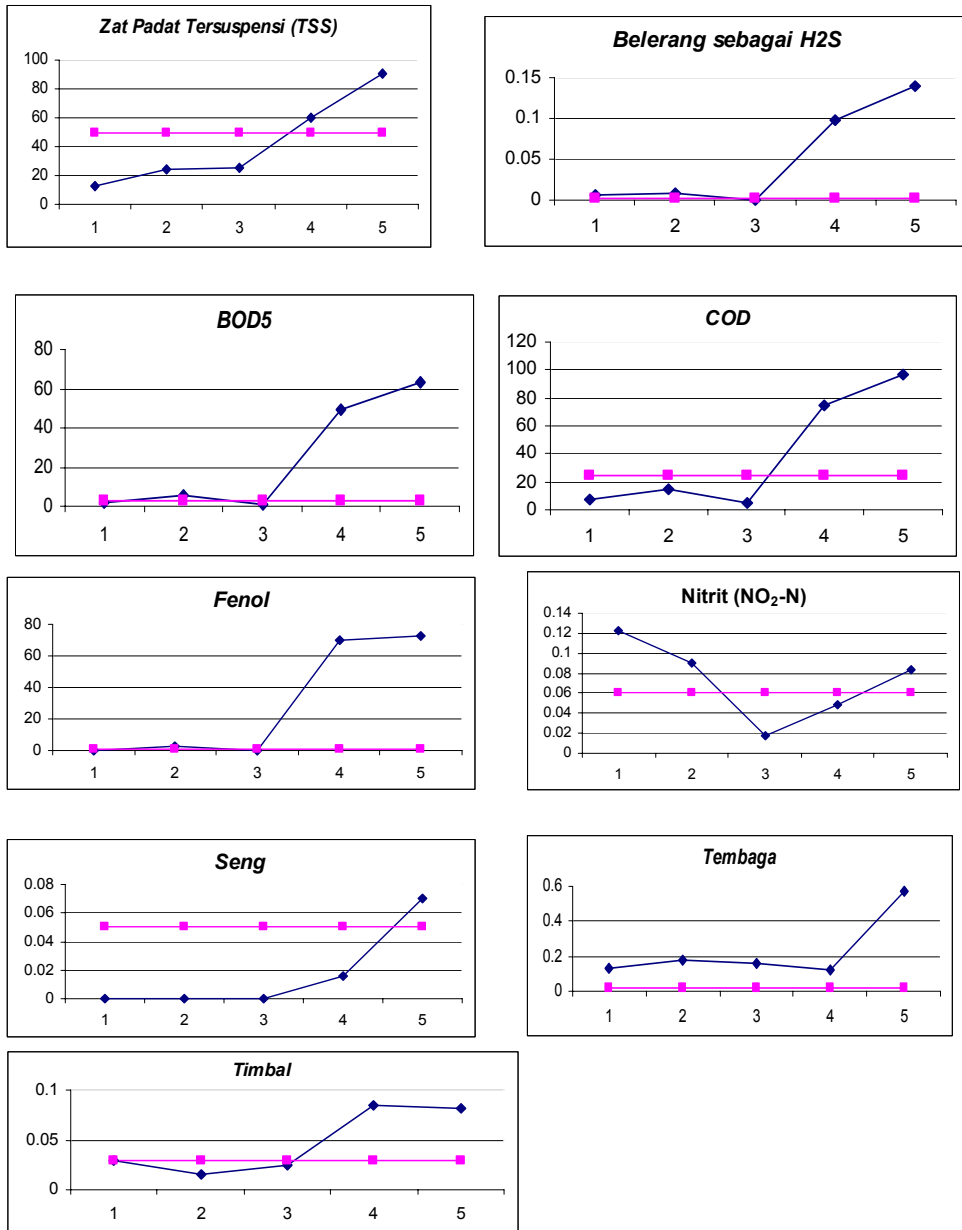
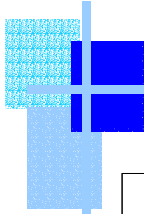
**Timbal (31/08/06)**



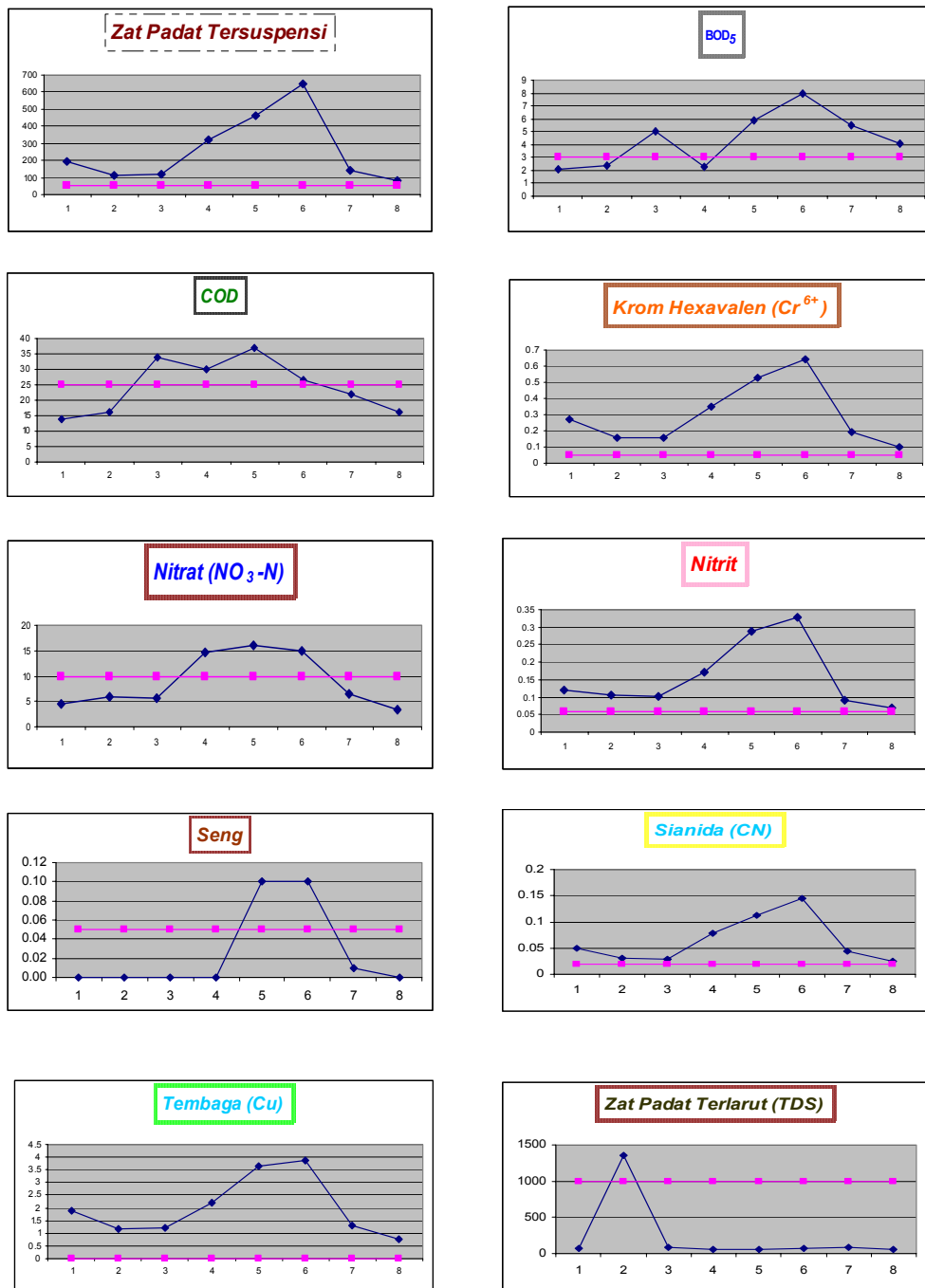
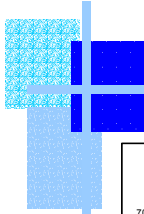
**Timbal (02/10/06)**



Gambar 3.3 Parameter yang Melebihi Baku Mutu di Sungai Cisadane



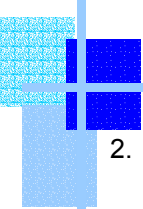
Gambar 3.4 Parameter Kualitas Air sungai Cirarab yang Melebihi Baku Mutu



Gambar 3.5 Parameter Kualitas Air Sungai Cimateuri yang Melebihi Baku Mutu

Permasalahan yang menyebabkan menurunnya kualitas Sungai-sungai di Kabupaten Tangerang akibat aktivitas manusia antara lain :

1. Kerusakan DAS di daerah hulu menyebabkan erosi yang tinggi sehingga memperkeruh air di sepanjang sungai

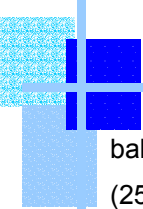
- 
2. Pencemaran akibat sisa pupuk NPK dan insektisida/pestisida dari perkebunan dan usaha pertanian lainnya di kawasan hulu
  3. Pencemaran akibat pembuangan limbah industri yang tidak diolah
  4. Pencemaran limbah domestik dari kawasan permukiman, perkotaan dan perdagangan dari hulu sampai hilir DAS
  5. Pencemaran akibat pembuangan sampah, limbah domestik dan polutan lain dari permukiman kumuh di bantaran sungai
  6. Tanaman yang ditanam di sekitar bantaran sungai bukan merupakan tanaman tertentu dengan lebar tertentu (*vegetated buffer zone*) yang dapat menahan/mengabsorpsi sebagian besar bahan/parameter pencemar.

Kualitas air sangat dipengaruhi oleh aktivitas sekitarnya serta kondisi perubahan tata guna lahan dibagian hulunya. Perubahan tata guna lahan, tingkat kepadatan dan aktivitas yang tinggi secara langsung akan mengakibatkan perubahan pada kualitas air.

Perubahan aktivitas di atasnya, mengakibatkan banyaknya pencemar yang masuk ke dalam air seperti dari kegiatan pertanian, industri, perumahan, jasa dan kegiatan lainnya. Secara visual terlihat bahwa perubahan guna lahan menyebabkan air cenderung berwarna kecoklatan sampai kehitaman, serta berbau amis sampai busuk. Warna kecoklatan disebabkan oleh tingginya padatan tersuspensi yang masuk ke dalam air, berasal dari partikel tanah. Tanah yang relatif terbuka karena berubahnya kawasan hutan menjadi kawasan terbangun, menyebabkan tanah tidak dapat tertahan sehingga partikel tanah terbawa oleh hujan dan masuk ke perairan. Sedangkan semakin menuju ke daerah tengah sampai hilir, warna air berubah menjadi coklat kehijauan atau kehitaman, selain itu kecepatan arus semakin ke hilir semakin lambat.

Bahan pencemar di perairan dapat berasal dari sumber buangan yang dapat diklasifikasikan sebagai sumber titik (*point source discharge*) dan sumber menyebar (*diffuse source*). Sumber titik adalah sumber pencemaran terpusat seperti yang berasal dari air buangan industri maupun domestik dan saluran drainase. Sedangkan sumber menyebar polutan yang masuk ke perairan seperti *run off* atau limpasan dari permukaan tanah permukiman atau pertanian

Bahan-bahan terlarut dalam limbah organik terutama adalah senyawa nitrogen, karbohidrat, asam organik dan mineral-mineral. Sedangkan dalam bentuk padatan tersuspensi adalah protein, lemak dan jaringan ikat. Pencemar organik yang masuk ke sungai tersusun dari kombinasi karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan unsur penting lain seperti belerang, fosfor dan besi. Kelompok terpenting



bahan organik yang ada pada air buangan adalah protein (40 % - 60 %), karbohidrat (25 % - 50 %), lemak dan minyak (10 %). Hasil penguraian bahan organik yang biodegradable oleh mikroba aerobik dapat menghasilkan unsur-unsur hara yang bersifat menyuburkan perairan, tetapi pada konsentrasi tertentu bisa membahayakan kehidupan organisme lain. Hal ini terjadi karena tidak adanya suplai oksigen dalam air dan terbentuk suasana anaerob terdeteksi dengan adanya bau yang disebabkan oleh adanya asam sulfat dan fosfin serta air berwarna kehitaman. Selain itu penguraian bahan organik dalam kondisi anaerobik juga menghasilkan HCN, metana, amoniak, H<sub>2</sub>S dan CO<sub>2</sub> yang merupakan bahan toksik bagi perairan dan menyebabkan kematian bagi flora dan fauna air. Selain berbau busuk, hidrogen sulfida bersifat korosif dan sangat racun. Secara nyata bakteri anaerobik bersifat berbahaya karena dapat menyebabkan tetanus dan racun botulinus.

Dilihat dari pola hidup masyarakat yang ada di sekitar sungai cenderung kurang peduli terhadap lingkungan, menyebabkan asupan bahan pencemar lebih besar dari pemurnian alami sungai. Hal yang nyata terlihat adalah terjadinya proses pendangkalan karena tingginya sedimentasi oleh partikel tanah yang terbawa pada waktu hujan dan adanya buangan sampah. Sampah dan limbah cair rumah tangga maupun industri pangan mengandung bahan organik tinggi sehingga memerlukan oksigen yang cukup untuk proses penguraiannya. Namun akibat adanya pendangkalan, laju aliran sungai menjadi terhambat dan asupan oksigen menjadi rendah. Sedangkan proses penguraian bahan organik terus berlangsung, akibatnya sungai menjadi berkondisi anaerob.

Masukan tinja secara langsung ke sungai dari rumah tangga yang tidak mempunyai septictank dan kotoran hewan dari peternakan di sekitar sungai sangat berperan dalam meningkatkan fecal coli dalam air sungai. Ditambah kondisi pencemar organik lainnya yang sangat tinggi dan kurangnya paparan sinar matahari karena tingginya tingkat kekeruhan dan Total Padatan Terlarut menjadikan fecal coli berkembang dengan pesat. Fecal coli yang sangat berlebih di dalam air sungai menjadikan sungai tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk keperluan penduduk. Sedangkan pemanfaatan air sungai untuk air baku air minum tentu memerlukan bantuan bahan kimia yang lebih banyak untuk menurunkan kelimpahan fecal coli dan berarti memerlukan biaya yang tinggi.

Selain itu juga ada jenis pencemar lain yang bersifat menetap (*persist*) untuk jangka waktu lama. Karena tidak ada mekanisme alamiah yang dapat membersihkan diri dari senyawa jenis ini, maka lama kelamaan terjadi akumulasi pada konsentrasi yang berlebih di perairan atau pada kehidupan akuatik. Sebagai

contoh yaitu *nondegradable synthetic detergent* seperti deterjen dengan jenis surfaktan (*surface active agent*) Alkyl Benzene Sulfonat yang tidak dapat diuraikan secara biologi, DDT dan PCB. Limbah anorganik yang termasuk logam berat umumnya diendapkan di dasar perairan, sedangkan yang non logam umumnya terlarut dalam air. Pada ketiga sungai yang dipantau terlihat bahwa logam berat pada semua sungai sudah di atas baku mutu. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat sungai Cisadane dimanfaatkan airnya untuk air baku air minum. Sama halnya dengan senyawa persisten, keberadaan logam berat di perairan akan sampai pada konsumen tingkat tinggi lewat proses bioakumulasi.

Secara umum data kualitas limbah yang dihasilkan dari beberapa industri di Kabupaten Tangerang memperhatikan bahwa limbah yang dibuang telah memenuhi baku mutu yang disyaratkan. Namun demikian, cemaran di sungai Cisadane, Cirarab dan Cimanceuri terlihat memperhatikan. Diduga masih ada industri yang belum mengolah limbahnya yang dibuang ke sungai dan juga dari buangan limbah rumah tangga. Hasil perhitungan terhadap data penggunaan jamban terlihat bahwa 80 % jumlah jamban yang diperiksa sudah memenuhi persyaratan dan 20 % tidak memenuhi persyaratan dan langsung dibuang ke badan air. Hal itulah yang menyebabkan pencemaran organik pada sungai. Akibatnya terjadi kasus-kasus penyakit seperti penyakit kulit dan diare karena pemanfaatan air yang tidak bersih.



Gambar 3.6. Aktivitas penduduk di sungai dan pencemaran deterjen di Sungai Cirarab

### 3.3. SUMBER AIR BAKU DAN PEMANFAATANNYA

Sumber air baku di Kabupaten Tangerang berasal dari air sungai sebanyak 133,417,860 M<sup>3</sup>/ tahun dan air tanah 59,295 M<sup>3</sup>/ tahun. Selanjutnya air tersebut dimanfaatkan untuk rumah tangga, industri, kantor pemerintahan, niaga, sosial dan air curah seperti terlihat pada Tabel 3.3. Sedangkan hanya 1 industri yang diketahui memanfaatkan air tanah sebesar 48.474 M<sup>3</sup>/ tahun.

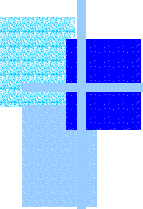
Tabel 3.3. Pemanfaatan Air Baku di Kabupaten Tangerang

| No. | Pelanggan           | Jumlah | Volume (M <sup>3</sup> /Tahun) |
|-----|---------------------|--------|--------------------------------|
| 1   | Rumah Tangga        | 88,622 | 19,584,763                     |
| 2   | Industri            | 84     | 634,434                        |
| 3   | Rumah Sakit         |        |                                |
| 4   | Hotel               |        |                                |
| 5   | Kantor Pemerintahan | 92     | 156,651                        |
| 6   | Niaga               | 2,820  | 803,688                        |
| 7   | Sosial              | 734    | 770,755                        |
| 8   | Air Curah           | 16     | 95,605,512                     |

### 3.4. PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

Pengelolaan kualitas air sungai dapat secara efektif dilaksanakan jika semua pihak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan fungsi sumberdaya yang ada. Kebijakan pengelolaan DAS harus dilaksanakan oleh semua pihak. Tujuan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukkannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya serta menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kualitas air antara lain :

1. Konservasi air, penghematan pemakaian air agar semua kebutuhan dapat dipenuhi
2. Menggunakan teknologi hemat air dalam alat rumah tangga dan sanitasi
3. Mendorong penggunaan teknologi tepat guna dan berbasis bio-teknologi dalam upaya pengendalian kualitas air
4. Mewajibkan industri untuk mengolah limbahnya sebelum dibuang ke perairan
5. Pengelolaan bersama untuk mencegah banjir dan kekeringan

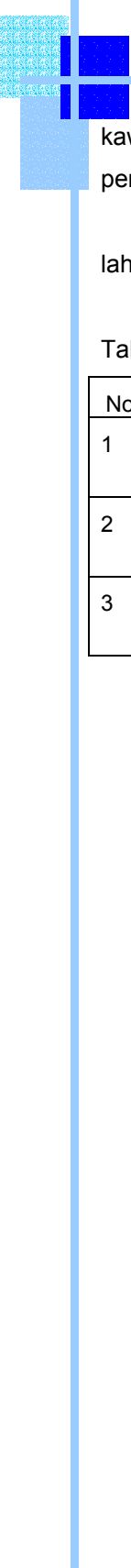
- 
6. Pengelolaan limbah cair dan padat dari rumah tangga. Pengelolaan limbah cair dengan memisahkan antara black water dan gray water. Black water dibuang ke septictank dan gray water dialirkan ke pengolah limbah komunal. Pengelolaan sampah dengan konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu melakukan pemilahan dari sumber dan tidak membuang sampah ke sungai
  7. Membentuk mekanisme monitoring dan pengawasan kualitas air sungai oleh masyarakat dengan membentuk Forum Komunikasi

Upaya pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi konservasi air dan tanah. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan adalah :

1. Metode vegetatif dengan tanaman penutup tanah, penanaman berjalur dan penanaman berganda, tanaman dengan kerapatan tinggi serta reboisasi wanatani (*agroforestry*)
2. Penetapan kawasan tertentu sebagai kawasan konservasi air dan tanah, pada umumnya akan berdampak terhadap pembatasan pembangunan dalam kawasan tersebut. Untuk itu perlu adanya pemikiran tentang kompensasi lain yang dapat diberikan kepada daerah kawasan konservasi air dan tanah tersebut, seperti misalnya sumbangan berupa kompensasi bantuan konservasi air dan tanah.
3. Penetapan kerapatan dasar bangunan (KDB) sebesar 10 % dari luas areal.
4. Pemberian izin lokasi serta IMB diperketat, serta pelaksanaan pembangunan tidak diperkenankan untuk merubah bentang alam yang sudah ada, kecuali untuk meningkatkan sistem konservasi.
5. Rekayasa teknologi pertanian dengan metode mekanik (pengolahan tanah menurut kontur, guludan, teras, pembuatan jalan air dan penghambat, perbaikan drainase dan irigasi).
6. Upaya konservasi air dengan pembuatan situ dan waduk dalam mengurut beban air limpasan ke sungai

Konservasi sumberdaya air dimaksudkan sebagai usaha dalam menjaga pelestarian sumberdaya air untuk kegiatan pembangunan di masa datang. Berdasarkan identifikasi bahwa permasalahan pelestarian sumberdaya alam pada dasarnya disebabkan oleh ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam untuk kegiatan ekonomi dengan aspek kelestarian lingkungan hidup. Sebagai pedoman pemanfaatan ruang yang menjamin kelestarian lingkungan hidup telah diatur di dalam UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang yang membagi ruang atas





kawasan lindung dan kawasan budidaya dan Keppres No. 32 Tahun 1990, tentang pengelolaan kawasan lindung.

Gerakan masyarakat di Kab. Tangerang dalam rangka upaya konservasi lahan dan air telah dilaksanakan yaitu :

Tabel 3.4. Kegiatan konservasi lahan dan air

| No. | Tahun | Tempat      | Kegiatan   | Volume            |
|-----|-------|-------------|--|-------------------|
| 1   | 2003  | Kec. Cisauk | Kegiatan hutan rakyat<br>Pembuatan sumur resapan | 300 Ha<br>50 unit |
| 2   | 2004  | Kec. Cisoka | Kegiatan hutan rakyat<br>Pembuatan sumur resapan | 250 Ha<br>50 unit |
| 3   | 2005  | Kec. Legok  | Kegiatan hutan rakyat<br>Pembuatan sumur resapan | 50 Ha<br>50 unit  |

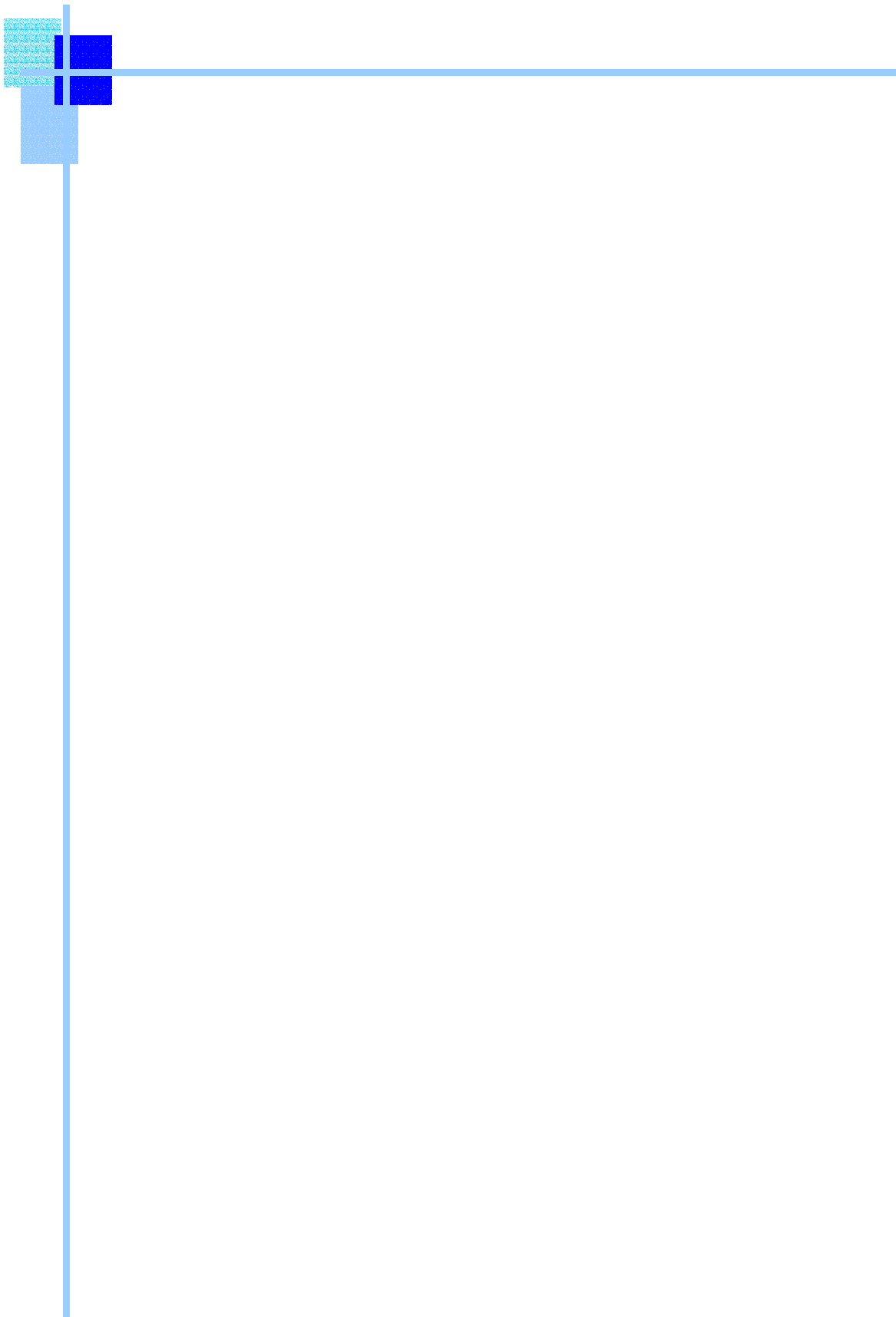
### 3.5. ANALISIS PSR

#### 3.5.1. PSR Primer

| Tekanan   | Kondisi  | Respon   |
|---|--|--|
| <p><b>1. Konversi lahan</b><br/>Perubahan penggunaan lahan dari lahan tertutup vegetasi (hutan, kebun) menjadi lahan terbuka (perukiman, industri, pertambangan, dll) menyebabkan meningkatnya air larian dan berkurangnya air yang terserap ke dalam tanah.<br/>Lahan diwilayah Kabupaten Tangerang difungsikan antara lain sebagai lahan pertanian (sawah, kebun, perkebunan dan peternakan), hutan pemukiman, industri, perdagangan padang golf, peraliran dan lain-lain. Saat ini lahan tersebut mengalami perubahan dengan kecenderungan lahan pertanian makin menyusut, sebaliknya lahan non pertanian (perindustrian, pemukiman, perdagangan) makin bertambah.</p> <p><b>2. Industri</b><br/>Meningkatnya jumlah industri yang berakibat pada pemanfaatan jumlah air dan meningkatnya jumlah limbah yang dibuang ke badan air penerima.<br/>Jenis limbah industri yang masuk ke perairan berupa bahan organik mudah terurai, organik persisten maupun logam berat.</p>   | <p><b>1. Air permukaan</b><br/><u>Kualitas</u><br/>Terjadi penurunan kualitas badan air karena buangan limbah cair dari industri dan limbah cair dari rumah tangga<br/>Konsentrasi pencemaran air seperti TSS, BOD, COD, Cu, C<sup>6+</sup>, Sianida, dll meningkat<br/><u>Kuantitas</u><br/>Fluktuasi air sungai saat hujan dan kemarau cukup ekstrim<br/>Air tanah, debit air tanah di Kabupaten Tangerang berkisar antara 3-10 liter/detik. Air tanah ini cenderung diambil secara berlebihan di sepanjang jalan Jakarta - Tangerang oleh industri-industri, sehingga terjadi penurunan muka air tanah yang cukup drastis<br/>Areal dan lokasi banjir meningkat<br/>Terjadinya pendangkalan sungai (akibat erosi yang tinggi)<br/>Terjadinya penurunan daya dukung sumberdaya air</p> | <p><b>Kebijakan Pembangunan Daerah :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Bupati Tangerang No. 545/SK/3a-Perek/1993 tentang Peruntukan baku mutu air</li> <li>- Peraturan Daerah Kab. Tangerang No. 11 Tahun 1999 Pencegahan dan Penanggulangan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tangerang</li> <li>- Pelaksanaan dokumen lingkungan bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran</li> <li>- Membatasi pengambilan air tanah melalui perizinan SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah)</li> <li>- Pengaturan KDB</li> <li>- Menyusun perencanaan tata ruang di daerah DAS</li> <li>- Melancarkan program Prokasis</li> <li>- Melakukan pemantauan kualitas air pada beberapa sungai dan kualitas limbah cair dari buangan industri</li> <li>- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air dan pembuangan limbah cair di Kabupaten Tangerang</li> <li>- Identifikasi kerusakan morfologi sungai-sungai di Kabupaten Tangerang</li> <li>- Menyelenggarakan forum komunikasi</li> </ul> <p><b>Usulan penanganan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan bekas penambangan wajib direhabilitasi melalui reboisasi</li> <li>- Pengusaha perumahan wajib membuat sumur resapan dan menyiapkan sebagian lahannya untuk daerah terbuka sebagai daerah resapan air</li> <li>- Penambahan fasilitas penanganan kebersihan seperti TPS terpadu, septic tank dan IPAL komunal</li> <li>- Pengetatan pemantauan penerapan dokumen lingkungan (termasuk IPAL)</li> <li>- Melakukan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, termasuk memperketat pemberian izin terutama membangun di kawasan lindung seperti di areal sempadan, daerah hijau, dll</li> <li>- Menjaga daerah resapan air seperti situ, empang, kolam dll</li> <li>- Melakukan penyuluhan pada petani dan peternak agar memberikan pupuk sesuai dengan ketentuan/dosis serta mengganti penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia dengan pupuk organik dan pestisida alami</li> <li>- Meningkatkan reboisasi pada lahan yang tidak terbangun (diseuaikan dengan pengaturan KDB)</li> <li>- Memberikan penyuluhan (termasuk pendidikan sejak dini) pada masyarakat untuk mencintai lingkungan misalinya tidak membuang sampah sembarangan</li> <li>- Meningkatkan upaya penanganan sampah domestik dengan pola pengelolaan sampah berbasis masyarakat</li> </ul> |
| <p><b>3. Pertambangan</b><br/>Terdapatnya kegiatan penambangan khususnya galian C akan menurunkan permukaan air tanah, mengakibatkan bertambahnya tanah yang tererosi dan mencemari air permukaan. Penambangan pasir pada sungai akan memperkeruh air sungai.</p> <p><b>4. Pemanfaatan energi</b><br/>Pemanfaatan energi digunakan untuk pembukaan lahan, industri dan penggalian. Akibatnya pada volume air larian, penurunan muka air tanah dan perubahan kualitas air</p> <p><b>5. Pertanian, peternakan dan perikanan</b><br/>Pemakaian pupuk kimia dan insektisida akan meningkatkan pencemaran pada air permukaan<br/>Realisasi/kebiasaan dalam penggunaan pupuk anorganik adalah 188 kg/ha yang terdiri dari pupuk Urea, SP-36 dan KCL dan pestisida sebanyak 372.236 Kg. Luas tanam 74.447 Ha adalah luas tanam per tahun</p> <p><b>6. Transportasi</b><br/>Jumlah kendaraan yang meningkat menyebabkan perlunya sarana jalan yang menyebabkan meningkatnya air larian ke badan air penerima</p> <p><b>7. Penduduk</b><br/>Meningkatnya jumlah penduduk selalu disertai dengan peningkatan air bersih dan meningkatnya jumlah limbah baik cair maupun padat yang masuk ke lingkungan.<br/>Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada akhir tahun 2000 sebanyak 2.782.896 jiwa sedangkan pada tahun 2005 jumlah penduduk menjadi 3.317.331 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 3,62 %.<br/>Produksi sampah di Kabupaten Tangerang sebesar 6.408 m<sup>3</sup>/hari. Sedangkan jumlah sampah yang terangkut ke TPA hanya 22 % dari jumlah yang ada. Artinya sebagian besar sampah akan dituang oleh masyarakat sendiri dengan cara ditimbun, dibakar atau dibuang ke lingkungan.</p> | <p><b>2. Air tanah</b><br/>Penurunan muka air tanah karena pertambahan penduduk yang memanfaatkan air tanah dan terjadinya perubahan guna lahan yang mengurangi resapan air ke dalam tanah<br/>Jumlah situ berkurang sebanyak 35,5 %</p>   |  |

### 3.5.2. PSR Sekunder

| Tekanan   | Kondisi  | Respon  |
|---|--|---|
| <p><b>Faktor alam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemanasan global (berpengaruh terhadap iklim: musim, angin, dll).</li> <li>▪ Gunung berapi</li> </ul> <p><b>Faktor manusia :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konversi lahan tertutup vegetasi menjadi lahan perumahan dan kegiatan lainnya</li> <li>▪ Pembangunan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan</li> <li>▪ Pemanfaatan air tanah yang berlebihan</li> </ul>   | <p><b>Bencana Alam</b></p> <p>Kekeringan<br/>Banjir<br/>Gempa<br/>Tanah longsor<br/>Gunung meletus<br/>Kebakaran</p> <p>Bencana alam akan merusak semua komponen alam dan manusia</p>  | <p>Membentuk tim pengendalian dan penyelamatan korban bencana</p>   |
| <p><b>Industri Manufaktur</b></p> <p>Pertumbuhan sektor industri pengolahan yang terus meningkat mengakibatkan terjadi konversi lahan menjadi lahan industri</p> <p><b>Pertambangan</b></p> <p>Jumlah pertambangan yang beroperasi baik pertambangan berupa perusahaan atau pribadi (rakyat). Pertambangan menyebabkan konversi lahan hutan. Pada akhir penambangan tidak dilakukan rehabilitasi.</p> <p><b>Pertanian</b></p> <p>Luas lahan pertanian cenderung menurun berubah menjadi lahan permukiman.</p> <p><b>Transportasi</b></p> <p>Berubahnya lahan menjadi jalur transportasi</p> | <p><b>Konversi Lahan untuk Berbagai Kegiatan</b></p> <p>Meningkatnya pencemaran pada air permukaan<br/>Meningkatnya air larian pada badan air dan dapat mempengaruhi debit sungai akibatnya akan terjadi banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau<br/>Berkurangnya daerah resapan air menyebabkan berkurangnya simpanan air dalam tanah</p> | <p><b>Kebijakan pembangunan daerah (sebagai action yang dilakukan pemerintah) :</b></p> <p>Menyusun rencana pemanfaatan ruang dengan berbagai skala seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Tata Ruang Kawasan DAS</li> <li>• Rencana Tata Ruang Kabupaten</li> <li>• Rencana Tata Ruang Kawasan Industri</li> </ul> <p>Memberikan izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang telah ada</p> <p><b>Usulan penanganan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempermudah sosialisasi produk rencana tata ruang pada semua instansi dan masyarakat</li> <li>• Mengevaluasi tata ruang yang tidak sesuai</li> <li>• Memperketat perizinan pemanfaatan ruang</li> </ul> |
| <p><b>Pertambahan penduduk</b></p> <p>Kebupaten Tangerang sebagai salah satu pendukung ibu kota menjadikan daerah tersebut terus berkembang dan jumlah penduduk cenderung meningkat. Pertambahan penduduk dengan segala aktivitasnya menyebabkan keperluan akan segala macam barang olahan menjadi meningkat. Akibatnya tumbuh berbagai industri olahan.</p>  | <p><b>Industri Pengolahan</b></p> <p>Pencemaran pada air permukaan diakibatkan bahan organik, anorganik dan logam berat. Selain itu terjadi pula sedimentasi yang disebabkan oleh erosi dan sampah yang dibuang langsung maupun tidak langsung ke dalam perairan.</p>  | <p><b>Kebijakan pembangunan daerah (sebagai action yang dilakukan pemerintah) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun beberapa kawasan industri yang eksklusif</li> <li>• Mewajibkan menyusun dokumen lingkungan dan menerapkan sistem pengelolaan lingkungan dengan menerapkan pengolahan limbah dengan ketat</li> </ul> <p><b>Usulan penanganan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperketat ijin pembuangan limbah</li> <li>• Mewajibkan ganti rugi pada industri yang terbukti mencemari</li> <li>• Mendorong terciptanya industri terpadu</li> </ul>  |



#### 4.1 KLIMATOLOGI

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dengan kelembaban yang tinggi. Temperatur udara berdasarkan penelitian di Stasiun Geofisika Klas I Tangerang rata-rata berkisar antara 23,2 - 33,2°C, suhu maksimum tertinggi pada bulan Oktober yaitu 35,3°C dan suhu minimum terendah pada bulan Juni yaitu 22,1°C. Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 81,3 % dan 61,3 %. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari dan pada bulan Agustus tidak terjadi hujan, sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 162 mm. Hari hujan tertinggi pada bulan Februari dengan hari hujan sebanyak 20 hari. Untuk lebih jelasnya lihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Suhu Udara Rata – Rata di Kabupaten Tangerang**

| BULAN |           | TEMPERATUR (°C) |      |           |
|-------|-----------|-----------------|------|-----------|
|       |           | MAKS            | MIN  | RATA-RATA |
| 1.    | Januari   | 31,9            | 23,8 | 27,1      |
| 2.    | Pebruari  | 31,1            | 23,4 | 26,6      |
| 3.    | Maret     | 33,1            | 23,5 | 27,3      |
| 4.    | April     | 33,8            | 23,6 | 27,9      |
| 5.    | Mei       | 33,5            | 23,3 | 27,5      |
| 6.    | Juni      | 33,3            | 22,1 | 27,1      |
| 7.    | Juli      | 32,6            | 22,5 | 27        |
| 8.    | Agustus   | 33,7            | 22,3 | 27,3      |
| 9.    | September | 34,3            | 23,1 | 28        |
| 10.   | Oktober   | 35,3            | 23,5 | 28,6      |
| 11.   | Nopember  | 33,9            | 23,7 | 27,9      |
| 12.   | Desember  | 32,4            | 23,7 | 27,2      |

### KELEMBABAN UDARA DAN INTENSITAS MATAHARI

| Bulan            |           | Kelembaban Nisbi (%) | Intensitas Matahari (%) |
|------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| 1                | Januari   | 86,0                 | 50,0                    |
| 2                | Pebruari  | 87,0                 | 25,0                    |
| 3                | Maret     | 85,0                 | 58,0                    |
| 4                | April     | 84,0                 | 66,0                    |
| 5                | Mei       | 85,0                 | 48,0                    |
| 6                | Juni      | 80,0                 | 72,0                    |
| 7                | Juli      | 81,0                 | 75,0                    |
| 8                | Agustus   | 74,0                 | 82,0                    |
| 9                | September | 76,0                 | 84,0                    |
| 10               | Oktober   | 73,0                 | 84,0                    |
| 11               | Nopember  | 82,0                 | 54,0                    |
| 12               | Desember  | 83,0                 | 37,0                    |
| <b>Rata-rata</b> |           | <b>81,3</b>          | <b>61,3</b>             |

Sumber : Stasiun Geofisika Klas I Tangerang

### TEMPERATUR UDARA MAKSIMUM DAN MINIMUM

| Bulan            |           | Temperatur (°C) |             |             |
|------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
|                  |           | Maks            | Min         | Rata-rata   |
| 1.               | Januari   | 31,9            | 23,8        | 27,1        |
| 2.               | Pebruari  | 31,1            | 23,4        | 26,6        |
| 3.               | Maret     | 33,1            | 23,5        | 27,3        |
| 4.               | April     | 33,8            | 23,6        | 27,9        |
| 5.               | Mei       | 33,5            | 23,3        | 27,5        |
| 6.               | Juni      | 33,3            | 22,1        | 27,1        |
| 7.               | Juli      | 32,6            | 22,5        | 27,0        |
| 8.               | Agustus   | 33,7            | 22,3        | 27,3        |
| 9.               | September | 34,3            | 23,1        | 28,0        |
| 10.              | Oktober   | 35,3            | 23,5        | 28,6        |
| 11.              | Nopember  | 33,9            | 23,7        | 27,9        |
| 12.              | Desember  | 32,4            | 23,7        | 27,2        |
| <b>Rata-rata</b> |           | <b>33,2</b>     | <b>23,2</b> | <b>27,5</b> |

Sumber : Stasiun Geofisika Klas I Tangerang



## BANYAKNYA CURAH HUJAN DAN HARI HUJAN

|    | Bulan            | Curah Hujan (mm) | Hari Hujan (hari) | Curah Hujan Maksimum |         |
|----|------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------|
|    |                  |                  |                   | Volume (mm)          | Tanggal |
| 1  | Januari          | 165              | 16                | 67                   | 14      |
| 2  | Pebruari         | 559              | 20                | 84                   | 16      |
| 3  | Maret            | 247              | 7                 | 43                   | 6       |
| 4  | April            | 128              | 11                | 29                   | 21      |
| 5  | Mei              | 259              | 12                | 63                   | 8       |
| 6  | Juni             | 33               | 5                 | 25                   | 14      |
| 7  | Juli             | 75               | 5                 | 38                   | 12      |
| 8  | Agustus          | -                | -                 | -                    | -       |
| 9  | September        | 53               | 3                 | 25                   | 27      |
| 8  | Oktober          | 12               | 3                 | 6                    | 3       |
| 9  | Nopember         | 190              | 13                | 49                   | 25      |
| 10 | Desember         | 227              | 16                | 59                   | 30      |
|    | <b>Rata-rata</b> | <b>162</b>       | <b>9</b>          | <b>41</b>            |         |

Sumber : Stasiun Geofisika Klas I Tangerang

### 4.6. KUALITAS UDARA

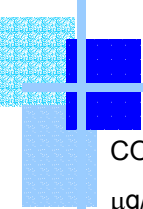
#### 4.2.1. Pencemaran dan Kualitas Udara

Pencemaran udara dapat terjadi yang disebabkan oleh adanya kontaminan (pencemar) di udara yang mengakibatkan kandungan senyawaan gas menjadi berubah. Perubahan ini dapat memberikan dampak negatif bagi kelangsungan hidup makhluk hidup karena menimbulkan reaksi kimia secara spontan di udara. Berdasarkan bentuk fisiknya, pencemar udara dibedakan menjadi dua yaitu yang berbentuk partikulat dan berbentuk gas.

Indikator terjadinya pencemaran udara mengacu pada 2 peraturan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 thn 1999 tentang baku mutu udara ambien dan SK Menaker No. 51/Menaker/1999 tentang nilai ambang batas (NAB).

Parameter yang diukur dalam menentukan tingkat pencemaran udara antara lain CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, NH<sub>3</sub>/ H<sub>2</sub>S, HC, Pb, kandungan debu dan tingkat kebisingan. Apabila salah satu dari komponen pencemaran udara misalnya CO yang merupakan salah satu parameter yang digunakan sebagai indikator pencemaran udara meningkat hingga melampaui nilai ambang batas (NAB) yang dipersyaratkan, akan membahayakan dan berakibat buruk bagi kesehatan makhluk hidup.

Nilai baku mutu udara ambien dari tiap parameter menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 thn 1999 dan nilai ambang batas (NAB) menurut SK Menaker No. Kep 51/Menaker/1999 adalah kebisingan (60 dBA), debu (230 µg/m<sup>3</sup>),



CO (10.000  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), NO<sub>2</sub> (150  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), SO<sub>2</sub> (365  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), HC (160  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), Pb(2  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), NH<sub>3</sub> (1360  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), H<sub>2</sub>S (42  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Pencemaran udara di Kabupaten Tangerang terutama di daerah perkotaan dari waktu ke waktu diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor seperti sektor industri, perhubungan/transportasi dan pariwisata. Hal ini perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu penanganan atau pengendalian secara baik dan komprehensi/ antara instansi terkait.

#### **4.2.2. Sumber Pencemar Udara**

Permasalahan kualitas udara yang timbul lebih disebabkan oleh hal berikut :

- Daerah belum dilengkapi dengan alat pendeteksi pencemar udara
- Belum dilaksanakannya peraturan yang dilengkapi persyaratan teknis untuk layak kendaraan dan layak jalan termasuk aturan untuk mematuhi batas emisi dan batas kebisingan.
- Kesadaran akan pengendalian pencemaran udara masih sangat kurang.


Kualitas lingkungan merupakan sinergi antara hasil dari kegiatan manusia dan system pengelolaan yang dilaksanakan. Dampak dari kualitas lingkungan akan dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan biotik dan abiotik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kualitas lingkungan udara banyak dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari udara, yaitu industri, kendaraan, domestik, dan pembakaran lahan/hutan. Selain itu, sistem pengelolaan lingkungan dan prasarana-sarana yang tersedia juga akan mempengaruhi kualitas lingkungan udara.

Sumber-sumber utama penyebab pencemaran udara yang terdapat di Kabupaten Tangerang meliputi 4 (empat) kegiatan yaitu :

- Kegiatan transportasi
- Kegiatan industri
- Kegiatan rumah tangga atau pemukiman
- Persampahan

Sumber pencemaran udara juga dapat dikategorikan menjadi dua yaitu sumber yang bersifat bergerak yaitu yang berasal dari pengoperasian kendaraan darat dan udara dan sumber tidak bergerak yaitu dari kegiatan industri, rumah tangga dan persampahan.





---

Pencemaran udara dari proses industri disebabkan oleh penggunaan energi seperti batu bara dan pembakaran bahan bakar untuk generator dan penggunaan AC. Wilayah Kabupaten Tangerang didominasi oleh keberadaan industri yang berpotensi mencemari kualitas udara.

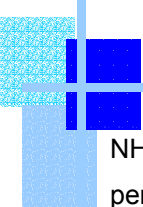
Pencemaran udara sebagai akibat kegiatan transportasi disebabkan oleh pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang menghasilkan gas buang atau emisi. Posisi Kabupaten Tangerang yang berbatasan langsung dengan ibukota negara, Jakarta, serta adanya Bandar Udara Internasional, memberikan tekanan arus kendaraan yang tinggi terhadap lalu lintas Kabupaten Tangerang, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Keberadaan ruang terbuka hijau yang merupakan salah satu penyangga bagi pencemaran udara, dirasa kurang terutama pada daerah-daerah dengan kualitas lingkungan udara yang kurang baik.

Pencemaran udara yang berasal dari kegiatan rumah tangga pada umumnya terjadi di daerah pedesaan karena penggunaan bahan bakar yang tidak diproses terlebih dahulu yaitu bahan bakar dari kayu, sedang pencemaran udara dari kegiatan persampahan disebabkan oleh proses pembakaran sampah akan menghasilkan partikel debu. Pembakaran sampah secara terbuka akan melepaskan parameter CO dan CO<sub>2</sub> ke udara yang mengakibatkan pencemaran yang meluas. Adapun bila di suatu kawasan/kota tersebut telah ada TPA dan TPS tapi tidak dikelola secara baik dan dibiarkan saja menumpuk, maka akan dapat ditemukan parameter pencemar NH<sub>3</sub> dan CO di sekitar TPA tersebut karena terjadinya proses anaerobik dengan sendirinya di dalam tumpukan sampah tersebut.

Sumber-sumber lain yang juga akan menyumbang terjadinya pencemaran udara antara lain adalah kebakaran hutan dan kegiatan (proyek) pembangunan.

#### **4.6. KONDISI UDARA EKSISTING**

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara di Kabupaten Tangerang relatif masih cukup baik terutama di kawasan pedesaan. Namun diperkirakan ada beberapa parameter pencemar udara yang telah mengalami peningkatan secara signifikan dan pada beberapa lokasi telah mendekati dan bahkan diatas nilai ambang batas (NAB). Peningkatan parameter pencemaran udara tersebut telah terjadi terutama di daerah perkotaan yang rawan kemacetan, dikawasan industri, pelabuhan, bandara, daerah wisata, dll. Jenis parameter pencemaran yang telah mengalami peningkatan tersebut antara lain adalah karbon monoksida (CO), debu dan HC sedang parameter lain seperti SO<sub>2</sub>,



---

NH<sub>3</sub> dan H<sub>2</sub>S tidak terdeteksi. Pengamatan terhadap kondisi dan beban pencemaran udara di Kabupaten Tangerang diuraikan sebagai berikut.

- Pengamatan terhadap kualitas udara di Kabupaten Tangerang, secara umum pada ke-15 titik lokasi pengukuran, menunjukkan bahwa kualitas udara ambien masih dibawah Nilai Ambang Batas yang ditentukan. Tingkat kualitas udara terendah terdapat di area Pasar Balaraja, hal ini disebabkan karena tingginya mobilitas penduduk dan tingkat kepadatan transportasi yang terjadi di area pasar tersebut.
- Pengamatan yang dilakukan terhadap empat lokasi kawasan industri yaitu kawasan Manis Kec. Curug, kawasan Bunder Kec. Cikupa, kawasan Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis dan kawasan Cikupa Kec. Cikupa, menunjukkan bahwa seluruh parameter kualitas udara diseluruh lokasi pengukuran masih dibawah baku mutu ambien. Karbon Monoksida (CO) terendah dikawasan industri Bunder, Kecamatan Cikupa sebesar < 1 ppm, dan tertinggi di Kawasan Industri Manis Kecamatan Cicurug sebesar 2,00 ppm. Nitrogen Oksida (NOx) terendah tercatat di Kawasan Industri Bunder Kecamatan Cikupa sebesar 0,013 (µg/m<sup>3</sup>) dan yang terbesar adalah 0,022 (µg/m<sup>3</sup>) di Kawasan Industri Manis Kecamatan Curug.
- Selain parameter kualitas udara ambien, pada lokasi yang sama juga diukur tingkat kebisingan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari sejumlah 15 titik ternyata 60% atau 9 titik lokasi kebisingan yang terukur telah melebihi Nilai Ambang Batas yang ditentukan yaitu 70 dbA (Kep-48/MENLH/II/1996). Kesembilan titik lokasi tersebut yaitu: (1) Perempatan masuk Tol Balaraja, (2) Area Pasar Balaraja, (3) Pertigaan Jalan Kota Tigaraksa, (4) Perbatasan tikungan antara Kecamatan Legok dan Bumi Serpong Damai, (5) Halaman depan Pasar Curug, (6) Pertigaan Jalan Raya Curug-Serang, (7) Pertigaan Jalan Raya Serang-Cikupa (Citra Raya), (8) Depan Pasar Cikupa, (9) Depan Area Kedaton dan Country Golf.



Gambar 4.1. Transportasi di Kab. Tangerang

Permasalahan pencemaran udara juga terjadi pada lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Pengelolaan TPA yang kurang optimal dan adanya kesalahan cara penanganan sampah memicu timbulnya penurunan kualitas udara pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Pengamatan pemantauan kualitas udara pada salah satu TPA di Kabupaten Tangerang dilakukan terhadap parameter yang diukur meliputi CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, dan partikel debu. Adapun hasil pengukuran diuraikan sebagai berikut.

Konsentrasi NO<sub>2</sub> di lokasi pemantauan berkisar antara 42,2-54,80 µg/m<sup>3</sup>. Nilai ini masih berada dibawah baku mutu kualitas udara ambien yang menetapkan maksimum 150 µg/m<sup>3</sup>. Konsentrasi SO<sub>2</sub> nilainya berkisar antara 34,35-45,76 µg/m<sup>3</sup>. Konsentrasi ini masih memenuhi baku mutu yang menetapkan nilai maksimum 365 µg/m<sup>3</sup>. Hal ini dimungkinkan oleh pengaruh gas buang dari kegiatan transportasi (truk angkutan sampah) yang melakukan bongkar sampah di lokasi TPA. Konsentrasi karbon monoksida (CO) nilainya bervariasi antara 487 µg/m<sup>3</sup> s.d. 675 µg/m<sup>3</sup> (masih jauh di bawah baku mutu 10000 µg/m<sup>3</sup>) terdeteksinya bahan pencemar ini menunjukkan adanya pengaruh gas buang dari aktifitas transportasi. Hasil pengukuran udara menunjukkan bahwa konsentrasi H<sub>2</sub>S berkisar antara 9,45 µg/m<sup>3</sup> s.d. 14,25 µg/m<sup>3</sup> dan masih dibawah baku mutu (42 µg/m<sup>3</sup>). Konsentrasi H<sub>2</sub>S dimungkinkan karena pengaruh proses penguraian sampah secara biologis yang pada saat ini telah berjalan beberapa lama. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa kandungan debu berkisar antara 38,90-69,55 µg/m<sup>3</sup>, sehingga masih dibawah baku mutu (230 µg/m<sup>3</sup>) Konsentrasi debu di lokasi TPA dimungkinkan adanya pengaruh kegiatan transportasi angkutan sampah sehingga menimbulkan resuspensi debu. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa NH<sub>3</sub> berkisar

antara 11,35-12,20  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . (masih jauh dibawah baku mutu 1360  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) konsentrasi  $\text{NH}_3$  dilokasi pemantauan menunjukkan adanya pengaruh gas buang dari kendaraan angkutan sampah.

Intensitas kebisingan dilokasi TPA dan sekitarnya berkisar antara 44 dBA - 53 dBA. Hasil pengukuran ini masih berada dibawah baku mutu intensitas kebisingan berdasarkan SK Menteri LH No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yang menetapkan nilai maksimum di daerah sekitar pemukiman adalah 55 dBA.



Gambar 4.2. TPA Sampah Jatiwaringin

#### 4.6. PERMASALAHAN YANG TIMBUL

Dampak dari pencemaran udara terutama dirasakan oleh masyarakat sekitar, yang ditunjukkan oleh tingkat kesehatan masyarakat terutama kasus kejadian penyakit ISPA. Daerah-daerah dengan kasus kejadian penyakit ISPA adalah daerah dengan kepadatan lalu lintas tinggi serta daerah peruntukan lahan sebagai industri, baik kawasan maupun non kawasan seperti pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Daerah dengan Kasus Kejadian Penyakit ISPA di Kab. Tangerang

| No | Kecamatan   | Puskesmas     | ISPA  |
|----|-------------|---------------|-------|
| 1  | Serpong     | Serpong       | 4820  |
|    |             | Pondok Jagung | 2402  |
| 2  | Ciputat     | Ciputat       | 4538  |
|    |             | Kampung Sawah | 1618  |
|    |             | Jombang       | 2364  |
| 3  | Pamulang    | Pamulang      | 10713 |
| 4  | Pondok Aren | Pondok Aren   | 7382  |
| 5  | Curug       | Curug         | 6485  |
|    |             | Jl. Kutai     | 2678  |

|    |            |               |               |
|----|------------|---------------|---------------|
|    |            | Jl. Emas      | 689           |
|    |            | Kelapa Dua    | 1885          |
| 6  | Legok      | Legok         | 2249          |
|    |            | Bojong Nangka | 1741          |
| 7  | Pagadengan | Pagadengan    | 2183          |
| 8  | Cikupa     | Cikupa        | 3096          |
| 9  | Panongan   | Panongan      | 3108          |
| 10 | Balaraja   | Balaraja      | 534           |
|    |            | Gembong       | 4045          |
| 11 | Tigaraksa  | Tigaraksa     | 1183          |
| 12 | Cisoka     | Cisoka        | 2574          |
|    |            | Cikuya        | 3598          |
| 13 | Kresek     | Kresek        | 2082          |
|    |            | Sidoko        | 429           |
| 14 | Kronjo     | Kronjo        | 617           |
|    |            | Waliwis       | 816           |
| 15 | Teluknaga  | Teluknaga     | 4535          |
| 16 | Kosambi    | Kosambi       | 1641          |
| 17 | Sepatan    | Sepatan       | 194           |
|    |            | Kedaung Barat | 217           |
| 18 | Pakuhaji   | Pakuhaji      | 2712          |
| 19 | Mauk       | Mauk          | 2198          |
| 20 | Rajeg      | Rajeg         | 5333          |
| 21 | Pasarkemis | Pasarkemis    | 4983          |
|    |            | Kutabumi      | 3642          |
| 22 | Jambe      | Jambe         | 2086          |
| 23 | Cisauk     | Cisauk        | 3041          |
|    |            | Suradita      | 2922          |
| 24 | Jayanti    | Jayanti       | 907           |
| 25 | Kemiri     | Kemiri        | 603           |
| 26 | Sukadiri   | Sukadiri      | 791           |
|    |            | <b>Jumlah</b> | <b>109634</b> |

Terlihat dari tabel bahwa daerah yang termasuk kawasan industri memiliki kasus penyakit ISPA yang tinggi. Kecamatan tersebut misalnya Pasar Kemis dan Serpong, yang merupakan daerah industri baik industri kawasan maupun non kawasan. Khusus untuk Kecamatan Ciputat dan Pamulang terjadi kasus ISPA karena merupakan daerah padat lalu lintas. Berikut ini adalah daftar trayek angkutan umum, dimana terlihat daerah Ciputat dan Pamulang yang dipenuhi oleh trayek angkutan umum. Serta tabel jumlah trayek yang dilayani oleh terminal, terlihat bahwa terminal Ciputat merupakan daerah yang padat oleh trayek angkutan umum.



Tabel 4.3. Rute Angkutan dan Persebaran Terminal di Kabupaten Tangerang

**RUTE ANGKUTAN PELAYANAN APDS DI KABUPATEN TANGERANG**

| NO | KODE TRAYEK | TRAYEK/ RUTE  | JUMLAH | ALOKASI 2005 |
|----|-------------|---|--------|--------------|
| 1  | D.03        | Ciputat – Lembah Bukit  | 122    | 172          |
| 2  | D.06        | Ciputat - Jombang   | 176    | 230          |
| 3  | D.07        | Ciputat – Muncul - Serpong  | 245    | 287          |
| 4  | D.08        | Ciputat – Kp. Sawah – Jombang - LK.Gudang Timur – Term BSD sektor I | 93     | 115          |
| 5  | D.09        | Ciputat – Pd. Ranji – Bintaro Mall - Arinda                         | 96     | 115          |

| NO            | KODE TRAYEK | TRAYEK/ RUTE                               | JUMLAH       | ALOKASI 2005 |
|---------------|-------------|--|--------------|--------------|
| 6             | D.10        | Ciputat – Pondok Aren                      | 111          | 115          |
| 7             | D.11        | Ciputat – Muncul - Prumpung                | 127          | 172          |
| 8             | D.12        | Ciputat – Serua Permai – Pr. Benying       | 72           | 115          |
| 9             | D.12A       | Ciputat – Serua – Bukit – Ciater - BSD     | 52           | 60           |
| 10            | D.13        | Ciputat – Pamulang – reni Jaya             | 119          | 115          |
| 11            | D.14        | Ciputat – Pamulang – Pd. Benda             | 174          | 230          |
| 12            | D.16        | BSD – Serpong – Muncul                     | 55           | 115          |
| 13            | D.20        | Serpong – Cisauk – Cicangkal               | 130          | 130          |
| 14            | D.21        | Term. Pd. Pakulonon – Rw. Buntu            | 34           | 115          |
| 15            | D.25        | Perm. Melati mas – P.Kacang Barat – arinda | 4            | 50           |
| 16            | D.26        | Ruko pamulang – Bintaro Plaza              | 30           | 75           |
| 17            | D.27        | Komp. Duta Bintaro – Pakujaya – Alam Sutra | 10           | 50           |
| 18            | D.28        | Ciputat – Sawangan                         | 35           | 100          |
| 19            | A.07        | Curug – Bitung – Balaraja                  | 52           | 37           |
| 20            | A.08        | Legok – pagedangan – Kelapa Dua            | 12           | 50           |
| 21            | B.10        | Pr. Dasana – Indah – Legok – Curug         | 4            | 115          |
| 22            | E.01        | Balaraja – Cikande – Gintung               | 65           | 75           |
| 23            | E.02        | Balaraja – Kronjo                          | 55           | 115          |
| 24            | E.03        | Balaraja – Kresek                          | 108          | 115          |
| 25            | E.04        | Balaraja – Cisoka                          | 4            | 115          |
| 26            | E.05        | Balaraja – Cikupa – Ps. Kemis              | 52           | 69           |
| 27            | E.06        | Balaraja – Perum. Taman Adiyasa            | 164          | 175          |
| 28            | E.09        | Kronjo – Rajeg – Ps. Kemis                 | 19           | 69           |
| 29            | E.10        | Curug – Citra Raya – tgraksa – PPM Munjul  | 34           | 57           |
| 30            | E.11        | Ps.Curug – Ps.Korelet – Parung Panjang     | 10           | 50           |
| 31            | E.15        | Balaraja – Cisoka – Tgraksa – Komp.Pemda   | 11           | 50           |
| 32            | F.03        | Tj.Pasir – kampung melayu – Dadap          | 106          | 115          |
| 33            | F.04        | Kampung Melayu – Cituis – Sangrila         | 40           | 70           |
| 34            | F.06        | Kp. Melayu – Kp.Besar – Lemo – kp.Muara    | 9            | 50           |
| 35            | G.05        | Tj.Kait – Mauk – Ps.Kemis                  | 42           | 57           |
| 36            | G.07        | Kotabumi – Bitung – Cikupa – balaraja      | 107          | 115          |
| 37            | G.08        | Daon – cadas - Sepatan                     | 10           | 57           |
| <b>JUMLAH</b> |             |  | <b>2.589</b> | <b>3.917</b> |

Sumber : Dinas Perhubungan

#### PERSEBARAN TERMINAL KABUPATEN TANGERANG, TAHUN 2005

| NO | NAMA TERMINAL           | MELAYANI  |
|----|-------------------------|-----------|
| 1  | Terminal Ciputat        | 17 Trayek |
| 2  | Terminal Pondok Aren    | 4 Trayek  |
| 3  | Terminal BSD / Serpong  | 7 Trayek  |
| 4  | Terminal Jombang        | 3 Trayek  |
| 5  | Terminal Pondok Cabe    | 2 Trayek  |
| 6  | Terminal Bintaro Plaza  | 1 Trayek  |
| 7  | Terminal Balaraja       | 9 Trayek  |
| 8  | Terminal Tigaraksa      | 2 Trayek  |
| 9  | Terminal Cisoka         | 1 Trayek  |
| 10 | Terminal Curug          | 7 Trayek  |
| 11 | Terminal Kelapa Dua     | 2 Trayek  |
| 12 | Terminal Kronjo         | 2 Trayek  |
| 13 | Terminal Sepatan        | 2 Trayek  |
| 14 | Terminal Kota Bumi      | 3 Trayek  |
| 15 | Terminal Mauk           | 2 Trayek  |
| 16 | Terminal Pasar Kemis    | 4 Trayek  |
| 17 | Terminal Kampung Melayu | 2 Trayek  |

Sumber : *Studi Sistem Transportasi "Commuter", 2005*

#### 4.5. UPAYA MENGATASI PENCEMARAN UDARA

Upaya menjaga kualitas lingkungan dalam hal ini mencegah pencemaran udara, ada beberapa hal yang dilakukan yaitu menerapkan kebijakan dan menjalankan beberapa program

##### 1. Kebijakan :

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, meliputi : Standar Tingkat Kebisingan yang diperbolehkan di setiap peruntukan kawasan
- Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang Standar Baku Mutu Udara Ambien Nasional

##### 2. Program :

- Melakukan Program Langit Biru
- Melakukan pengujian emisi pada saat pengujian kendaraan
- Mensyaratkan penyusunan dokumen lingkungan pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara
- Melakukan reboisasi

- Melakukan penyuluhan kepada petani agar memberi pupuk sesuai ketentuan/dosis
- Hanya mengizinkan produk-produk dengan label CFC
- Melakukan rehabilitasi lahan bekas pertambangan
- Membangun hutan kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan sangat membantu dalam menyerap pencemar di udara



Gambar 4.3. Hutan Kota di Kab. Tangerang



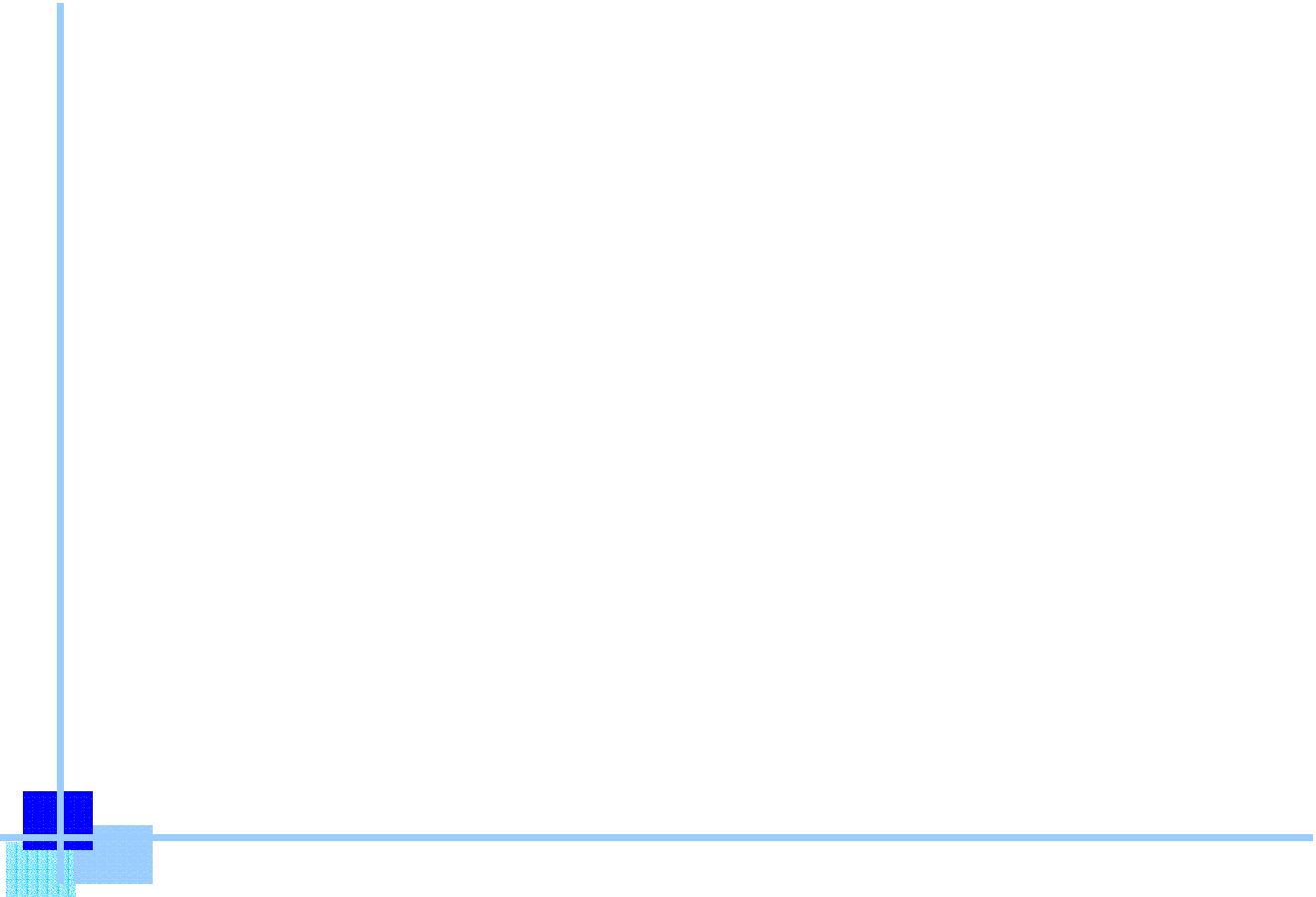
## 4.6. ANALISIS PSR

### 4.6.1. PSR Primer

| Tekanan  | Kondisi   | Respon  |
|--|---|---|
| <p><b>1. Konversi lahan</b><br/>Perubahan penggunaan lahan dari lahan tertutup vegetasi (hutan, kebun) menjadi lahan terbuka (perukiman, industri, pertambangan, dll) menyebabkan antara lain berkurangnya aktivitas fotosintesis yang mengakibatkan berkurangnya kadar oksigen di udara dan penguapan sehingga udara menjadi kering dan bersuhu tinggi.</p> <p>Lahan diwilayah Kabupaten Tangerang difungsikan antara lain sebagai lahan pertanian (sawah, kebun, perkebunan dan peternakan), hutan pemukiman, industri, perdagangan padang golf, perairan dan lain-lain. Saat ini lahan tersebut mengalami perubahan dengan kecenderungan lahan pertanian makin menyusut, sebaliknya lahan non pertanian (perindustrian, pemukiman, perdagangan) makin bertambah.</p> <p><b>2. Industri</b><br/>Meningkatnya jumlah industri yang berakibat meningkatnya kadar polutan ke udara dan pelepasan udara panas. Pada akhirnya akan menurunkan kualitas udara dan meningkatkan suhu udara. Selain itu, kegiatan industri juga menimbulkan kebisingan</p> <p><b>3. Pertambangan</b><br/>Kegiatan penambangan galian C berupa pembukaan lahan, pengupasan lahan, pengerukan, dll, berpotensi menurunkan kualitas udara.</p> <p><b>5. Pertanian, peternakan dan perikanan</b><br/>Kegiatan pemberian pupuk melalui penyemprotan/ditaburkan sangat berpotensi mencemari udara, karena sebagian dari pupuk yang disemprotkan akan terbang tertitup angin.</p> <p><b>9. Transportasi</b><br/>Kegiatan transportasi yang terus meningkat berakibat langsung terhadap peningkatan pemakaian bahan bakar, yang pada akhirnya akan meningkatkan pencemaran udara. Selain itu, kegiatan transportasi menyebabkan kebisingan</p> <p><b>11. Penduduk</b><br/>Kebiasaan masyarakat (khusus di daerah perkotaan) menggunakan bahan-bahan aerosol yang mengandung CFC. Selain itu, pemakaian AC dan Refrigerator masih banyak yang menggunakan CFC</p> | <p>Kualitas udara di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan masih cukup baik dimana nilai konsentrasi pencemar masih di bawah Nilai Ambang Batas. Akan tetapi bila hal ini tidak segera menjadi perhatian Pemerintah Daerah, dikhawatirkan kualitas udara akan memburuk.</p> <p>Kejadian penyakit ISPA cukup tinggi yang umumnya disebabkan oleh kualitas udara yang buruk, terutama terjadi di daerah industri dan daerah padat lalu lintas.</p> | <p><b>Kebijakan Pembangunan Daerah (sebagai action yang dilakukan pemerintah) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup KEP-48/MENLH/1/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, meliputi : Standar Tingkat Kebisingan yang diperbolehkan di setiap peruntukan kawasan</li> <li>- Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang Standar Baku Mutu Udara Ambien Nasional</li> <li>- Melakukan Program Langit Biru</li> <li>- Melakukan pengujian emisi pada saat pengujian kendaraan</li> <li>- Mensyaratkan penyusunan dokumen lingkungan pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara</li> <li>- Melakukan reboisasi</li> </ul> <p><b>Usulan penanganan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan bekas penambangan wajib direhabilitasi melalui reboisasi</li> <li>- Meningkatkan upaya penghijauan di lahan terbuka yang dimiliki oleh perseorangan (disesuaikan dengan pengaturan KDB)</li> <li>- Pemantauan penerapan dokumen lingkungan yang ketat</li> <li>- Melakukan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, termasuk memperketat pemberian ijin membangun di kawasan lindung</li> <li>- Melakukan penyuluhan kepada petani agar memberi pupuk sesuai ketentuan/dosis</li> <li>- Hanya mengizinkan produk-produk dengan label CFC</li> </ul> |

#### 4.6.2. PSR Sekunder

| Tekanan  | Kondisi  | Respon   |
|--|--|--|
| <p><b>Industri Manufaktur</b><br/>Pertumbuhan sektor industri pengolahan yang terus meningkat mengakibatkan terjadi konversi lahan menjadi lahan industri</p> <p><b>Pertambangan</b><br/>Jumlah pertambangan yang beroperasi baik pertambangan berupa perusahaan atau pribadi (rakyat). Pertambangan menyebabkan konversi lahan hutan. Pada akhir penambangan tidak dilakukan rehabilitasi.</p> <p><b>Pertanian</b><br/>Luas lahan pertanian cenderung menurun berubah menjadi lahan permukiman.</p> <p><b>Transportasi</b><br/>Berubahnya lahan menjadi jalur transportasi</p>  | <p><b>Konversi Lahan</b><br/>Berubahnya kualitas udara sekitarnya secara langsung<br/>Meningkatnya zat-zat pencemar di udara<br/>Meningkatnya penyakit ISPA</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, meliputi : Standar Tingkat Kebisingan yang diperbolehkan di setiap peruntukan kawasan</li> <li>Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang Standar Baku Mutu Udara Ambien Nasional</li> </ul>                       |
| <p><b>Pertambahan penduduk</b><br/>Pertambahan penduduk menyebabkan permintaan barang olahan meningkat. Keadaan ini memicu pertumbuhan sektor industri. Sektor industri di Kab. Tangerang merupakan salah satu sektor andalan dari segi produk maupun penyerapan tenaga kerja</p> <p><b>Kebijaksanaan pembangunan daerah</b><br/>Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah dimana Kab. Tangerang merupakan daerah penyangga ibu kota Jakarta, maka industri banyak menjamur. Industri merupakan salah satu penyumbang pencemar di udara</p>  | <p><b>Industri</b><br/>Berubahnya kualitas udara sekitarnya secara langsung<br/>Meningkatnya zat-zat pencemar di udara<br/>Meningkatnya penyakit ISPA</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang Standar Baku Mutu Udara Ambien Nasional</li> <li>Pembuatan hutan kota</li> </ul>  |
| <p><b>Tekanan</b></p> <p><b>Industri pengolahan</b><br/>Meningkatnya jumlah industri/kawasan industri merupakan pemicu meningkatnya volume lalu lintas</p> <p><b>Pariwisata</b><br/>Kegiatan pariwisata merupakan pembangkit lalu lintas dan semakin tinggi volumenya pada hari-hari libur. Di Kab. Tangerang banyak berkembang mall dan tempat rekreasi lainnya hal ini merupakan salah satu penyebab meningkatnya volume kendaraan</p> <p><b>Pertambahan penduduk</b><br/>Pertambahan penduduk berkaitan erat dengan penambahan jumlah transportasi. Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan tanpa dibarengi dengan penambahan jumlah jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang berkait pada meningkatnya pencemaran udara</p> <p><b>Perilaku manusia</b><br/>Masih rendahnya etika perilaku manusia di jalan raya menyebabkan timbulnya permasalahan lalu lintas seperti kecelakaan dan kemacetan</p> | <p><b>Kondisi</b><br/>Terjadi kemacetan karena penambahan jumlah kendaraan tidak berimbang dengan penambahan jalan<br/>Transportasi darat berpotensi menyebabkan pencemaran udara dan kebisingan</p> | <p><b>Respon</b></p> <p>Usulan penanganan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membatasi kendaraan pribadi</li> <li>Meningkatkan peran kendaraan umum dengan cara meningkatkan pelayanan dan kenyamanan</li> <li>Mengendalikan emisi gas buang dengan pendekatan teknologi</li> <li>Menegakkan peraturan berlalu lintas dengan tegas dan bena</li> </ul> |

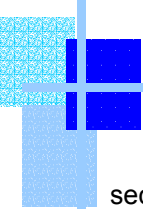


**5.1. KONDISI PENGGUNAAN LAHAN**

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan permukiman ke Wilayah Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman. Untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, danau/situ, dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan, perkampungan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, perkebunan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan, dan lain-lain. Penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu penggunaan untuk kegiatan terbangun dan penggunaan untuk kegiatan tidak terbangun. Penggunaan lahan terbangun yang meliputi penggunaan untuk perumahan, perkampungan, zona industri, kawasan industri, perusahaan dan perdagangan, serta jasa. Luas lahan terbangun di kabupaten Tangerang sebesar 26.299,19 Ha (23,68 %), lahan non terbangun sebesar 80.589,29 Ha (72,58 %), umumnya berupa lahan pertanian dan tanah kosong (padang golf), sisanya sebesar 4.149,52 Ha (3,73 %) untuk lain-lain seperti jalan, sungai, lapangan olah raga, kuburan, RTH, taman, dan lain – lain.

Karakter perkembangan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak lepas dari keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan pergerakan antar wilayah serta jaringan jalan regional yang menghubungkan kota-kota utama di Propinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup perumahan, perkampungan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama (linier).



---

Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang terjadi secara linier dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros jalur Lintas Tengah (poros Serang - Grogol) (terkonsentrasi pada pusat kota), sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangan perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan dengan bagian utara, terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya.

Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi.

Melihat visi dan misi Kabupaten Tangerang serta fungsi yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk Kabupaten Tangerang. Peningkatan kegiatan tanpa dimbangi dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya permasalahan transportasi. Hal ini perlu diantisipasi dalam Revisi RTRW Kabupaten Tangerang.

Untuk jelasnya sebaran dan kecenderungan penggunaan lahan Kabupaten Tangerang yang terjadi saat ini dapat dilihat pada bahasan berikut ini.

#### **5.1.1. Penggunaan Perumahan**

Kawasan perumahan merupakan kegiatan kota yang berfungsi sebagai hunian bagi warga Kabupaten Tangerang. Luas penggunaan lahan untuk perumahan sebesar 4,66 % dari luas keseluruhan Kabupaten Tangerang atau sekitar 5.178,30 Ha. Karena adanya poros utama yang membentang di tengah-tengah Kabupaten Tangerang, maka aktivitas penduduk pun terkonsentrasi di sepanjang jalur tersebut (Jalan Serang - Grogol). Namun dengan adanya pembangunan jalur lintas selatan dan lintas utara di wilayah Kabupaten Tangerang ada kecenderungan perkembangan permukiman ke wilayah ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan kawasan perumahan baru di wilayah ini. Bangunan perumahan di Kabupaten Tangerang meliputi bangunan permanen, semi permanen dan sederhana.



Gambar 5.1. Kawasan Perumahan

### 5.1.2. Penggunaan Perkampungan

Penggunaan lahan untuk perkampungan merupakan kegiatan kota yang berfungsi sebagai hunian bagi warga Kabupaten Tangerang. Luas penggunaan lahan untuk perkampungan sebesar 14,76 % dari luas keseluruhan Kabupaten Tangerang atau sekitar 16.388,87 Ha. Luas penggunaan lahan untuk perkampungan terbesar berada di Kecamatan Ciputat yaitu sebesar 1.031,83 Ha dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Pagedangan yaitu sebesar 246,28 Ha.



Gambar 5.2. Lahan perkampungan

### 5.1.3. Zona Industri dan Kawasan Industri

Visi Kabupaten Tangerang adalah sebagai pusat Industri. Dengan visi tersebut, maka tidak mengherankan jika di Kabupaten Tangerang saat ini banyak berkembang zona industri terutama di bagian tengah dan selatan Kabupaten Tangerang. Zona industri saat ini terkonsentrasi di wilayah bagian tengah - selatan dan sebagian tersebar di sepanjang jalan utama dan mendekati Jalan Tol. Luas

lahan zona industri saat ini sebesar 2.218,31 Ha atau 1,99 % dari luas wilayah Kabupaten Tangerang. Luas zona industri terbesar berada di Kecamatan Cikupa yaitu sebesar 539,06 %, kemudian disusul pasar Kemis sebesar 472,57 ha.

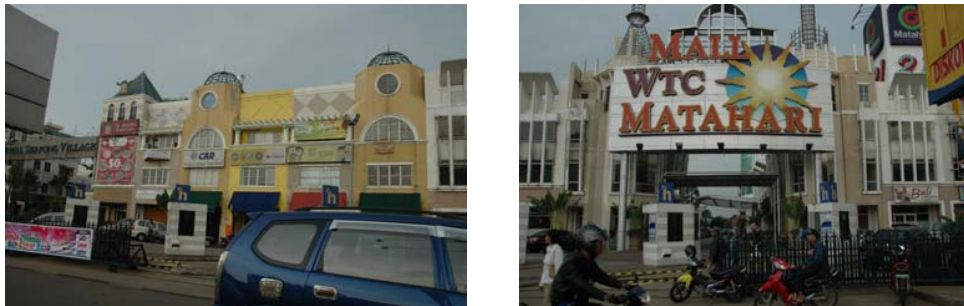
Sedangkan untuk Kawasan Industri saat ini hanya terkonsentrasi di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu di Kecamatan Cisoka, Tigaraksa, Cikupa, Legok, Serpong, Pasar Kemis, dan Balaraja. Luas kawasan industri di Kabupaten Tangerang yaitu sebesar 238,56 Ha atau 0,21 %.

#### **5.1.4. Kegiatan Perdagangan/perusahaan dan Jasa**

Kabupaten Tangerang cukup potensial dalam kegiatan perdagangan dan jasa, hal ini nampak dari banyaknya tempat-tempat perdagangan dan jasa serta beraneka ragam fasilitas pendukungnya. Perkembangan perdagangan dan jasa ini tidak terlepas dari letak Kabupaten Tangerang yang dekat DKI Jakarta dan berada pada perlintasan Banten - Jakarta, sebagai akibat dari hal tersebut maka Kabupaten Tangerang berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa (distribusi dan akumulasi) berbagai komoditas perekonomian dari wilayah sekitarnya.

Persebaran kegiatan perdagangan dan jasa skala kota (modern) yang terjadi saat ini yaitu disepanjang Jalan serang - Grogol, Kecamatan Cikupa, Legok, Kosambi, Pamulang, Ciputat dan Balaraja, namun sudah ada upaya untuk mendistribusikan kegiatan perdagangan ke wilayah-wilayah pinggiran terutama ke wilayah bagian utara. Sedangkan untuk kegiatan perdagangan skala lokal (tradisional) seperti toko, warung dan pasar letaknya menyebar mendekati kawasan permukiman. Luas lahan perdagangan saat ini sebesar 1.050,18 Ha atau 0,95 %.

Sedangkan untuk kegiatan jasa luas lahan secara keseluruhan sebesar 1.224,97 Ha atau 1,10 % yang tersebar hampir diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Luas terbesar berada di Kecamatan Cisauk yaitu sebesar 356,25 Ha, kemudian disusul Kecamatan Curug sebesar 229,19 Ha.



Gambar 5.3. Kawasan perdagangan



### 5.1.5. Penggunaan Pertanian

Penggunaan Lahan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Tangerang terdiri dari sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan, tegalan, kebun campuran, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Luas lahan pertanian terbesar adalah untuk kebun campuran yaitu sebesar 23.148,70 atau 20,84 % yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Luas terbesar berada di Kecamatan Pagedangan yaitu sebesar 2.495,27 ha dan yang terkecil berada di Kecamatan sukadiri yaitu sebesar 105,00 Ha.

Luas lahan pertanian terbesar kedua yaitu untuk Sawah Irigasi teknis yaitu sebesar 19.473,51 Ha atau 17,54 %. Sawah irigasi teknis terbesar umumnya berada di bagian utara wilayah Kabupaten Tangerang terutama di Kecamatan Kronjo yaitu sebesar 3.300,64 Ha.

Untuk lebih jelasnya, pola penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 5.1.



Gambar 5.4. Lahan pertanian

## 5.2. POLA PENGGUNAAN LAHAN

Pola pengembangan fisik/tata guna lahan berupa pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan kota, sedangkan pola ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi.

Motor ekstensifikasi lainnya yang cukup banyak dijumpai pada pengembangan daerah baru adalah pola skipping (lompat kodok) yang banyak



dilakukan oleh para developer yang beroperasi di daerah ini khususnya di wilayah bagian selatan Kabupaten Tangerang. Pola ini sangat produktif dalam membuka wilayah-wilayah pengembangan baru, karena orientasi pada harga tanah murah merupakan dasar yang paling mendasari pelaksanaan pola ini.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, daunau/situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan, perkampungan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, perkebunan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan dan lain-lain. Penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya terbagi menjadi 2 yaitu penggunaan untuk kegiatan terbangun dan penggunaan untuk kegiatan tidak terbangun. Penggunaan lahan terbangun di Kabupaten Tangerang meliputi penggunaan untuk perumahan, perkampungan, zona industri, kawasan industri, perusahaan dan perdagangan serta jasa. Luas lahan terbangun di Kabupaten Tangerang sebesar 26.299,19 Ha (23,68 %), lahan non terbangun sebesar 80.589,29 Ha (72,58 %), umumnya berupa lahan pertanian dan tanah kosong (padang golf), sisanya sebesar 4.149,52 Ha (3,73 %) untuk lain-lain seperti jalan, sungai, lapangan olah raga, kuburan dan ruang terbuka hijau (RTH) seperti terlihat pada Lampiran 3.

Kegiatan reboisasi untuk menghijaukan kembali telah dilakukan terutama di sekitar pusat pemerintahan Kecamatan Tiga Raksa. Tabel 5.1 adalah data rencana dan realisasi reboisasi di Kabupaten Tangerang.

Tabel 5.1. Rencana dan Realisasi Reboisasi di Kabupaten Tangerang

| No | Lokasi          | Rencana   |              | Realisasi |              |
|----|-----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|    |                 | Luas (Km) | Jumlah Pohon | Luas (Km) | Jumlah Pohon |
| 1  | Desa Peusar     | 10        | 2000         | 10        | 2000         |
| 2  | Desa Budi Mulya | 10        | 1900         | 10        | 1900         |
| 3  | Desa Kranggan   | 10        | 1800         | 10        | 1800         |
| 4  | Desa Suradita   | 15        | 2100         | 15        | 2100         |
|    | <b>Total</b>    |           | <b>7800</b>  |           | <b>7800</b>  |

### **5.3. INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG**

Pembahasan intensitas pemanfaatan ruang lebih memberikan pengertian secara kuantitatif dari pemanfaatan ruang. Tolak ukur kuantitatif dari intensitas pemanfaatan ruang adalah berupa suatu koefisien yang mencakup koefisien pemanfaatan ruang yang lebih bersifat horizontal KDB (Koefisien Dasar Bangunan) atau BCR (Building Coverage Ratio) dan koefisien yang lebih menunjukkan dimensi vertikal / ketinggian yaitu KLB (Koefisien Lantai Bangunan) atau FAR (Floor Area Ratio).

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan antara luas areal terbangun dengan luas areal tidak terbangun dan dinyatakan dalam persen. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah jumlah lantai bangunan dibagi luas persil suatu bangunan atau luas perpetakan/kavling, untuk setiap blok peruntukan dan dinyatakan dalam satuan angka mulai dari angka 1 (satu).

KDB di Kabupaten Tangerang berkisar antara 50 - 70 % dari total kapling tiap lahan, sedangkan KLB (Koefisien Lantai Bangunan) eksisting berkisar antara 1-4 lantai (0,5 -2,8).

### **5.4. SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN**

Kabupaten Tangerang telah dilengkapi infrastruktur pendukung seluruh kegiatan di dalamnya. Infrastruktur tersebut adalah jaringan jalan, jaringan listrik, telepon, sistem penyediaan air bersih, sistem pengolahan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan. Infrastruktur yang telah ada di Kabupaten Tangerang digambarkan pada Lampiran 1

### **5.5. KONDISI EKSISTING LAHAN DAN HUTAN**

Hutan di Kabupaten Tangerang memiliki luas total sebesar 1300,5 ha. Dari luas tersebut, yang berfungsi sebagai kawasan konservasi, yang dalam hal ini sebagai taman hutan raya seluas 0,5 ha. Sisanya adalah sebagai hutan lindung (seluas 1300 ha). Total luas hutan di Kabupaten Tangerang berdasarkan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2. Total Luas Hutan di Kabupaten Tangerang

| No. | Hutan              | Luas (Ha) |
|-----|--------------------|-----------|
| A   | Kawasan Konservasi |           |
| 1   | Cagar Alam         | -         |
| 2   | Suaka Margasatwa   | -         |
| 3   | Taman Wisata       | -         |
| 4   | Taman Baru         | -         |
| 5   | Taman Nasional     | -         |
| 6   | Taman Hutan Raya   | 0,5       |
| B   | Hutan Lindung      | 1300      |
| C   | Hutan Produksi     | -         |
| D   | Hutan Kota         | -         |
|     | Total Luas Hutan   | 1300,5    |

Kondisi lahan kritis di Kabupaten Tangerang cukup memprihatinkan, karena cukup luas. Lokasi lahan kritis tersebut tersebar di 7 kecamatan, seperti pada Tabel 5.3. berikut.

Tabel 5.3. Kondisi Lahan Kritis di Kabupaten Tangerang

| No. | Lokasi    | Luas (Ha) |
|-----|-----------|-----------|
| 1   | Kronjo    | 341,55    |
| 2   | Kemeru    | 454,8     |
| 3   | Mauk      | 36,8      |
| 4   | Sukadiri  | 4,45      |
| 5   | Pakuhaji  | 520,95    |
| 6   | Teluknaga | 277,835   |
| 7   | Kosambi   | 559,9     |

Sumber : Hasil analisis Bappedal Propinsi Banten (Kehutanan, LH)

Ketujuh kecamatan tersebut merupakan daerah persawahan yang terletak di pesisir. Suatu lahan menjadi lahan kritis dapat disebabkan oleh pemakaian pupuk anorganik dan pestisida yang akan merusak top soil tanah. Tabel 5.4 berikut adalah data penggunaan pupuk dan pestisida di daerah pertanian.

Tabel 5.4. Penggunaan Pupuk

| No. | Daerah<br>(Kecamatan) | Luas<br>Tanam<br>(Ha) | Jenis Pupuk |                   | Pestisida<br>(Kg) |
|-----|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|     |                       |                       | Organik     | Anorganik         |                   |
| 1   | Cisoka                | 4,618                 | -           | 868,184           | 23,09             |
| 2   | Tigaraksa             | 3,034                 | -           | 570,392           | 15,17             |
| 3   | Jambe                 | 1,148                 | -           | 215,824           | 5,74              |
| 4   | Cikupa                | 411                   | -           | 772,68            | 2,055             |
| 5   | Panongan              | 1245                  | -           | 234060            | 6225              |
| 6   | Curug                 | 87                    | -           | 16,356            | 435               |
| 7   | Legok                 | 1,754                 | -           | 329,752           | 8,77              |
| 8   | Pagedangan            | 2,051                 | -           | 385,588           | 10,255            |
| 9   | Serpong               | 84                    | -           | 15,792            | 420               |
| 10  | Cisauk                | 427                   | -           | 80,276            | 2,135             |
| 11  | Pamulang              | -                     | -           | -                 | -                 |
| 12  | Ciputat               | 47                    | -           | 8,836             | 235               |
| 13  | Pondok Aren           | 24                    | -           | 4,512             | 120               |
| 14  | Pasarkemis            | 3,812                 | 71          | 716,656           | 19,06             |
| 15  | Balaraja              | 4,69                  | 9           | 8,8172            | 23,45             |
| 16  | Jayanti               | 2,855                 | 9           | 881,72            | 23,45             |
| 17  | Kresek                | 8,189                 | 18          | 1.539.532         | 40,845            |
| 18  | Kronjo                | 7,909                 | 9           | 1.486.892         | 39,545            |
| 19  | Mauk                  | 5,672                 | 9           | 1.066.336         | 28,36             |
| 20  | Kemeri                | 2,709                 | 41          | 509,292           | 13,545            |
| 21  | Sukadiri              | 3,466                 | -           | 651,608           | 17,33             |
| 22  | Rajeg                 | 5,696                 | 162         | 1.070.848         | 28,48             |
| 23  | Sepatan               | 4,49                  | 19          | 844,12            | 22,45             |
| 24  | Pakuhaji              | 6,472                 | 9           | 1.216.736         | 32,36             |
| 25  | Teluknaga             | 2,515                 | 16          | 472,82            | 12,575            |
| 26  | Kosambi               | 1042                  | 16000       | 195896            | 5210              |
|     | <b>Jumlah</b>         | <b>74,447</b>         | <b>388</b>  | <b>13.996.036</b> | <b>372,236</b>    |

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Tangerang

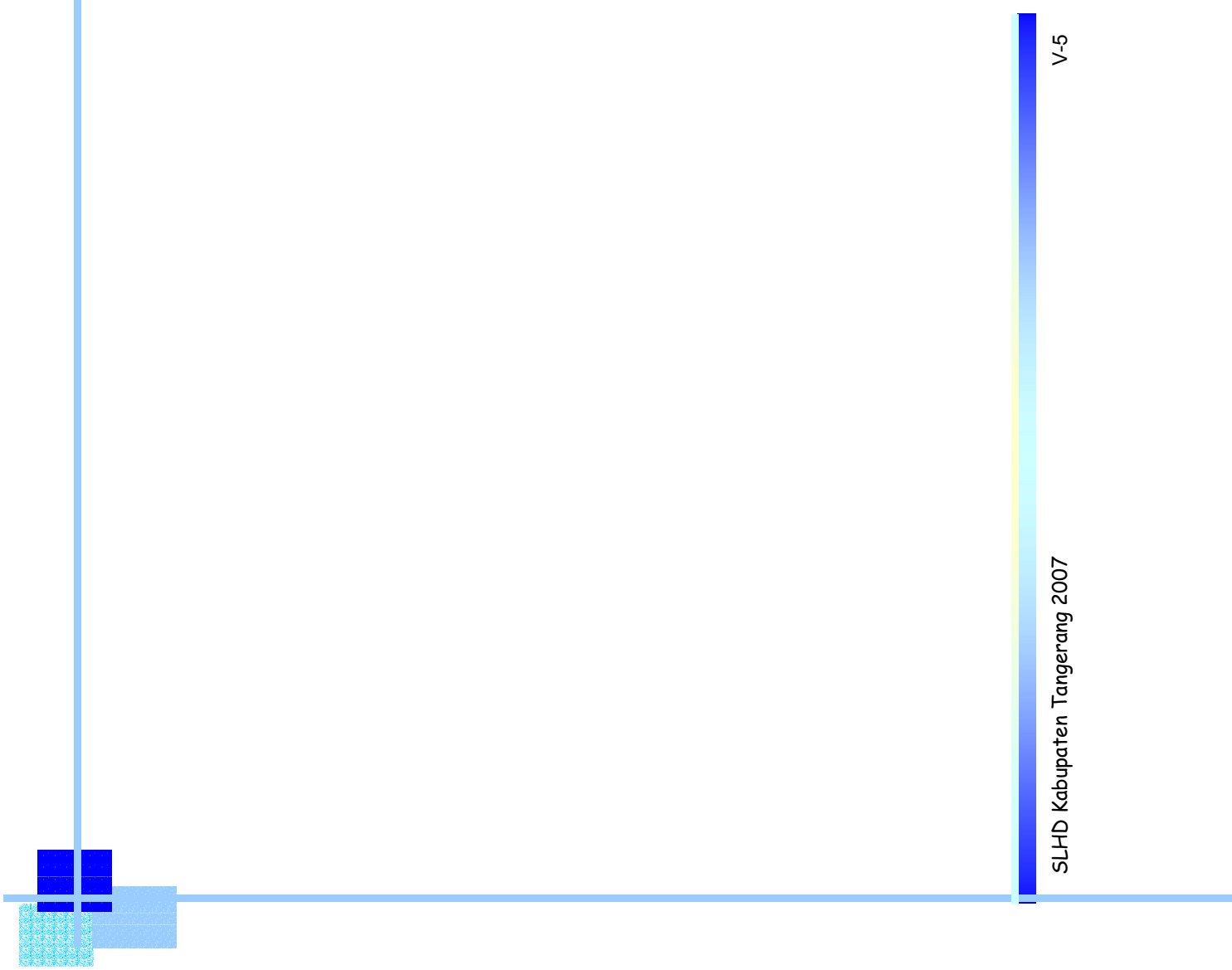
## 5.6. ANALISIS PSR

### 5.6.1. PSR Primer

| Tekanan   | Kondisi  | Respon   |
|---|--|--|
| <p><b>1. Konversi lahan</b><br/>Perubahan penggunaan lahan dari lahan tertutup vegetasi (hutan, kebun) menjadi lahan terbuka (permukiman, industri, pertanian, dll) menyebabkan lahan menjadi tandus dan miskin.</p> <p>Lahan diwilayah Kabupaten Tangerang difungsikan antara lain sebagai lahan pertanian (sawah, kebun, perkebunan dan peternakan), hutan pemukiman, industri, perdagangan padang golf, perairan dan lain-lain. Saat ini lahan tersebut mengalami perubahan dengan kecenderungan lahan pertanian makin menyusut, sebaliknya lahan non pertanian (perindustrian, permukiman, perdagangan) makin bertambah.</p> <p><b>2. Pertambangan</b><br/>Meningkatnya kegiatan penambangan khususnya galian C yang tidak disertai dengan rehabilitasi lahan akan mengakibatkan tanah menjadi tandus/miskin akibat hilangnya top soil. Bekas galian juga akan merusak landscape.</p> <p><b>3. Pemanfaatan energi</b><br/>Kegiatan pemanfaatan energi yang dilakukan di darat akan diikuti dengan rusaknya lahan dan hutan di sekitarnya.</p> <p>Pembukaan lahan juga dilakukan untuk pembangunan prasarana seperti jaringan jalan dan fasilitas pendukungnya.</p> <p><b>4. Pertanian, peternakan dan perikanan</b><br/>Pemberian pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran terhadap tanah dan berkurangnya top soil sehingga terjadi penurunan kualitas pertanian</p> <p><b>5. Pariwisata</b><br/>Beberapa kegiatan pariwisata yang tidak disertai dengan kesadaran lingkungan cenderung merusak areal hutan</p> <p><b>6. Perilaku Manusia</b><br/>Penebangan kayu yang tidak terkendali dan tanpa ijin menyebabkan terjadi penggundulan/ perusakan hutan</p> <p><b>7. Krisis moneter dan terbatasnya anggaran</b><br/>Krisis moneter dan terbatasnya anggaran mengakibatkan menurunnya perawatan cagar alam dan taman nasional</p> | <p>Luas kawasan konservasi di Kabupaten Tangerang sangat kecil. Hal ini dapat memicu permasalahan lingkungan yang lebih besar karena konservasi lingkungan dapat menjaga dan meningkatkan fungsi sumberdaya air dan lahan serta mempertahankan keanekaragaman hayati.</p> <p>Sebaliknya luas lahan kritis justru sangat luas, terutama di daerah yang merupakan daerah pertanian. Lahan kritis ini terjadi karena konversi lahan dan penggunaan pupuk serta pestisida di daerah pertanian yang mengurangi lapisan top soil di permukaan tanah.</p> | <p><b>1.4 Kebijakan Pembangunan Daerah (sebagai action yang dilakukan pemerintah) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun perencanaan tata ruang, dimana di dalamnya telah ditetapkan batas-batas kawasan lindung, kawasan yang boleh berubah fungsi, dll</li> <li>- Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan dan perkebunan yang berwawasan lingkungan</li> <li>- Pembinaan dan pengendalian perusahaan hutan</li> <li>- Pengukuhan dan penatagunaan hutan</li> <li>- Rehabilitasi hutan dan lahan</li> <li>- Perlindungan dan pengamanan hutan lintas kabupaten</li> </ul> <p>Usulan penanganan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang telah disusun hendaknya dilakukan dengan sangat ketat, seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperketat perijinan pembangunan di daerah kawasan lindung</li> <li>▪ Memperketat perijinan perubahan fungsi lahan di luar ketentuan rencana tata ruang</li> </ul> </li> <li>- Melakukan reklamasi dan reboisasi pada lahan kritis, termasuk bekas area penambangan</li> </ul> |

## 5.6.2. PSR Sekunder

| Tekanan   | Kondisi  | Respon  |
|---|--|---|
| <p align="center"><b>Konversi Lahan untuk Berbagai Kegiatan</b></p> <p><b>Industri Manufaktur</b><br/>Pertumbuhan sektor industri pengolahan yang terus meningkat mengakibatkan terjadi konversi lahan menjadi lahan industri</p> <p><b>Pertambangan</b><br/>Jumlah pertambangan yang beroperasi baik pertambangan berupa perusahaan atau pribadi (rakyat). Pertambangan menyebabkan konversi lahan hutan. Pada akhir penambangan tidak dilakukan rehabilitasi.</p> <p><b>Pertanian</b><br/>Luas lahan pertanian cenderung menurun berubah menjadi lahan permukiman.</p> <p><b>Transportasi</b><br/>Berubahnya lahan menjadi jalur transportasi</p> | <p>Terjadi konversi lahan dari lahan dengan tutupan vegetasi menjadi lahan tanpa tutupan vegetasi/lahan terbuka</p> <p>Terjadi konversi lahan dari kawasan lindung sempadan (terutama pantai) menjadi kawasan terbangun (kawasan wisata, permukiman, dll)</p> <p>Secara holistik berkurangnya luas lahan akan berpengaruh pada sumberdaya lingkungan alam seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumberdaya air</li> <li>• Meningkatkan air larian dan meningkatnya pencemar</li> <li>• Sumberdaya lahan dan hutan</li> <li>• Mengurangi fungsi hutan sebagai paru-paru</li> <li>• Rusaknya lansekap</li> <li>• Pesisir dan laut</li> <li>• Mengurangi fungsi dan peran hutan bakau sebagai penyangga gelombang laut</li> <li>• Kualitas udara dan bising</li> <li>• Mempengaruhi kualitas udara secara langsung</li> <li>• Keanekaragaman hayati</li> </ul> <p>Hilangnya ekosistem hutan sehingga mengancam kelestarian jenis dan jumlah spesies hayati</p> | <p><b>Kebijakan pembangunan daerah (sebagai action yang dilakukan pemerintah) :</b></p> <p>Menyusun rencana pemanfaatan ruang dengan berbagai skala seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Tata Ruang Kawasan DAS</li> <li>• Rencana Tata Ruang Kabupaten</li> <li>• Rencana Tata Ruang Kawasan Industri</li> </ul> <p>Memberikan izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang telah ada</p> <p><b>Usulan penanganan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempermudah sosialisasi produk rencana tata ruang pada semua instansi dan masyarakat</li> <li>• Mengevaluasi tata ruang yang tidak sesuai</li> <li>• Memperketat perizinan pemanfaatan ruang</li> </ul> |



V-5

SLHD Kabupaten Tangerang 2007

**6.1. PENGERTIAN DAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI**

Pengertian atau definisi Keanekaragaman hayati dapat diartikan dari berbagai aspek, uraian dibawah ini setidaknya mewakili beberapa diantaranya :

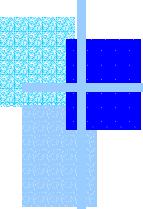
1. Keanekaragaman hayati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keanekaan bentuk kehidupan di bumi, interaksi di antara berbagai makhluk hidup serta antara mereka dengan lingkungannya;
2. Keanekaragaman hayati mencakup semua bentuk kehidupan di muka bumi, mulai dari makhluk sederhana seperti jamur dan bakteri hingga makhluk yang mampu berpikir seperti manusia;
3. Keanekaragaman hayati ialah fungsi-fungsi ekologi atau layanan alam, berupa layanan yang dihasilkan oleh satu spesies dan/atau ekosistem (ruang hidup) yang memberi manfaat kepada spesies lain termasuk manusia (McAllister 1998);
4. Keanekaragaman hayati merujuk pada aspek keseluruhan dari sistem penopang kehidupan, yaitu mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta aspek sistem pengetahuan dan etika, dan kaitan di antara berbagai aspek ini;

Keanekaragaman hayati memiliki beragam nilai atau arti bagi kehidupan. Ia tidak hanya bermakna sebagai modal untuk menghasilkan produk dan jasa saja (aspek ekonomi) karena keanekaragaman hayati juga mencakup aspek sosial, lingkungan, aspek sistem pengetahuan, dan etika serta kaitan di antara berbagai aspek ini. Berdasarkan uraian tersebut, berikut ini setidaknya ada 6 nilai keanekaragaman hayati yang bisa diuraikan:

**a) Nilai Eksistensi**

Nilai eksistensi merupakan nilai yang dimiliki oleh keanekaragaman hayati karena keberadaannya (Ehrenfeld, 1991). Nilai ini tidak berkaitan dengan potensi suatu organisme tertentu, tetapi berkaitan dengan beberapa faktor berikut:



- 
- 
- a. Faktor hak hidupnya sebagai salah satu bagian dari alam;
  - b. Faktor yang dikaitkan dengan etika, misalnya nilainya dari segi etika agama. Berbagai agama dunia menganjurkan manusia untuk memelihara alam ciptaan Tuhan; dan
  - c. Faktor estetika bagi manusia. Misalnya, banyak kalangan, baik pecinta alam maupun wisatawan, bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk mengunjungi taman-taman nasional guna melihat satwa di habitat aslinya, meskipun mereka tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut.

**b) Nilai Jasa Lingkungan**

Nilai jasa lingkungan yang dimiliki oleh keanekaragaman hayati ialah dalam bentuk jasa ekologis bagi lingkungan dan kelangsungan hidup manusia. Sebagai contoh jasa ekologis, misalnya, hutan, salah satu bentuk dari ekosistem keanekaragaman hayati, mempunyai beberapa fungsi bagi lingkungan sebagai:

- a. pelindung keseimbangan siklus hidrologi dan tata air sehingga menghindarkan manusia dari bahaya banjir maupun kekeringan;
- b. penjaga kesuburan tanah melalui pasokan unsur hara dari serasah hutan;
- c. pencegah erosi dan pengendali iklim mikro.

Keanekaragaman hayati bisa memberikan manfaat jasa nilai lingkungan jika keanekaragaman hayati dipandang sebagai satu kesatuan, dimana ada saling ketergantungan antara komponen di dalamnya.

**c) Nilai Warisan**

Nilai warisan adalah nilai yang berkaitan dengan keinginan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Nilai ini acap terkait dengan nilai sosio-kultural dan juga nilai pilihan. Spesies atau kawasan tertentu sengaja dipertahankan dan diwariskan turun temurun untuk menjaga identitas budaya dan spiritual kelompok etnis tertentu atau sebagai cadangan pemenuhan kebutuhan mereka di masa datang.



**d) Nilai Pilihan**

Keanekaragaman hayati menyimpan nilai manfaat yang sekarang belum disadari atau belum dapat dimanfaatkan oleh manusia; namun seiring dengan perubahan permintaan, pola konsumsi dan asupan teknologi, nilai ini menjadi penting di masa depan. Potensi keanekaragaman hayati dalam memberikan keuntungan bagi masyarakat di masa datang ini merupakan nilai pilihan (Primack dkk., 1998).

**e) Nilai Konsumtif**

Manfaat langsung yang dapat diperoleh dari keanekaragaman hayati disebut nilai konsumtif dari keanekaragaman hayati. Sebagai contoh dari nilai konsumtif ini ialah pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan maupun papan.

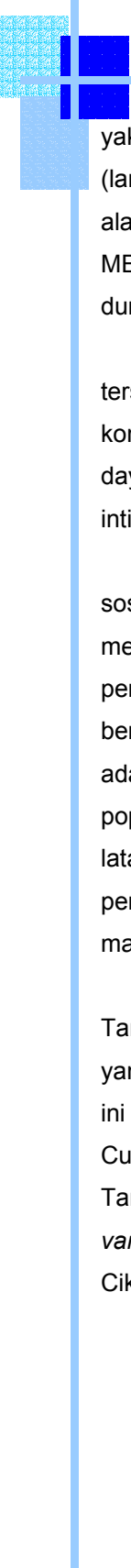
**f) Nilai Produktif**

Nilai produktif adalah nilai pasar yang didapat dari perdagangan keanekaragaman hayati di pasar lokal, nasional maupun internasional. Persepsi dan pengetahuan mengenai nilai pasar ditingkat lokal dan global berbeda. Pada umumnya, nilai keanekaragaman hayati lokal belum terdokumentasikan dengan baik sehingga sering tidak terwakili dalam perdebatan maupun perumusan kebijakan mengenai keanekaragaman hayati di tingkat global (Vermeulen dan Koziell, 2002).

## **6.2. FLORA DAN FAUNA**

Realita hidup dan kehidupan manusia tidak terlepas dari alam dan lingkungannya, karena hal tersebut merupakan hubungan mutualisme dalam tatanan keseimbangan alam dan kehidupannya (*Balancing Ecosystem*). Adapun kemampuan manusia hidup dan mempertahankan kehidupannya (*survive*) dalam rangka pengembaraannya dimuka bumi adalah sebagai proses pembentukan pribadi individu yang peka terhadap alam dan lingkungannya.

Sumber daya alam terbagi dua, yaitu SDA yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) dan yang dapat diperbaharui (*renewable*). Keanekaragaman hayati termasuk didalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Potensi sumber daya alam hayati tersebut bervariasi, tergantung dari letak suatu kawasan dan kondisinya. Pengertian istilah sumber daya alam hayati (flora dan fauna) cukup luas,



yakni mencakup sumber daya alam hayati, tumbuhan, hewan, bentang alam (landscape) dan sosial budaya. Indonesia memiliki keaneka ragaman sumber daya alam hayati yang berlimpah ruah sehingga dikenal sebagai negara MEGABIODIVERSITY. Keanekaragaman hayatinya terbanyak ke dua di seluruh dunia.

Untuk melestarikan keberadaan flora dan fauna yang dilindungi/langka tersebut agar tidak hilang atau punah, maka perlu dilakukan konservasi. Istilah konservasi mempunyai definisi pemanfaatan dan pengelolaan alam dan sumber daya alam yang bijaksana bagi kepentingan manusia. Konsep konservasi pada intinya adalah MELINDUNGI, MEMANFAATKAN DAN MEMPELAJARI.

Kegiatan konservasi mencakup beberapa sektor, yaitu sektor ilmiah, sektor sosial budaya dan sektor pengolahannya. Ke tiga sektor ini harus saling melengkapi mengikat satu sama lainnya. Sektor ilmiah melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian-penelitian dan pengamatan yang bersifat ilmiah, artinya kegiatan ini bersifat terbuka, terukur, sistematis nalar dan berkaitan dengan sistematis yang ada. Misalnya penelitian tentang satu jenis flora dan fauna tertentu, baik dari populasi atau habitatnya. Sektor sosial budaya dan ekonomi perlu dipahami, sebab latar belakang masyarakat berpengaruh terhadap perlindungan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati. Sektor pengolahan adalah bagaimana manusia mengelola sumber daya alam yang ada secara bijaksana.

Dalam kaitannya dengan keanekaragaman hayati di Kabupaten Tangerang berdasarkan data-data yang di peroleh di ketahui terdapat jenis flora yang di lindung yaitu Rambutan Parakan (*Nephellium lappaccum*). Jenis rambutan ini tersebar di beberapa tempat antara lain Cisauk, Legok, Pagedangan, Serpong, Curug, Pondok Aren, Ciputat Timur (Tabel 6.1). Demikian pula di Kabupaten Tangerang juga terdapat jenis fauna yang dilindungi yaitu Ayam Wareng (*Gallus varius*) yang tersebar di beberapa tempat seperti Legok, Pangadegan, Curug, dan Cikupa (Tabel 6.2).

Tabel 6.1. Flora Yang Dilindungi/Langka

| Kabupaten/Kota              | Tangerang        |   |
|-----------------------------|------------------|---|
| Provinsi                    | Banten           |   |
| Tahun data                  | 2007             |   |
| Nama Latin                  | Nama Lokal       | Area Penyebaran   |
| <i>Nephellium lappaccum</i> | Rambutan Parakan | Cisauk, Legok, Pagedangan, Serpong, Curug, Pondok Aren, Ciputat timur |

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Tangerang

Tabel 6.2. Fauna Yang Dilindungi/Langka

| Kabupaten/Kota       | Tangerang   |                                  |
|----------------------|-------------|----------------------------------|
| Provinsi             | Banten      |                                  |
| Tahun data           | 2007        |                                  |
| Nama Latin           | Nama Lokal  | Area Penyebaran                  |
| <i>Gallus varius</i> | Ayam Wareng | Legok, Pangadegan, Curug, Cikupa |

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Tangerang

Salah satu faktor alam yang bisa mempengaruhi kerusakan dan penyusutan keanekaragaman hayati ialah adanya perubahan habitat dari makhluk hidup yang mendiaminya, oleh karena itu, kegiatan konservasi mau tidak mau harus dilaksanakan agar tidak terjadi kepunahan dari flora dan fauna yang langka tersebut.



Gambar 6.1. Lahan bekas galian C dan penambangan pasir yang masih aktif

### 6.3. SUMBERDAYA ALAM - HUTAN

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi, ekologi dan sosial yang tinggi. Hutan alam tropika juga berfungsi sebagai paru-paru dunia dan sistem penyangga kehidupan sehingga kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan dengan pengelolaan hutan yang tepat.

Kondisi hutan, dilihat dari penutupan lahan/vegetasi, mengalami perubahan yang cepat dan dinamis, sesuai perkembangan pembangunan dan perjalanan waktu. Banyak faktor yang mengakibatkan perubahan tersebut antara lain penambahan penduduk dan pembangunan di luar sektor kehutanan yang sangat pesat memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya kebutuhan akan lahan dan produk-produk dari hutan dan terjadinya kebakaran hutan yang mengakibatkan semakin luasnya kerusakan hutan alam tropika di Indonesia.

Luas hutan di Kabupaten Tangerang berdasarkan data tahun 2005 adalah 1300, 5 Ha yang terdiri dari Taman Hutan Raya seluas 0,5 Ha dan hutan Lindung 1300 Ha, seperti terlihat pada Tabel 6.3 berikut :

Tabel 6. 3. Luas Hutan Menurut Fungsinya

Kabupaten/Kota  
Propinsi  
Tahun Data

Tangerang  
Banten  
2005

| No. | Hutan              | Luas (Ha) |
|-----|--------------------|-----------|
| A   | Kawasan Konservasi |           |
| 1   | Cagar Alam         | -         |
| 2   | Suaka Margasatwa   | -         |
| 3   | Taman Wisata       | -         |
| 4   | Taman Baru         | -         |
| 5   | Taman Nasional     | -         |
| 6   | Taman Hutan Raya   | 0.5       |
| B   | Hutan Lindung      | 1300      |
| C   | Hutan Produksi     | -         |
| D   | Hutan Kota         | -         |
|     | Total Luas Hutan   | 1300.5    |

Keberadaan hutan sangat berkaitan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, oleh karena itu ada baiknya bila areal-areal yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang dijadikan kawasan konservasi ataupun hutan kota, agar keberlangsungan keanekaragaman hayatinya tetap terjaga.



Gambar 6.2. Hutan kota

#### 6.4. REHABILITASI LAHAN

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Kegiatan rehabilitasi hutan dilakukan pada hutan-hutan yang mengalami kerusakan, dimana kerusakan hutan tersebut diperkirakan disebabkan oleh kegiatan perluasan perkebunan, kegiatan proyek-proyek pembangunan, kegiatan logging dan kebakaran.

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik. Kawasan hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok disesuaikan dengan perlakuan yang akan dilakukan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan RHL dapat berupa reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknik tergantung pada kelompok penutupan lahan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh terlihat hasil identifikasi adalah informasi jumlah pohon dan luas kawasan hutan yang dilakukan reboisasi seperti terlihat pada Table 6.4. *Reboisasi* adalah penanaman kembali daerah atau wilayah (biasanya meliputi hutan dan pantai) sebagai salah satu bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali daerah atau wilayah tersebut.

Tabel 6.4. Rencana Dan Realisasi Kegiatan Reboisasi

Kabupaten/Kota : Tangerang  
 Propinsi : Banten  
 Tahun Data : 2004

| No           | Lokasi          | Rencana                 | Jumlah Pohon | Realisasi               | Jumlah Pohon |
|--------------|-----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|              |                 | Luas (Km <sup>2</sup> ) |              | Luas (Km <sup>2</sup> ) |              |
| 1            | Desa Peusar     | 10                      | 2000         | 10                      | 2000         |
| 2            | Desa Budi Mulya | 10                      | 1900         | 10                      | 1900         |
| 3            | Desa Kranggan   | 10                      | 1800         | 10                      | 1800         |
| 4            | Desa Sunadith   | 15                      | 2100         | 15                      | 2100         |
| <b>Total</b> |                 | <b>45</b>               | <b>7800</b>  | <b>45</b>               | <b>7800</b>  |

Sumber : Kasi Konservasi Hutan, LH

Pada tahun 2004, di Kabupaten Tangerang antara rencana dan realisasi pelaksanaan reboisasi sudah berjalan sesuai rencana, dimana luas yang ditanami adalah 45 km<sup>2</sup> dengan jumlah total pohon sebanyak 7800 batang pohon yang tersebar di lokasi desa Peusar, Budi Mulya, Kranggan dan Sunadith. Di antara ke empat desa yang dilakukan reboisasi, desa Sunadith adalah areal yang terluas dengan luas 15 km<sup>2</sup> dan jumlah pohon 2100 batang.

Pelaksanaan kegiatan reboisasi ini tentunya juga berkaitan erat dengan keberlangsungan keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Tangerang. Keberhasilan kegiatan reboisasi ini tentunya juga berdampak yang positif terhadap perbaikan dari habitat tumbuhan dan hewan yang mendiaminya sehingga mereka dapat berkembangbiak secara alamiah.

## 6.5. ANALISIS PSR

### 6.5.1. PSR Primer

| Tekanan   | Kondisi   | Respon  |
|---|---|---|
| <p><b>1. Bencana Alam</b></p> <p><b>2. Konversi Lahan untuk Berbagai Kegiatan</b><br/>Perubahan penggunaan lahan dari lahan tertutup vegetasi (hutan, kebun) menjadi lahan terbuka (permukiman, pariwisata, industri, pertambangan, dll) menyebabkan beberapa hal, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ berkurangnya jenis dan jumlah populasi flora dan fauna</li> <li>▪ berkurangnya / hilangnya habitat.</li> </ul> <p><b>3. Industri Pengolahan</b><br/>Meningkatnya jumlah industri pengolahan akan mengakibatkan meningkatnya kadar polutan di udara dan meningkatnya limbah cair. Kedua hal ini bisa mempengaruhi kehidupan flora dan fauna, baik darat maupun air.</p> <p><b>4. Pertambangan</b><br/>Kegiatan penambangan khususnya galian C berupa pembukaan lahan, pengupasan lahan, pengerukan, pencucian, dll berpotensi menurunkan kualitas udara dan kualitas air permukaan akibat <i>eroded soil</i>. Hal ini bisa mempengaruhi kehidupan flora dan fauna, baik darat maupun air.</p> <p>Jumlah perusahaan galian C, data tahun 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Cisauk sebanyak 26 perusahaan</li> <li>▪ Kecamatan Mauk sebanyak 12 perusahaan</li> <li>▪ Kecamatan Panongan sebanyak 36 perusahaan</li> <li>▪ Kecamatan Pagedangan sebanyak 26 perusahaan</li> </ul> <p><b>5. Pemanfaatan Energi</b><br/>Pada saat pengoperasian pengambilan energi, akan ada peningkatan suhu dan kebisingan di sekitar lokasi. Hal ini akan mengganggu kehidupan fauna di sekitarnya.</p> <p><b>6. Pertanian</b><br/>Pemakaian pupuk secara berlebihan berpotensi untuk meningkatkan kadar pupuk di udara dan dalam air permukaan sebagai bahan pencemar. Kondisi ini mempengaruhi kehidupan flora dan fauna darat dan air.</p> <p><b>7. Perikanan Darat dan Laut.</b><br/>Penggunaan bahan kimia dalam proses penangkapan ikan akan mencemari perairan di lokasi budidaya ikan (kolam/tambak) dan perairan laut. Pencemaran ini akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna air.</p> <p><b>8. Pariwisata</b><br/>Panorama alam yang indah sangat mengundang berkembangnya kegiatan wisata, khususnya wisata alam.<br/>Kegiatan wisata perorangan yang tidak dilandasi dengan pengetahuan dan kecintaan alam yang sesungguhnya dikhawatirkan akan mengganggu dan merusak keragaman hayati, misalnya pencabutan/pemetikan tanaman, perburuan satwa, dll.</p> <p><b>11. Perilaku Manusia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegemaran berburu yang tidak mematuhi peraturan.</li> <li>▪ Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati.</li> <li>▪ Kegemaran memelihara dan mengkonsumsi binatang yang dilindungi.</li> <li>▪ Melakukan jual beli binatang yang dilindungi secara ilegal.</li> </ul> <p><b>B. Sumberdaya Air</b><br/>Merosotnya kualitas dan kuantitas sumberdaya air sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kehidupan biota air.</p> <p><b>C. Pesisir dan Laut</b><br/>Merosotnya kualitas daerah pesisir dan laut sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kehidupan biota laut.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berkurangnya jumlah populasi flora dan fauna yang dilindungi.</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah dan jenis hewan langka</li> </ul> | <p><b>Kebijakan Pembangunan Daerah (sebagai action yang dilakukan oleh pemerintah):</b></p> <p>Pengendalian kerusakan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan habitatnya secara terpadu dan berkelanjutan.</p> <p><b>Usulan penanganan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keanekaragaman hayati. Upaya ini bisa dilakukan melalui penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Konservasi dan melalui pendidikan dasar sejak tingkat sekolah dasar.</li> </ul> |



## 6.5.2. PSR Sekunder

| Tekanan   | Kondisi  | Respon   |
|---|--|--|
| <b>Bencana Alam</b>   |  |  |
| <p><b>Faktor alam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemanasan global (berpengaruh terhadap iklim: musim, angin, dll).</li> <li>▪ Gunung berapi</li> </ul> <p><b>Faktor manusia :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konversi lahan tertutup vegetasi (hutan, mangrove) menjadi lahan perumahan dan kegiatan lainnya</li> </ul>   | <p><b>State:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gempa</li> <li>▪ Tanah longsor akibat patahan</li> <li>▪ Banjir</li> <li>▪ Abrasi</li> </ul> <p><b>Impact:</b></p> <p>Secara holistic, bencana alam akan berdampak / merusak semua komponen lingkungan alam dan manusia, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumberdaya alam</li> <li>b. Pesisir dan laut</li> <li>c. Keanekaragaman hayati pesisir dan laut</li> <li>d. Kesejahteraan manusia</li> </ol>                                       | <p><b>Kebijaksanaan Pembangunan Daerah (sebagai <i>action</i> yang dilakukan oleh pemerintah):</b></p> <p>Rehabilitasi dan reboisasi lahan dan hutan</p> <p><b>Usulan penanganan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian pengetahuan pada masyarakat untuk tidak melakukan penebangan pohon secara ilegal</li> <li>▪ Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mencegah dan menanggulangi bencana alam seperti : kebakaran hutan, dan abrasi, dll.</li> <li>▪ Peraturan untuk melindungi flora dan fauna endemik</li> </ul>  |
| <b>Konversi Lahan untuk Berbagai Kegiatan</b>   |  |  |
| <p><b>Pertambangan</b></p> <p>Penambangan galian C dengan pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan sekitar</p> <p><b>Perikanan Darat dan Laut</b></p> <p>Pembukaan area pertambakan di pesisir cenderung merubah fungsi kawasan lindung pantai. Contoh: pembukaan lahan tambak di pesisir pantai utara Jawa Barat.</p> <p><b>Pariwisata</b></p> <p>Untuk meningkatkan menaikkan PAD atau meningkatkan pembangunan daerah, pembukaan kawasan wisata pantai sering melanggar ketentuan lingkungan sehingga merubah fungsi kawasan lindung pantai.</p> | <p>– Terjadi konversi lahan dari kawasan lindung sempadan (terutama pantai) menjadi kawasan terbangun (terutama untuk tambak, kawasan wisata, permukiman, dll).</p> <p><b>Impact:</b></p> <p>Secara holistik, konversi lahan termasuk berkurangnya luas lahan dengan tutupan vegetasi (khususnya hutan) akan berdampak pada beberapa sumberdaya lingkungan alam, yaitu:</p> <p><b>Keanekaragaman hayati</b></p> <p>Hilangnya ekosistem hutan dan mangrove, sehingga mengancam kelestarian jenis dan jumlah species hayati.</p> | <p><b>Kebijaksanaan Pembangunan Daerah (sebagai <i>action</i> yang dilakukan oleh pemerintah):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun rencana pemanfaatan ruang dengan berbagai skala, seperti: Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir</li> <li>• Menyusun peraturan untuk melindungi flora dan fauna yang merupakan jenis yang di lindungi</li> </ul> <p><b>Usulan penanganan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempermudah sosialisasi produk rencana tata ruang pada semua instansi dan masyarakat luas.</li> <li>▪ Mengevaluasi kembali rencana tata ruang yang sudah tidak sesuai.</li> <li>▪ Memperketat perizinan pemanfaatan ruang.</li> <li>▪ Melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan</li> </ul> |
| <b>Perikanan (Darat dan Laut)</b>   |  |  |
| <p><b>Konversi lahan</b></p> <p>Konversi hutan bakau dan daerah pesisir menjadi lahan tambak.</p> <p><b>Pesisir dan Laut</b></p> <p>Rusaknya lingkungan pesisir seperti berkurangnya luasan hutan mangrove akan menurunkan jumlah jenis flora dan fauna.</p> <p><b>Keanekaragaman hayati</b></p> <p>Rusaknya terumbu karang dan terancamnya keanekaragaman hayati laut.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telihat adanya kecenderungan berkurangnya produksi perikanan tangkap</li> </ul>   | <p><b>Kebijaksanaan Pembangunan Daerah (sebagai <i>action</i> yang dilakukan oleh pemerintah):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menerapkan penyusunan dokumen lingkungan bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran, meliputi kegiatan industri, pertambangan, transportasi, pemanfaatan energi, dll.</li> <li>▪ Pelarangan pembukaan lahan tanpa izin</li> </ul> <p><b>Usulan penanganan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pengetahuan nelayan dan petani ikan melalui penyuluhan.</li> <li>▪ Meningkatkan pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan.</li> <li>▪ Peraturan yang ketat terhadap pelaku pembukaan lahan dan penebangan pohon</li> </ul>                                |

### Penambangan

Permintaan material galian terus meningkat, seperti batu, kapur, pasir, tanah, dll.

#### **Keanekaragaman hayati**

Pengupasan lahan akan menghilangkan ekosistem hutan dan merusak kelestarian Kehati.

Penambangan galian golongan C bila tidak disertai rehabilitasi lahan mengakibatkan tanah menjadi tandus. Sehingga menyebabkan berkurangnya flora dan fauna.

#### **Kebijaksanaan Pembangunan Daerah (sebagai *action* yang dilakukan oleh pemerintah):**

Pengembangan usaha pertambangan galian C skala kecil dan bantuan pemanfaatan teknologi tepat guna.  
Pengkajian kelayakan pengembangan usaha galian C di wilayah Kabupaten Tangerang

#### **Usulan penanganan:**

- Mempublikasikan daerah-daerah yang layak untuk ditambang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dibuat.
- Membuat ketentuan penambangan secara ketat agar kegiatan penambangan dilakukan di daerah yang sudah ditentukan dan memperhatikan kaidah lingkungan.

Laut merupakan bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena laut merupakan perekat persatuan dari ribuan kepulauan Nusantara yang terbentang dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Dua pertiga dari luas wilayah Indonesia terdiri dari laut sehingga laut mempunyai arti dan fungsi strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. Laut juga memberikan kehidupan secara langsung bagi jutaan rakyat Indonesia dan secara tidak langsung memberikan kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, karakteristik laut tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diintegrasikan secara terpadu. Kebijakan pemerintah yang sektoral dan bias daratan, akhirnya menjadikan laut sebagai kolam sampah rakasa. Dari sisi sosial-ekonomi, pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan sebagai jumlah terbesar merupakan kelompok profesi paling miskin di Indonesia.

Jika berbicara laut maka satu hal yang tidak dilupakan adalah “ pesisir”. Pesisir juga tidak dapat dipisahkan dari laut sebagaimana daratan. Bahkan pesisir mempunyai arti dan fungsi tersendiri, karena pesisir merupakan wilayah yang membatasi antara laut dan darat, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Jadi boleh dikatakan disini bahwa yang menjadi perekat dan pemersatu antara lautan dan daratan adalah pesisir. Pesisir merupakan transisi antara ekosistem kehidupan laut dengan ekosistem kehidupan darat.

Kekayaan sumberdaya laut tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Kekayaan sumberdaya pesisir, antara lain terumbu karang, padang lamun, berikut sumberdaya hayati yang terdiri dari berbagai jenis ikan dan non-hayati yang terkandung di dalamnya.



## 7.1. KONDISI LINGKUNGAN PERAIRAN

Kualitas lingkungan adalah keadaan lingkungan yang diindikasikan oleh tinggi rendahnya batas kadar parameter pencemaran lingkungan, sehingga zat pencemar berada dalam batas-batas toleransi dalam lingkungan. Tinggi rendahnya batas kadar zat pencemar dipengaruhi oleh tinggi rendahnya atau fluktuasi debit air yang masuk kedalam media penerimaanya. Fluktuasi debit yang relatif stabil lebih diharapkan terjadi dan dianggap lebih baik dibandingkan dengan debit yang sangat fluktuatif. Fluktuasi debit ekstrim nilai puncaknya terjadi pada musim hujan dengan debit minimal pada musim kemarau. Batas-batas toleransi zat pencemar dituangkan dalam Baku Mutu Lingkungan, sehingga secara kualitatif kondisi wilayah yang memiliki kualitas lingkungan yang baik, juga menunjukkan sistem penunjang kehidupan (*life support system*) yang baik atau berada dalam batas-batas toleransi sistem kehidupan yang normal.

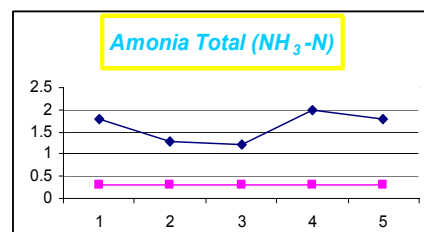
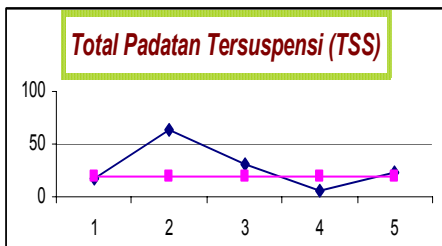
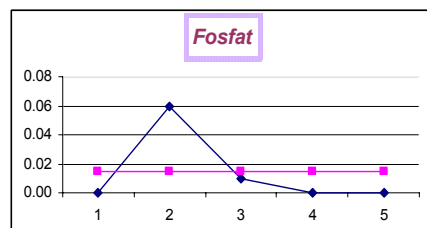
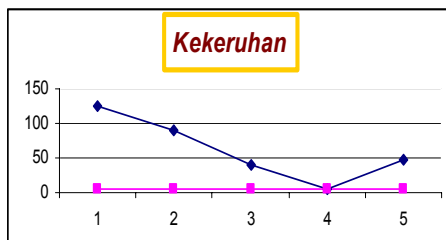
Berdasarkan pendekatan pemahaman Undang – Undang Nomor 23 tahun 1997 pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Zat pencemar yang dianalisis adalah zat pencemar yang berada dalam perairan. Media air merupakan komponen lingkungan yang sangat esensial untuk kehidupan. Sedangkan status zat pencemar dalam air relatif dapat menggambarkan karakteristik kegiatan manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam dalam wilayah yang dianalisis.

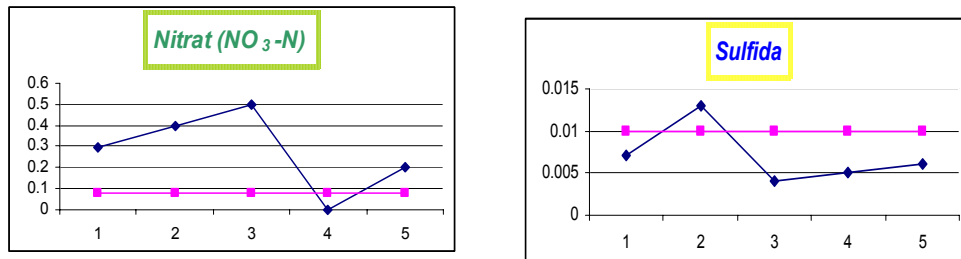
Daerah pantai/pesisir Kabupaten Tangerang saat ini telah berkembang dengan pesatnya sehingga fungsinya tidak hanya sekedar menunjang sumber pangan dan tempat berlindung nelayan, tetapi juga telah terbangun fungsi sosial akibat adanya sarana pemukiman dan wisata. Perkembangan yang menggembirakan ini dilain pihak juga akan dapat melahirkan permasalahan dan tekanan terhadap kelestarian fungsi ekosistem pesisir/daerah pantai Kabupaten Tangerang. Tekanan yang mungkin timbul antara lain: pendangkalan dan sedimentasi muara sungai, pencemaran perairan pantai, yang pada akhirnya akan dapat menurunkan kualitas wilayah pesisir/ pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya. Berdasarkan data yang di peroleh pada tahun 2006 terlihat adanya nilai konsentrasi yang sudah berada di atas ambang batas Baku Mutu, yaitu kekeruhan, TSS, fosfat, amonia, nitrat, dan sulfida.



Gambar 7.1. Pantai dan laut Tanjung Pasir

Amonia dalam perairan merupakan hasil dekomposisi dari bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen. Konsentrasi ammonia dalam air dapat mencapai kisaran 0 – 2 mg/l (Reeve, 1994). Konsentrasi yang berlebihan dapat menimbulkan masalah penurunan kualitas perairan karena pada pH netral dan basa (pH 8) ammonia bersifat racun. Sedangkan keberadaan konsentrasi nitra dan fosfat di dalam perairan yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi di perairan yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan kualitas perairan. Demikian pula konsentrasi sianida yang tinggi juga dapat menyebabkan kematian pada biota air yang mendiami habitat yang telah tercemar tersebut. Untuk lebih jelasnya di bawah ini disajikan grafik parameter air yang melebihi NAB.



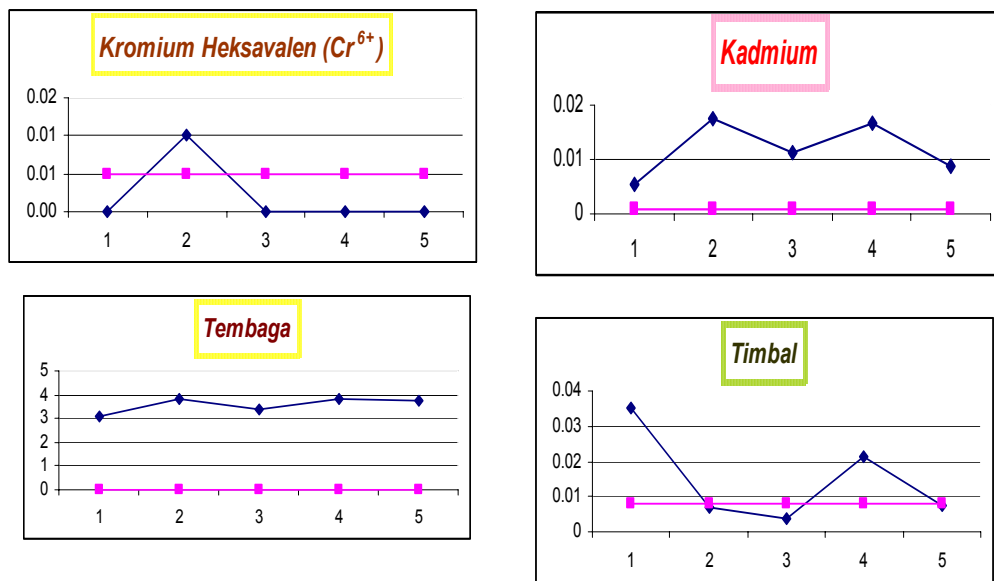


Gambar 7.2 Kualitas Air Laut yang Melebihi NAB

Keberadaan logam-logam di perairan berasal dari sumber-sumber alamiah dan dari aktivitas manusia. Sumber alamiah berasal dari pengikisan batuan mineral dan juga partikel logam yang ada di udara yang masuk ke perairan bersamaan dengan terjadinya hujan. Sedangkan logam yang berasal dari aktivitas manusia dapat berupa buangan sisa dari industri maupun rumah tangga. Logam-logam berat yang terlarut dalam badan perairan pada konsentrasi tertentu dan berubah fungsi akan menjadi sumber racun bagi kehidupan perairan

Logam-logam di lingkungan perairan umumnya berada dalam bentuk ion. Ion-ion tersebut ada yang berupa ion bebas, pasangan ion organik, ion-ion kompleks dan bentuk-bentuk ion lainnya. Kelarutan dari unsur-unsur logam dan logam berat dalam perairan dikontrol oleh pH perairan, jenis dan konsentrasi logam dan komponen mineral teroksidasi dan sistem lingkungan redoks.

Di beberapa lokasi perairan Kabupaten Tangerang, terdapat nilai konsentrasi logam berat yang telah melebihi nilai ambang batas seperti Cromium, Tembaga, Tmbal dan Kadmium. Keberadaan logam berat yang telah melebihi NAB, perlu mendapat perhatian yang serius karena logam berat dapat menyebabkan akumulasi di organ tubuh biota yang berada di dalamnya, yang pada akhirnya melalui rantai makanan akan berbahaya terhadap manusia. Gambar 7.2 memperlihatkan grafik logam berat yang telah melebihi NAB.



Gambar 7.3. Logam Berat pada Perairan Laut yang Melebihi NAB

Secara alamiah unsur-unsur logam berat terdapat di alam, namun dalam jumlah yang sangat rendah. Dalam air laut kandungan logam berat berkisar antara  $10^{-5}$  -  $10^{-2}$  ppm. Pada umumnya logam berat dibutuhkan oleh organisme hidup untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya, tetapi pada kadar tertentu bersifat racun bagi organisme perairan. Dalam jumlah yang besar, akan bersifat racun. Toksisitas logam berat ini tergantung pada kadar dan bentuk senyawa. Contohnya Cr dapat meninggikan kepekaan pada kulit. Tetapi air dengan kadar Cr = 0,05 ppm sangat kecil kemungkinannya untuk dapat menimbulkan penyakit. Disamping itu toksisitas juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan perairan tersebut, seperti pH, salinitas, suhu, DO dan adanya faktor sinergis dan antagonis dari beberapa unsur dan lain-lainnya

## 7.2 ABRASI PANTAI

Penurunan jumlah produksi ikan sangat berhubungan kerusakan pantai di lingkungan sekitarnya akibat abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut langsung menghantam pinggir pantai, secara terus-menerus. Abrasi terjadi bila gelombang dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai

penyebab utama abrasi. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan mangrove (hutan bakau) di pinggir pantai. Hutan mangrove dapat menahan gelombang dan arus laut. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan melakukan penanaman hutan mangrove.

Berdasarkan data tahun 2004, kawasan pantai di Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 7 kecamatan (Kronjo, Kemer, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kosambi) dengan total panjang pantai 50026 m, saat ini telah mengalami abrasi sepanjang 13825 m. Abrasi paling panjang terdapat di pantai Kecamatan Teluk Naga yaitu sepanjang 3325 m, secara rinci panjang pantai yang mengalami abrasi terlihat pada Tabel 7.1.

Gerusan abrasi dan terjangan gelombang pasang akan semakin semakin besar bila tidak adanya langkah efektif dan terpadu untuk menjalankan program rehabilitasi kerusakan pantai tersebut. Terjadinya gerusan pantai diakibatkan hilangnya penahan alami pantai seperti penebangan hutan mangrove. Banyak pihak belum paham bahwa hutan mangrove adalah suatu ekosistem yang kompleks tetapi labil karena merupakan pertemuan antara ekosistem lautan dan ekosistem daratan.

Dalam konteks itu habitat mangrove berperan penting sebagai basis berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lain, serta merupakan habitat berbagai jenis burung, mamalia, dan reptil. Selain itu, hutan mangrove juga merupakan produsen bahan organik yang sangat berguna untuk menunjang kelestarian biota akuatik. Selain manfaat pasti yang mencegah terjadinya abrasi dan erosi akibat gempuran ombak dan aliran sungai, hutan mangrove juga berfungsi sebagai filter biomekanis yang paling ampuh untuk mengurangi efek pencemaran lingkungan.

Tabel 7.1. Lokasi Abrasi Pantai di Kabupaten Tangerang

| No.      | Lokasi                  | Panjang (M) |             |
|----------|-------------------------|-------------|-------------|
|          |                         | Pantai      | Abrasi      |
| <b>1</b> | <b>Kecamatan Kronjo</b> |             |             |
|          | a. Muncung              | 2980        | 300         |
|          | b. Jenggot              | 990         | 350         |
|          | e. Kronjo               | 1980        | 925         |
|          | d. Pagedangan Ilir      | 990         | 650         |
|          | <b>Total</b>            | <b>6940</b> | <b>2225</b> |
| <b>2</b> | <b>Kecamatan Kemer</b>  |             |             |
|          | a. Lontar               | 1580        | 600         |
|          | b. Patra Manggata       | 3000        | 700         |
|          | c. Karang Anyar         | 3000        | 500         |
|          | <b>Total</b>            | <b>7580</b> | <b>1800</b> |



|          |                            |              |              |
|----------|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>3</b> | <b>Kecamatan Mauk</b>      |              |              |
|          | a. Mauk Barat              | 1150         | 350          |
|          | b. Ketapang                | 2300         | 500          |
|          | c. Margamulia              | 1150         | 650          |
|          | d. Tanjung Anom            | 2300         | 600          |
|          | <b>Total</b>               | <b>6900</b>  | <b>2100</b>  |
| <b>4</b> | <b>Kecamatan Sukadiri</b>  |              |              |
|          | a. Karang Serang           | <b>3000</b>  | <b>150</b>   |
| <b>5</b> | <b>Kecamatan Pakuhaji</b>  |              |              |
|          | a. Kohod                   | 2718         | 600          |
|          | b. Sukawati                | 1812         | 550          |
|          | c. Suryabahari             | 906          | 250          |
|          | d. Kramat                  | 3624         | 650          |
|          | <b>Total</b>               | <b>9060</b>  | <b>2050</b>  |
| <b>6</b> | <b>Kecamatan Teluknaga</b> |              |              |
|          | a. Tanjung Burung          | 1822         | 525          |
|          | b. Tegalangus              | 1822         | 500          |
|          | c. Tanjung Pasir           | 1500         | 1300         |
|          | d. Muara                   | 1822         | 1000         |
|          | <b>Total</b>               | <b>6966</b>  | <b>3325</b>  |
| <b>7</b> | <b>Kecamatan Kosambi</b>   |              |              |
|          | a. Kosambi Barat           | 1580         | 300          |
|          | b. Dadap                   | 3000         | 350          |
|          | c. Kosambi Timur           | 3000         | 925          |
|          | d. Salembaran              | 2000         | 600          |
|          | <b>Total</b>               | <b>9580</b>  | <b>2175</b>  |
|          |                            |              |              |
|          | <b>Total Panjang (M)</b>   | <b>50026</b> | <b>13825</b> |



Gambar 7.4. Abrasi pantai

### 7.3. REBOISASI HUTAN PANTAI

Rehabilitasi mangrove dan hutan pantai adalah upaya pengembalian fungsi ekologis dan ekonomis mangrove dan hutan pantai yang mengalami degradasi. Langkah reboisasi masih banyak yang stagnan karena berbagai faktor, di antaranya faktor koordinasi dan pengawasan yang tumpang tindih, faktor komersialisasi yang berlebihan, serta faktor alokasi dana dari pemerintah yang agak tersendat. Akibatnya, jutaan benih mangrove dan tanaman pantai lainnya gagal disemai.

Untuk program reboisasi hutan mangrove yang rusak, pemerintah dituntut segera mengeluarkan aturan teknis yang menyangkut fungsi lindung, fungsi pelestarian, dan fungsi produksi. Dengan reboisasi hutan mangrove yang tepat waktu, fungsi pengaturan tata air dapat diperbaiki, polusi dan intrusi air laut dapat dicegah, pantai dilindungi dari abrasi, dan kelestarian habitat biota laut bisa dipertahankan.

Tabel 7. 2. Rencana Dan Realisasi Kegiatan Reboisasi Hutan Pantai tahun 2007

| No | Lokasi                       | Rencana   | Jumlah Pohon | Realisasi | Jumlah Pohon |
|----|------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|    |                              | Luas (Ha) |              | Luas (Ha) |              |
| 1  | Pusat Pemerintahan Tigaraksa | 5         | 2500         | 3.5       | 1950         |
| 2  | Kecamatan                    | 3         | 1500         | 2         | 750          |
|    | <b>Total</b>                 |           | <b>4000</b>  |           | <b>2700</b>  |

Sumber : Kasi Konservasi Hutan, LH

Pelaksanaan kegiatan reboisasi hutan pantai di Kabupaten antara rencana dan realisasi belum dapat berjalan dengan optimal, seperti terlihat pada Tabel 7.2. Terlihat bahwa di Pusat pemerintahan luas yang direncanakan adalah 5 Ha, tetapi yang terealisasi hanya 3,5 Ha (70%) dari rencana, sedangkan rencana jumlah pohon yang akan ditanam sebanyak 2500 pohon, yang terelisasi hanya 1950 pohon (78%). Demikian pula dilokasi yang berada di kecamatan, luas rencana yang ditanami adalah 3 Ha, terealisasi 2 Ha (66,7%), sedangkan jumlah pohon yang direncanakan 1500 pohon, teralisasi hanya 750 pohon (50%) saja.

#### 7.4. PRODUKSI PERIKANAN

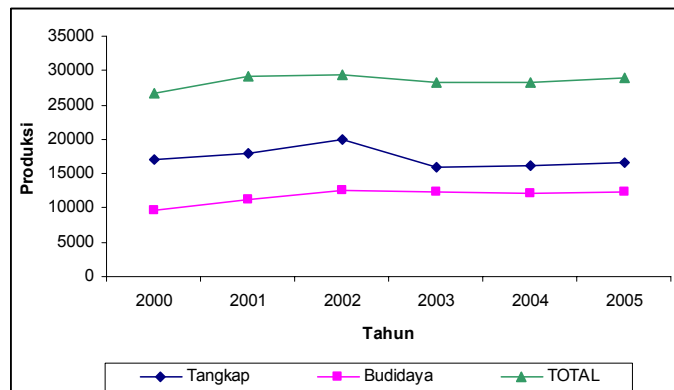
Wilayah pesisir adalah identik dengan wilayah nelayan, maka pemenuhan kebutuhan masyarakatnya sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam laut /perairan pantai. Kegiatan perikanan di Kabupaten Tangerang terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perkembangan produksi perikanan di perairan laut Kabupaten Tangerang terlihat pada Tabel 7.3 berikut ini. Jumlah hasil produksi perikanan tangkap terlihat lebih besar daripada hasil perikanan budidaya.

Dilihat dari perkembangannya, hasil produksi perikanan tangkap pada tahun 2000 sampai 2002 cenderung meningkat sampai 19.999,55 ton, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2003 sampai 15.873 ton, tetapi pada tahun berikutnya mengalami peningkatan kembali sampai pada tahun 2005 menghasilkan 16.563 ton ikan.

Selanjutnya, hasil produksi perikanan budidaya terlihat cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana hasil yang terbesar berasal dari perikanan tambak. Dengan demikian perkembangan produksi perikanan totalpun cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 7.3. Perkembangan Data Produksi Ikan

| No. | Jenis Usaha          | Produksi (Ton)  |                 |                  |                 |                 |                 |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                      | 2000            | 2001            | 2002             | 2003            | 2004            | 2005            |
| I.  | <b>Penangkapan :</b> |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|     | 1 Laut               | 16895,0         | 17725,70        | 16834,25         | 15731,00        | 16045,50        | 16532,70        |
|     | 2 Perairan Umum      | 130,0           | 123,0           | 165,3            | 142,0           | 96,50           | 30,90           |
|     | <b>Subtotal</b>      | <b>17025,00</b> | <b>17848,00</b> | <b>19.999,55</b> | <b>15873,00</b> | <b>16142,00</b> | <b>16563,00</b> |
| II  | <b>Budidaya :</b>    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|     | 1 Tambak             | 7496,9          | 6405,2          | 7294,54          | 7286,00         | 7287,10         | 7309,50         |
|     | 2 Kolam              | 2091,6          | 2193,4          | 2130,40          | 1979,20         | 1884,00         | 2096,40         |
|     | 3 Sawah              | 63,8            | 11,5            | 10,56            | 8,00            | 9,60            | 15,10           |
|     | 4 Jaring apung       | -               | 79,2            | 223,60           | 196,00          | 119,50          | 79,50           |
|     | 5 Budidaya Laut      | -               | 2603,0          | 2843,00          | 2860,00         | 2874,50         | 2830,00         |
|     | <b>Subtotal</b>      | <b>9652,3</b>   | <b>11292,3</b>  | <b>12502,1</b>   | <b>12329,2</b>  | <b>12174,7</b>  | <b>12330,5</b>  |
|     | <b>TOTAL</b>         | <b>26677,30</b> | <b>29141,00</b> | <b>29501,65</b>  | <b>28202,20</b> | <b>28316,70</b> | <b>28894,10</b> |



Gambar 7. 5. Perkembangan Produksi Perikanan

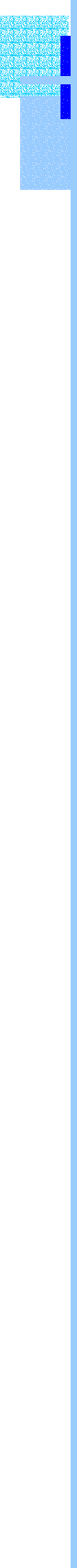
Menurunnya jumlah produksi perikanan tangkap, diperkirakan karena pengelolaan sumberdaya alam belum dilakukan dengan optimal, dimana masalah sentral yang mendasar dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah :

1. Kerusakan sumberdaya habitat
2. Indikasi penurunan populasi sumberdaya ikan baik kualitas maupun kuantitas
3. Lemahnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam mengelola sumberdaya perairan
4. Belum optimalnya peranan dan kinerja dari lembaga-lembaga yang berfungsi dalam pengawasan terhadap peraturan perikanan

## 7.5. PENGELOLAAN PESISIR

Perkembangan pembangunan seperti perumahan, penambangan Galian C, pergundangan, kawasan pariwisata mall, industri dll menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, mempersempit lahan terbuka hijau, eksploitasi sumberdaya, terjadinya banjir, kekeringan, erosi dan abrasi serta menurunnya kualitas hidup akibat pencemaran.

Untuk mengurangi dampak lingkungan, perlu adanya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tangerang seksi Konservasi Hutan dan Lahan Kritis telah melakukan Sosialisasi Pembinaan Masyarakat Pesisir Pantai.



Maksud kegiatan pembinaan masyarakat pesisir pantai adalah

1. Agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam penanganan kerusakan pantai
2. Agar masyarakat dapat memelihara pelestarian sumber daya laut dan pantai
3. Pencemaran air laut dapat berkurang akibat pembuangan limbah dan sampah
4. Berkurangnya abrasi akibat penggalian pasir laut dan pengrusakan hutan bakau yang ada

Tujuan kegiatan

Agar masyarakat mengerti dari kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan berakibat dan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungannya.

## 7.6. ANALISIS PSR

### 7.6.1. PSR Primer

| Tekanan   | Kondisi   | Respon   |
|---|---|--|
| <p><b>1. Bencana Alam</b></p> <p><b>2. Konversi Lahan untuk Berbagai Kegiatan</b><br/>Perubahan penggunaan lahan di daerah pantai yang melanggar sempadan pantai akan merusak dan mengurangi areal hutan bakau, misalnya: pembangunan industri, pembangunan kawasan wisata, tambak, dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi pertumbuhan sektor industri yang beraglomerasi di daerah pantai</li> <li>- Terjadi pertumbuhan hotel dan daerah wisata pantai.</li> </ul> <p><b>3. Industri Pengolahan</b><br/>Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang banyak beraglomerasi dan tumbuh di daerah pantai akan mencemari daerah pesisir/pantai dan laut.</p> <p><b>4. Pertambangan</b><br/>Usaha penambangan yang dilakukan di sekitar pesisir pantai akan meningkatkan laju sedimentasi.</p> <p><b>5. Pemanfaatan Energi</b><br/>Eksplorasi minyak bumi di lepas pantai berpotensi mencemari air laut, baik dari kegiatan pengeborannya maupun dari kegiatan penunjangnya</p> <p><b>7. Perikanan Darat dan Laut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceceran bahan bakar dari motor boat yang dipergunakan oleh nelayan berpotensi mencemari air laut.</li> <li>- Penggunaan bahan kimia dalam proses penangkapan ikan.</li> </ul> <p><b>8. Pariwisata</b><br/>Pembangunan objek wisata di pantai cenderung mengabaikan kawasan lindung sempadan pantai, sehingga merusak hutan bakau.</p> <p><b>9. Transportasi</b><br/>Bongkar muat minyak ke/dari kapal tanker yang dilakukan di lepas pantai berpotensi mencemari perairan laut.</p> <p><b>11. Perilaku Manusia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan lahan pesisir yang tidak mengindahkan kaidah konservasi mengakibatkan degradasi lahan hutan bakau, kerusakan terumbu karang, abrasi.</li> <li>- Metoda penangkapan ikan dengan menggunakan peledak akan merusak terumbu karang.</li> <li>- Penebangan hutan bakau untuk bahan kayu bakar yang dilakukan penduduk pantai.</li> </ul> <p><b>B. Sumberdaya air</b><br/>Tingginya kadar pencemar dalam air sungai akan mencemari kualitas air laut.</p> | <p><b>Status:</b><br/>- Berkurangnya luas hutan bakau.</p> <p>Lokasi terjadinya abrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Kronjo sepanjang 2225 m</li> <li>2. Kecamatan Kemeru sepanjang 1800 m</li> <li>3. Kecamatan Mauk sepanjang 2100 m</li> <li>4. Kecamatan Sukadiri sepanjang 150 m</li> <li>5. Kecamatan Pakuhaji sepanjang 2050 m</li> <li>6. Kecamatan Teluknaga sepanjang 3325 m</li> </ol> <p><b>Dampak:</b><br/>Kerusakan pesisir dan laut akan berdampak secara langsung pada hal-hal berikut:</p> <p><b>B. Sumberdaya Air</b><br/>Intrusi air laut ke dalam air tanah semakin meluas.</p> <p><b>F. Keanekaragaman hayati;</b><br/>Merosotnya kualitas air laut akan mengganggu ekosistem biota laut dan merusak terumbu karang</p> <p><b>G. Kesejahteraan manusia;</b><br/>Merosotnya kualitas air laut akan mengurangi hasil tangkapan ikan yang berarti menurunnya penghasilan. Rusaknya lahan pesisir akan mempercepat abrasi yang mengancam lahan pantai.</p> | <p><b>Kebijakan Pembangunan Daerah (sebagai <i>action</i> yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keharusan penyusunan dokumen lingkungan bagi kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, termasuk pencemaran air laut.</li> <li>▪ Menanggulangi abrasi secara parsial dan temporer dengan melakukan rehabilitasi hutan pantai dengan melakukan reboisasi atau dengan menggunakan teknik-teknik konstruksi sederhana.</li> <li>▪ Perlindungan mutu laut melalui penetapan status mutu laut dan pedoman teknis penilaian status mutu laut provinsi Banten</li> </ul> <p><b>Usulan penanganan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perlunya penerapan pemanfaatan ruang yang baik melalui perencanaan tata ruang, sehingga bisa mencegah pelanggaran daerah sempadan pantai, baik untuk kegiatan industri, wisata, tambak, dll.</li> <li>▪ Memperketat perizinan pembangunan di daerah pantai/pesisir dan di lepas pantai, termasuk persyaratan untuk mengkaji kesesuaian lingkungan dengan menyusun dokumen lingkungan.</li> <li>▪ Memperketat pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam dokumen lingkungan, termasuk memperketat persyaratan pengadaan IPAL.</li> <li>▪ Mengembalikan fungsi sempadan pantai sebagai fungsi lindung melalui reboisasi hutan bakau, karena hutan bakau adalah pelindung abrasi terbaik dibandingkan dengan teknik konstruksi.</li> </ul> |

## 7.6.2. PSR Sekunder

| Tekanan  | Kondisi  | Respon   |
|--|--|--|
| <b>Bencana Alam</b>  |  |  |
| <p><b>Faktor alam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemanasan global (berpengaruh terhadap iklim: musim, angin, dll).</li> <li>▪ Struktur geologi.</li> <li>▪ Gunung berapi</li> </ul> <p><b>Faktor manusia :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konversi lahan tertutup vegetasi (hutan mangrove) menjadi lahan tambak udang dan ikan (kawasan terbangun).</li> <li>▪ Peangkapan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan laut</li> <li>▪ Keterbatasan pengetahuan masyarakat awam terhadap pemakaian bahan-bahan peledak dalam penangkapan ikan dilaut.</li> </ul> | <p><b>State:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gempa</li> <li>▪ Tanah longsor akibat patahan</li> <li>▪ Tsunami</li> <li>▪ Abrasi</li> </ul> <p><b>Impact:</b></p> <p>Secara holistic, bencana alam akan berdampak / merusak semua komponen lingkungan alam dan manusia, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumberdaya alam</li> <li>b. Pesisir dan laut</li> <li>c. Keanekaragaman hayati pesisir dan laut</li> <li>d. Kesejahteraan <b>manusia</b></li> </ol>   | <p><b>14. Kebijakan Pembangunan Daerah (sebagai <i>action</i> yang dilakukan oleh pemerintah):</b></p> <p><b>Rehabilitasi</b></p> <p><b>Usulan penanganan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian pengetahuan pada masyarakat terhadap bahan-bahan / peralatan berbahaya dan eksplosive sejak pendidikan dasar (SD).</li> <li>▪ Penyuluhan kepada masyarakat awam mengenai : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ pemakaian peralatan rumah tangga yang mudah menimbulkan bahaya (misalnya kompor gas).</li> <li>○ upaya penyelamatan diri saat terjadi bencana kebakaran, banjir, gempa, dll.</li> </ul> </li> <li>▪ Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mencegah dan menanggulangi bencana alam seperti : kebakaran hutan, banjir, dll.</li> <li>▪ Membentuk tim penyelamatan korban bencana secara tangguh, dengan bekerja sama dengan instansi terkait.</li> </ul> |
| <b>Konversi Lahan untuk Berbagai Kegiatan</b>  |  |  |
| <p><b>Keanekaragaman hayati</b></p> <p>Pembukaan lahan untuk keperluan permukiman akan mengurangi habitat dari flora fauna yang berada di dalamnya</p> <p><b>Perikanan Darat dan Laut</b></p> <p>Pembukaan area pertambakan di pesisir cenderung merubah fungsi kawasan lindung pantai.</p>  | <p><b>State:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terjadi penurunan luasan dari lahan menyebabkan berkurangnya populasi flora dan fauna</li> <li>▪ Terjadi konversi lahan dari kawasan lindung sempadan (terutama pantai) menjadi kawasan terbangun (terutama untuk tambak, kawasan wisata, permukiman, dll).</li> </ul> <p><b>Impact:</b></p> <p>Secara holistik, konversi lahan termasuk berkurangnya luas lahan dengan tutupan vegetasi (khususnya mangrove) akan berdampak pada beberapa sumberdaya lingkungan alam, yaitu:</p> <p><b>Pesisir dan laut</b></p> <p>Berkurangnya fungsi dan peran hutan bakau sebagai penyangga gelombang laut dari abrasi di sepanjang pantai</p> | <p><b>14. Kebijakan Pembangunan Daerah (sebagai <i>action</i> yang dilakukan oleh pemerintah):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun rencana pemanfaatan ruang dengan berbagai skala, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir</li> </ul> </li> <li>▪ Menyusun peraturan untuk melindungi flora dan fauna yang merupakan jenis yang di lindungi</li> </ul> <p><b>Usulan penanganan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempermudah sosialisasi produk rencana tata ruang pada semua instansi dan masyarakat luas.</li> <li>▪ Mengevaluasi kembali rencana tata ruang yang sudah tidak sesuai.</li> <li>▪ Memperketat perizinan pemanfaatan ruang.</li> <li>▪ Melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan</li> </ul>  |
| <b>Perikanan (Darat dan Laut)</b>  |  |  |
| <p><b>Konversi lahan</b></p> <p>Konversi hutan bakau dan daerah pesisir menjadi lahan tambak.</p> <p><b>Pesisir dan Laut</b></p> <p>Rusaknya lingkungan pesisir termasuk hutan bakau dan menurunnya kualitas air laut permukaan (lihat P-S-R D. Pesisir dan Laut).</p> <p><b>Keanekaragaman hayati</b></p> <p>Rusaknya terumbu karang dan terancamnya kehati laut (lihat P-S-R. F. Keanekaragaman hayati).</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teliat adanya kecenderungan berkurangnya produksi perikanan tangkap</li> </ul>  | <p><b>14. Kebijakan Pembangunan Daerah (sebagai <i>action</i> yang dilakukan oleh pemerintah):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menerapkan penyusunan dokumen lingkungan bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran, meliputi kegiatan industri, pertambangan, transportasi, pemanfaatan energi, dll.</li> </ul> <p><b>Usulan penanganan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pengetahuan nelayan dan petani ikan melalui penyuluhan.</li> <li>▪ Meningkatkan pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan</li> </ul>   |

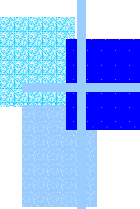
| <b>Pariwisata</b>   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Konversi Lahan untuk Berbagai Kegiatan</b></p> <p>Kegiatan wisata khususnya yang berupa resort akan membutuhkan lahan dalam jumlah relatif luas dan berpanorama indah, seperti pantai, kawasan perbukitan/pegunungan, dll. Keindahan di Kabupaten Tangerang dapat dikembangkan dikembangkan menjadi objek pariwisata.</p> | <p><b>State:</b><br/>Sektor wisata cukup berperan dalam PAD Kabupaten Tangerang</p> <p><b>Impact:</b><br/>Meningkatnya sektor pariwisata akan diikuti dengan berbagai dampak ikutan (<i>following impacts</i>), yaitu:</p> <p><b>Pesisir dan laut</b><br/>Pembangunan kawasan wisata berupa resort di kawasan pantai berpotensi mengganggu kawasan lindung sempadan pantai, baik dari kegiatan pembangunan fisiknya maupun dari kegiatan manusianya</p> <p><b>Keanekaragaman hayati</b><br/>Wisata pantai dan laut dilakukan secara individual tanpa didasari pengetahuan dan kecintaan terhadap alam dikhawatirkan akan merusak / mengganggu habitat dan kehidupan flora dan fauna</p> | <p><b>16. Kebijakan Pembangunan Daerah (sebagai action yang dilakukan oleh pemerintah):</b></p> <p>a. Visit Indonesia Year<br/>b. Sapta Pesona</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mewajibkan penyusunan dokumen lingkungan dan menerapkan pengelolaan lingkungan antara lain berupa sistem penanganan limbah.</li> <li>▪ Peningkatan dan penataan daya tarik potensi-potensi wisata pantai dan laut di Kab. Tangerang</li> <li>▪ Peningkatan kualitas SDM pariwisata Kab. Tangerang.</li> <li>▪ Pengembangan kemitraan kebudayaan dan pariwisata Kab. Tangerang.</li> </ul> <p><b>Usulan penanganan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperketat perizinan pemanfaatan ruang.</li> <li>- Melakukan pengelolaan sampah dan limbah.</li> </ul> |
| <b>Transportasi</b>   |   |   |
| <p><b>Pesisir dan Laut</b></p> <p>Transportasi antar pulau-pulau sekitar yang berpotensi pula mencemari perairan pantai dan laut dan pencucian kapal-kapal nelayan yang berlabuh di tepi pantai</p>   | <p>- Transportasi antar pulau berpotensi menghasilkan polutan ke perairan berupa minyak dan oli, sehingga menurunkan kualitas perairan</p>  | <p><b>14. Kebijakan Pembangunan Daerah (sebagai action yang dilakukan oleh pemerintah):</b></p> <p>Melakukan pengelolaan limbah minyak dan oli secara terpadu</p> <p><b>Usulan penanganan:</b></p> <p>Mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan limbah minyak dan oli serta sampah</p>  |



## REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

Berdasarkan analisis dari pendekatan PSR, maka arah kebijakan lingkungan yang diambil sebaiknya lebih meningkatkan response pada aspek-aspek utama yang menjadi isu penting yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi status lingkungan hidup Kabupaten Tangerang Barat. Arahan tersebut menyangkut aspek-aspek berikut ini :

1. Kualitas dan kuantitas air sangat dipengaruhi oleh aktivitas sekitarnya serta kondisi perubahan tata guna lahan dibagian hulunya. Perubahan tata guna lahan, tingkat kepadatan dan aktivitas yang tinggi secara langsung akan mengakibatkan perubahan pada kualitas air. Konservasi sumberdaya air dimaksudkan sebagai usaha dalam menjaga pelestarian sumberdaya air untuk kegiatan pembangunan di masa datang. Berdasarkan identifikasi bahwa permasalahan pelestarian sumberdaya alam pada dasarnya disebabkan oleh ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam untuk kegiatan ekonomi dengan aspek kelestarian lingkungan hidup.
2. kondisi udara di Tangerang secara kualitas masih di bawah Nilai Ambang Batas. Akan tetapi ada kekhawatiran apabila tidak dilakukan tindakan pengendalian, akan terjadi pencemaran udara. Kekhawatiran ini timbul karena dampak yang ditimbulkan oleh kualitas udara yang buruk dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk penyakit ISPA. Kejadian penyakit ISPA di Kabupaten Tangerang cukup banyak. Sebagai respon selain diterapkannya dengan ketat peraturan yang ada juga melakukan berbagai aktivitas seperti melakukan Program Langit Biru, melakukan pengujian emisi pada saat pengujian kendaraan, mensyaratkan penyusunan AMDAL /UKL-UPL pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara dan melakukan reboisasi
3. Keberadaan hutan, kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau dibutuhkan untuk mengatasi terjadinya lahan kritis. Lahan kritis perlu dicermati karena dapat menyebabkan terjadinya bencana longsor dan banjir. Respon pengendalian lahan dan hutan, baik kebijakan maupun program, adalah menyusun perencanaan tata ruang, dimana di dalamnya telah ditetapkan

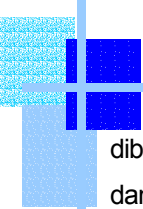


---

batas-batas kawasan lindung, kawasan yang boleh berubah fungsi, dll, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan dan perkebunan yang berwawasan lingkungan, pembinaan dan pengendalian perusahaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan hutan lintas kabupaten dan melakukan reklamasi dan reboisasi pada lahan kritis, termasuk bekas area penambangan

4. Pengendalian terhadap kerusakan lingkungan pada aspek keanekaragaman hayati hendaknya juga mendapat porsi perhatian pada arahan kebijakan pengendalian lingkungan di Kabupaten Tangerang. Keanekaragaman yang sangat rendah pada umumnya di sebabkan karena pengurangan luas lahan dan hutan dengan sendirinya akan mengurangi jumlah populasi flora fauna, terutama bagi jenis yang langka dan dilindungi akibat dari berkurangnya habitat. Kekayaan alam yang tak ternilai harganya ini merupakan sumberdaya plasma nutfah yang tak terpebaharui. Jika Kabupaten Tangerang kehilangan sumberdaya ini, berarti cadangan kekayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menurun baik secara kualitatif maupun kuantitatif karena sumberdaya keanekaragaman hayati berupa plasma nutfah yang original dan spesifik sangat bermanfaat sebagai sumber bahan pangan, industri, kosmetika, obat-obatan, estetika, dll.
5. Penanganan masalah pesisir dan lautan hendaknya terintegrasi dengan penanganan masalah konservasi lahan, penataan ruang dan pengendalian pencemaran. Masalah yang dihadapi oleh pesisir dan ekosistem laut Kabupaten Tangerang merupakan tekanan yang disebabkan oleh terjadinya abrasi, erosi, sedimentasi dan yang bersifat intervensi manusia seperti pembukaan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan tambak. Pencemaran terhadap ekosistem laut, baik yang bersumber dari kegiatan domestik, industri, perikanan, maupun pariwisata memperlihatkan laju yang semakin tinggi terutama di wilayah perairan pantai Kabupaten Tangerang yang banyak dimanfaatkan untuk kepentingan industri (terutama penambangan migas), perhubungan, tambak dan buangan domestik serta industri.

Pertumbuhan penduduk perkotaan yang sangat cepat terutama akibat adanya urbanisasi penduduk dari desa ke kota, akan menimbulkan berbagai masalah seperti perubahan pemanfaatan lahan, penambahan kebutuhan akan sumberdaya pangan, meningkatnya pencemaran dan ketidak seimbangan fungsi kota. Kota perlu



---

diberdayakan keberadaannya dengan cara meningkatkan roda perekonomian, kesehatan dan pendidikan warganya. Oleh karena itu harus dicari terobosan yang dapat menghasilkan sinergi yang baik antara masyarakat kota sehingga keseimbangan kota dapat dipertahankan.

Pengelolaan lingkungan merupakan rangkaian dari upaya untuk mencegah kerusakan yang bersifat permanen maupun tidak permanen dan menjaga keberlangsungan kehidupan. Bagian yang harus dijaga tersebut meliputi keseluruhan aspek kehidupan seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, energi dan semua material yang kita perlukan dan kesemuanya akan menghasilkan limbah. Lingkungan harus dijaga agar tetap survive dimana harus ada perencanaan yang baik untuk mencegah kerusakan dan menjaga lingkungan alami dari aktivitas manusia. Prinsip dasar dalam pengelolaan kualitas lingkungan adalah menjaga keseimbangan bahan dan melestarikan aliran/siklus. Dalam pengelolaan lingkungan, harus ada keseimbangan ekonomi dan ekologi dimana upaya pembangunan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dilakukan tanpa merusak lingkungan

Penyebab munculnya potensi bencana lingkungan adalah karena adanya kesenjangan besar antara ilmu dan teknologi untuk memproduksi barang konsumtif dengan upaya pengelolaan lingkungan. Beberapa kegagalan yang dapat diidentifikasi yang menyebabkan perubahan pada lingkungan adalah :

1. Kegagalan penekanan pada pertumbuhan kuantitatif bukan pada kualitatif yang menyebabkan tumbuhnya kebiasaan peningkatan perkapita
2. Kegagalan dari sistem ekonomi yang menghitung biaya sosial dan biaya lingkungan kedalam biaya produksi
3. Kegagalan memasukkan faktor lingkungan kedalam sistem pengambilan keputusan
4. Kegagalan kelembagaan mengatasi faktor-faktor lintas pelaku
5. Selalu tergantung pada yang mudah
6. Kegagalan untuk melihat lingkungan sebagai sistem kesatuan

Mutu hidup dijabarkan dengan persamaan sebagai berikut:

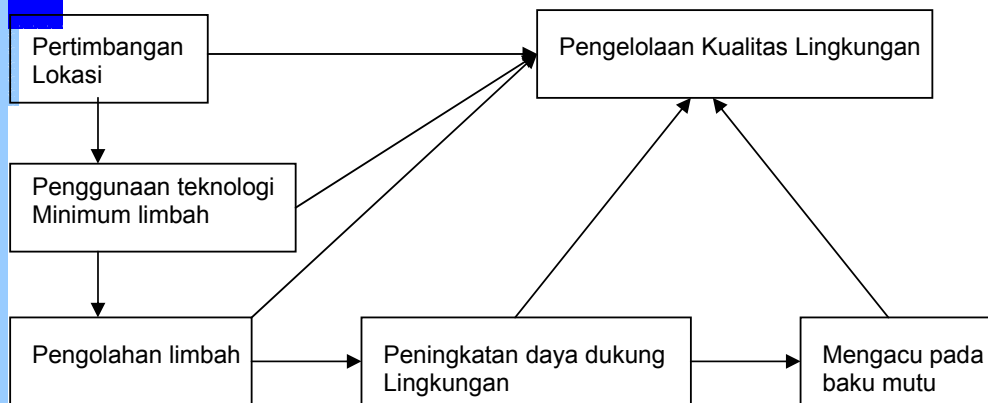
$$\text{Mutu hidup} = \frac{\text{Jumlah sumber alam yang tersedia}}{[\Delta \text{ Jumlah penduduk}] [\text{Konsumsi sda/kap}]}$$



## 8.1. STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pemanfaatan yang berlebih pada sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui akan menyebabkan habisnya cadangan sumberdaya alam tersebut. Sedangkan pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dengan tidak memperhatikan kemampuan kecepatan pembaharuan diri juga akan mengakibatkan kerusakan, pencemaran dan kepunahan. Sebagai contoh, penebangan hutan secara tidak terkendali akan menyebabkan hutan menjadi rusak dan merangas. Meskipun tanaman pada hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui namun memerlukan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Kerusakan hutan selain menyebabkan perubahan pada kesuburan tanah juga menghilangkan plasma nutfah pada ekosistem tersebut. Contoh lain adalah pencemaran dan pengurangan jumlah yang berlangsung secara signifikan pada ekosistem perairan seperti sungai, situ dan waduk. Sungai dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, peternakan, suplai air minum penduduk kota, keperluan industri maupun sebagai penggerak turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Ketidaktahuan sebagian manusia akan fungsi sungai dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan tingginya kerusakan yang terjadi pada sungai baik langsung maupun tidak langsung. Banyak terlihat, perubahan fungsi lahan pada bantaran sungai akan menyebabkan tingginya air limpasan yang masuk ke sungai disertai dengan partikel tanah yang berpotensi menyebabkan pendangkalan dan akibat berikutnya adalah terjadinya banjir. Sedangkan pembuangan limbah cair yang tidak terolah atau pembuangan lingkungan selain akan merubah kualitas air juga akan menghambat arus. Yang dirasakan oleh penduduk adalah berkurangnya jumlah air bersih.

Prinsip penataan lingkungan bertujuan agar masyarakat dapat bersinergi dengan alam dan secara umum kualitas hidup dapat ditingkatkan. Penataan lingkungan yang baik adalah bila daya dukung lingkungan dapat mencukupi kebutuhan hidup manusia. Bila lingkungan tidak tertata, kumuh dan kotor, berbagai penyakit akan datang dan permasalahan sosial akan berkembang sebagai dampak dari upaya mempertahankan hidup. Adanya kebutuhan ruang semakin dirasa bagi penduduk di perkotaan, akibatnya ruang terbuka hijau semakin berkurang. Padahal ruang terbuka hijau berfungsi sebagai paru-paru kota, daerah resapan air dan fungsi sosial. Disamping itu jumlah limbah yang dihasilkan juga semakin banyak dan beragam. Kesadaran masyarakat serta dukungan dari berbagai insitusi pemerintah perlu ditingkatkan untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman dan aman



Gambar 8.1. Strategi Pengelolaan Lingkungan

Esensi yang paling utama dari sistem ini ialah harus berbasis pada masyarakat, karena masyarakatlah sebagai pengelola lingkungan dan masyarakat pula yang akan menikmati lingkungan bersih dan higienis bila persoalan lingkungan bisa ditangani secara baik.

## 8.2. KONSEP PEMBANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN

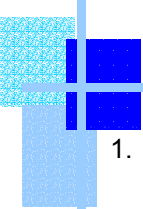
Pengembangan pembangunan ramah lingkungan diharapkan melalui pendekatan lingkungan. Masalah yang penting untuk diperhatikan adalah efisiensi energi, reduksi dampak lingkungan dari adanya permukiman, penggunaan air, kualitas udara serta sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas.

### 8.2.1. Perlindungan terhadap sumber daya air

Sumber daya air memiliki peran ganda yaitu sebagai penunjang sistem ekonomi (*resources based economy*) dan sebagai penunjang sistem kehidupan (*life support system*). Pengelolaan sumber daya air terpadu (*Integrated Water Resources Management*) harus ditunjang oleh berbagai faktor seperti:

1. Lingkungan yang menunjang (*enabling environment*) seperti kebijakan dan peraturan perundangan,
2. Kerangka institusi (*institutional framework*), seperti institusi sektoral di semua tingkatan, institusi pelaksana pembangunan, kelompok pengguna dan kelompok pendukung seperti akademisi dan LSM,
3. Instrumen manajemen (*management instrument*), seperti alat perencanaan, sistem monitoring, prasaran air dan sebagainya.

Kegiatan fisik pengelolaan SDA dilakukan dengan cara :

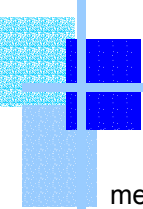
- 
1. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumberdaya dan daerah di sekitarnya
  2. Melakukan pencegahan terhadap timbulnya lahan kritis serta memberikan rekomendasi upaya-upaya yang harus ditempuh untuk pemulihannya
  3. Melakukan pencegahan terhadap pencemaran air
  4. Melindungi dan mengembangkan sumber<sup>2</sup> air melalui upaya peningkatan kapasitas suplai (*recharge*) ke tampungan air (*water storage*)

Sumur resapan merupakan teknologi ramah lingkungan, dimana masyarakat dapat terlibat aktif dalam upaya konservasi air. Sumur resapan dapat dibuat secara komunal dalam suatu permukiman maupun individual di areal satu rumah. Air yang berasal dari aktivitas rumah tangga maupun air hujan, dialirkan menuju suatu lubang yang telah dibuat untuk ditampung dan diresapkan ke dalam tanah. Sehingga diharapkan cadangan air dapat tetap terjaga. Selain itu air yang tertampung dalam sumur resapan tersebut dapat digunakan kembali, karena air telah tersaring secara alamiah.

#### **8.2.2. Pengelolaan sampah dengan konsep zero waste**

Sampah atau limbah padat merupakan hasil samping dari kegiatan manusia. Peningkatan jumlah penduduk yang dibarengi dengan peningkatan aktivitas menyebabkan kualitas dan kuantitas sampah terus bertambah. Karakteristik sampah dipengaruhi oleh asal sampah dimana sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar pertanian, peternakan dan industri pangan umumnya kaya akan bahan organik. Sedangkan sampah yang berasal dari aktivitas perkantoran, industri non pangan umumnya berupa sampah organik sukar terurai dan sampah organik.

Di kota besar sampah dari aktivitas tersebut kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah untuk kemudian dilakukan penanganan. Artinya disini adalah masalah penanganan sampah ternyata tidak mudah, melibatkan banyak pihak, memerlukan teknologi, memerlukan dana yang cukup besar dan lahan yang cukup luas untuk menampung jumlah sampah yang kian hari kian menumpuk terutama bagi negara dimana teknologi penanganan sampah masih sangat mahal. Pembuangan sampah dapat berarti pencemaran lingkungan. Efeknya makin lama juga makin terasa karena sampah kota akan semakin banyak, sementara lahan pembuangan makin sempit. Beberapa cara penanganan sampah yang biasa dilakukan adalah penumpukan (*dumping*), untuk pakan, pengomposan, pembakaran (*incenerator*) dan sanitasi dalam tanah (*sanitary landfill*).



---

Konsep zero waste adalah penanganan sampah dari sumber yang bertujuan meminimumkan jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah. Dengan memanfaatkan sampah menjadi bahan berguna, kecepatan penumpukan sampah di TPA dapat diperlambat. Konsep zero waste melibatkan masyarakat. Sampah yang dihasilkan dari permukiman telah dipilah menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Berbagai produk baru dapat dihasilkan dari sampah tersebut. Sampah organik misalnya, dapat didaur ulang menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik seperti kertas dapat didaur ulang menjadi kertas daur ulang, demikian juga dengan kaleng, besi, kaca dan sebagainya dapat dimanfaatkan lagi menjadi produk berguna yang memiliki nilai jual. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa sasaran penanganan sampah adalah

1. Berkelanjutan lingkungan
2. Hemat secara ekonomi

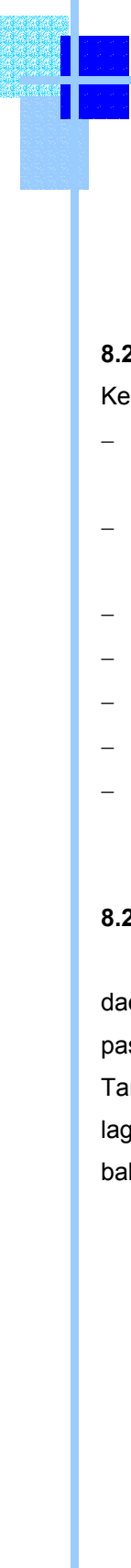
#### **8.2.3. Pengelolaan limbah cair**

Air buangan merupakan unsur potensial yang merupakan ancaman bagi lingkungan, khususnya lingkungan air. Dengan demikian pengolahan air buangan terutama limbah industri merupakan bagian dari upaya manusia untuk mengamankan sumber air yang sangat diperlukan bagi manusia, mengingat makin terbatasnya sumber air yang dapat dipergunakan untuk penyediaan air atau untuk keperluan lainnya. Dalam pengelolaan limbah cair harus diperhatikan aspek lahan, teknologi, biaya, persyaratan pembuangan limbah dan sebagainya.

Pengolahan limbah dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran, peningkatan produksi, izin lokasi, perbaikan produk dan penggunaan air kembali. Untuk tujuan penentuan cara pengolahan dan pemilihan teknologi kontaminan-kontaminan yang terdapat dalam air buangan industri dapat diklasifikasikan menjadi kontaminan biologi dan non biologi.

#### **8.2.4. Pengendalian Pencemaran Udara**

- Melakukan Program Langit Biru
- Melakukan pengujian emisi pada saat pengujian kendaraan
- Mensyaratkan penyusunan AMDAL /UKL-UPL pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara
- Melakukan reboisasi

- 
- Melakukan penyuluhan kepada petani agar memberi pupuk sesuai ketentuan/dosis
  - Hanya mengizinkan produk-produk dengan label CFC
  - Melakukan rehabilitasi lahan bekas pertambangan.

#### **8.2.5. Pengendalian Lahan dan Hutan**

Kebijakan maupun program sebagai upaya pengendalian lahan dan hutan, adalah :

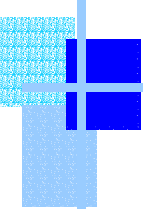
- Menyusun perencanaan tata ruang, dimana di dalamnya telah ditetapkan batas-batas kawasan lindung, kawasan yang boleh berubah fungsi, dll
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan dan perkebunan yang berwawasan lingkungan
- Pembinaan dan pengendalian perusahaan hutan
- Penguatan dan penatagunaan hutan
- Rehabilitasi hutan dan lahan
- Perlindungan dan pengamanan hutan lintas kabupaten
- Melakukan reklamasi dan reboisasi pada lahan kritis, termasuk bekas area penambangan

#### **8.2.6. Pengelolaan Pantai dan Pesisir**

Pengelolaan daerah pesisir pantai sangat diperlukan untuk melindungi daerah Kabupaten Tangerang dari bahaya alam seperti badai, abrasi, gelombang pasang, pencemaran dan intrusi air laut. Beberapa bagian dari pantai di Kabupaten Tangerang saat ini terlihat sudah mengalami pencemaran, kerusakan dan tidak asri lagi. Oleh karena itu, beberapa kebijakan yang dirasa perlu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan adalah :

1. Menjaga kualitas kawasan pantai/pesisir agar tetap baik, untuk itu perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada program-program pengendalian pembuangan limbah di kawasan pesisir. Pantai.
2. Melakukan monitoring terhadap implementasi kepedulian pengelolaan lingkungan oleh kegiatan yang ada di sepanjang pantai dan pulau-pulau kecil.
3. Melakukan pengaturan tata ruang wilayah pesisir dan laut, melindungi wilayah tersebut dari bahan pencemar, sampah dan bangunan liar.
4. Melakukan usaha konservasi serta rehabilitasi/reklamasi habitat yang telah rusak, dengan merehabilitasi ekosistem hutan mangrove yang sudah rusak,





---

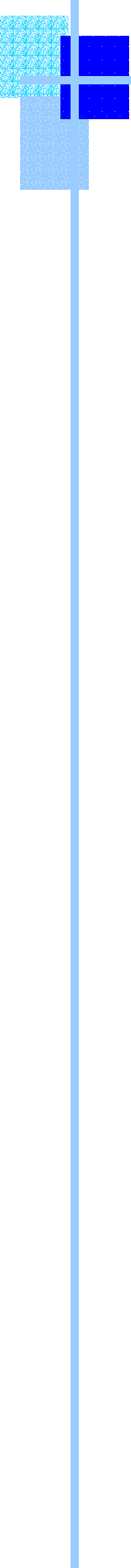
sehingga daerah pantai/pesisir tersebut dapat dikembangkan menjadi daerah wisata yang indah, asri, aman dan nyaman.

5. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan di wilayah pantai/pesisir seperti penambahan jumlah TPS dan memperlancar aksesibilitas pengangkutan sampah dari daerah pantai ke TPA sampah.
6. Melakukan penegakkan hukum lingkungan kepada setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran (pencemaran dan kerusakan) lingkungan di kawasan pantai pesisir Kabupaten Tangerang.
7. Memberikan sanksi/tindakan tegas pada siapapun yang tidak memiliki izin pembangunan di sepanjang pantai serta keharusan pembuatan Dokumen UKL/UPL atau AMDAL pada kegiatan usaha yang memiliki dampak lingkungan.
8. Melaksanakan peningkatan himbuan atau sosialisasi, serta program pemerintah yang dapat memberikan pendidikan lingkungan atau menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat tentang arti penting kebersihan lingkungan pantai/pesisir berserta dengan perairannya.

#### **8.2.7. Pemulihan Lahan Kritis dan Keanekaragaman hayati**

Upaya pemulihan dan perbaikan lahan kritis tidak saja dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga mengedepankan peran dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah Kabupaten Tangerang terutama dalam mengamankan kebijakan dan pelaksanaan program rehabilitasi lahan kritis diantaranya adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap upaya perubahan fungsi lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.
2. Penggunaan metode yang tepat dalam melakukan rehabilitasi dan pemanfaatan lahan kritis untuk dapat dipergunakan sebagai areal pertanian dan perkebunan yang produktif.
3. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak terkait dalam pemanfaatan lahan yang telah ditetapkan peruntukannya terutama lahan untuk konservasi.
4. Perlu alternatif dalam pembangunan pemukiman penduduk, agar tidak memanfaatkan lahan produktif maupun lahan hutan.
5. Menetapkan kebijaksanaan Pemerintah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian Tanah dan Larangan Pemanfaatan Lahan Produktif untuk keperluan lain.
6. Melakukan revegetasi dan reboisasi areal atau kawasan yang memiliki penutupan tajuk vegetasi jarang.

- 
7. Perlindungan dan penataan kawasan lindung, terutama penataan tapal batas kawasan lindung.
  8. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya upaya pelestarian sumberdaya lahan dan hutan.
  9. Pemantapan ruang lahan untuk budidaya pertanian dan perkebunan pada *catchment area* terutama menyangkut luas berdasarkan faktor daya dukung lingkungan setempat.
  10. Melakukan rehabilitasi lahan yang telah rusak melalui program reboisasi dan penghijauan.
  11. Melibatkan peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi lahan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan.



## DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Umum Penyusunan Laporan dan Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah 2007. Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2007.

Evaluasi dan Pemetaan Lahan Kritis Kabupaten Tangerang. Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2004.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang. Badan Perencanaan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2006.

Laporan kegiatan Pembinaan Masyarakat Pesisir Pantai. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang. 2006.



Hamparan Sawah di Selaparang



Saluran Irigasi di Selaparang



Aliran Sungai dan Keanekaragaman Hayati di Selaparang



Aktivitas cuci-mencuci di saluran irigasi di Selaparang





Perumahan yang telah tertata di Teluk Naga



Susana Pasar Tradisional di Teluk Naga



Formasi niipah di Pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga



Perairan Pesisir Pantai Tanjung Kait, Teluk Naga



Armada Transportasi antar pulau-pulau kecil Tanjung Kait, Teluk Naga



Pelayaran antar pulau-pulau kecil



Areal Rekreasi Pantai Tanjung Kait, Teluk Naga



Perairan Sungai Cirarab





Pemukiman Penduduk di Karang Serang



Formasi Hutan Bakau di Desa Karang Serang



Bekas Galian Pasir di desa Karang Serang



Aktivitas galian pasir Desa Karang Serang



Permukiman Penduduk Desa Karang Serang



Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin



Blooming Eceng Gondok di Perairan Sungai Cisadana



Perairan Sungai Cisadane menuju Muara sungai





Industri Minyak Goreng Dibantaran Sungai Cisadane



Lokasi Pertokoan di Bumi Serpong Damai



Perairan Situ Kepala Dua yang telah mengalami blooming Eceng Gondok



Permukiman Kumuh di Tepi Situ Kelapa Dua yang telah mengalami sedimentasi



Kemacetan Lalu Lintas Di Kabupaten Tangerang



Pabrik Keramik di Kabupaten Tangerang



Lokasi Perumahan Real Estate di KabupatenTangerang



Ruang Terbuka Hijau di Bumi Serpong Damai